

## BAB V

### PRAKTIK POLITIK NEPOTISME DAERAH

Baik berdasarkan pengamatan lapangan dan wawancara dengan sejumlah informan, maupun dari kajian dokumenter, memang ditemukan berbagai *modus operandi* politik uang (*money politics*). Praktik politik uang ini terutama terjadi dalam rangka peningkatan popularitas dan elektabilitas pasangan bakal atau calon walikota dan wakil walikota. Pemberitaan tentang praktik politik uang ini tidak berhenti ketika masa kampanye berakhir, tetapi juga terjadi selama minggu tenang dalam bentuk pembagian paket beras (Sumber Data pada lampiran 6:5.1). Selama masa kampanye, Panwaslu juga menerima laporan dan menggelar perkara praktik politik uang yang melibatkan tiga pasangan calon kepala daerah (Sumber Data pada lampiran 6:5.2). Bahkan hingga hasil Pemilu telah ditetapkan oleh KPU Kota Singapraja, masih ada pasangan calon yang mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi yang di antaranya dengan tuduhan adanya praktik politik uang (Sumber Data pada lampiran 6:5.3).

Sesuai dengan fokus penelitian, tanpa menghilangkannya sebagai salah satu strategi yang tampaknya juga ditempuh oleh beberapa pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Singapraja, uraian berikut tidak menyertakan praktik politik uang sebagai strategi khusus yang ditempuh oleh pasangan Wara Srikandi dan Wibisono, baik untuk kepentingan meningkatkan popularitas maupun elektabilitas mereka.

Dengan demikian, sesuai tujuan penelitian, bab ini menyajikan berbagai bentuk praktik politik *nepotisme* dalam pemilihan kepala daerah di luar strategi praktik politik uang. Pelaku utama politik *nepotisme* ini bukan hanya pejabat politik (*nepotis*), tetapi juga calon kepala daerah hasil *nepotisme* (*nepos*). Pemilihan bentuk-bentuk praktik politik *nepotisme* dalam pemilihan kepala daerah didasarkan pada tiga kategori tujuan. Pertama, bentuk-bentuk praktik yang dilakukan oleh kepala daerah *nepotis* dan bakal calon kepala daerah *nepos* untuk meningkatkan popularitas, sekaligus sebagai alasan pendukung untuk mendapatkan rekomendasi dari partai politik. Kedua, bentuk-bentuk praktik yang dilakukan oleh kepala daerah *nepotis* dan bakal calon kepala daerah *nepos* untuk mendapatkan legalitas sebagai calon kepala daerah. Ketiga, bentuk-bentuk praktik yang dilakukan kepala daerah *nepotis* untuk meningkatkan elektabilitas calon kepala daerah *nepos*.

#### **A. Strategi Peningkatan Popularitas**

Strategi Peningkatan popularitas bagi Wara Srikandi, dilakukan baik oleh Bagus Permadi maupun Wara Srikandi melalui dua kelompok siasat, yaitu siasat internal Partai Politik dan siasat eksternal Partai Politik. Dengan memanfaatkan legitimasi kekuasaan yang dimiliki – khususnya legitimasi politik dan legal-formal – Bagus Permadi memanfaatkan seoptimal mungkin segala sumberdaya publik yang bisa diakses terutama untuk menarik perhatian dan kepercayaan dari DPP PDIP.

Kesulitan Bagus Permadi, selaku Ketua DPC PDIP Kota Singapraja dan Wara Srikandi, selaku Bendahara PDIP Kota Singapraja, untuk mendapatkan perhatian dan

kepercayaan dari DPP PDIP muncul karena mereka memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan Abimanyu, Ketua DPD PDIP Jawa Timur. Ketegangan hubungan antara Bagus Permadi dengan Abimanyu semakin meningkat karena Sri Sendari, mantan Ketua DPRD Kota Singapraja yang juga anggota DPR RI Fraksi PDIP adalah isteri Abimanyu. Sudah cukup lama Sri Sendari juga diketahui bermaksud mencalonkan diri menjadi Walikota Singapraja, yang tentu saja juga memerlukan rekomendasi dari DPP PDIP. Dengan demikian, ada rivalitas sangat ketat untuk mendapatkan rekomendasi DPP PDIP, antara Wara Srikandi yang didukung oleh Bagus Permadi, Ketua DPC PDIP Kota Singapraja, dengan Sri Sendari yang didukung oleh Abimanyu, Ketua DPD PDIP Jawa Timur.

Sejauh menyangkut persaingan meningkatkan popularitas, Wara Srikandi memiliki peluang lebih besar dibanding Sri Sendari, baik melalui siasat internal partai, dan lebih-lebih melalui siasat eksternal partai. Berikut adalah paparan data tentang berbagai upaya dan siasat yang dilakukan oleh Bagus Permadi dan Wara Srikandi untuk meningkatkan popularitas *nepos*.

#### 1. Pengangkatan *Nepos* sebagai Bendahara DPC PDIP

Sebagai Walikota Singapraja yang menjabat untuk kali kedua dan Ketua DPC PDIP Kota Singapraja, Bagus Permadi memiliki keleluasaan untuk tidak hanya mengendalikan PDIP Kota Singapraja, tetapi juga Pemerintah Kota Singapraja. Keleluasaan tersebut digunakan oleh Bagus Permadi untuk mengatur strategi dalam rangka mempopulerkan Wara Srikandi dengan antara lain menjadikan isterinya



sebagai Bendahara DPC PDIP Kota Singapraja. Pengangkatan Wara Srikandi menjadi Bendahara Bendahara DPC PDIP Kota Singapraja ternyata tidak mengalami hambatan, karena segera setelah diajukan, turun Surat Keputusan DPP PDIP Nomor 09. 13-A/TAP-DPC/DPP/XI/2010 per tanggal 30 November 2010.

Seperti pada umumnya organisasi politik dan sosial, tiga pengurus harian organisasi, yaitu: Ketua, Sekretaris dan Bendahara, bukan hanya merupakan representasi organisasi, tetapi juga diakui memiliki kewenangan cukup besar dalam mengendalikan arah gerakan dan keputusan organisasi. Karena itu, sebagai Ketua DPC PDIP Kota Singapraja, Bagus Permadi memiliki dan menggunakan pengaruhnya untuk mengangkat Wara Srikandi menjadi Bendahara DPC PDIP Kota Singapraja.

Agar lebih mudah bagi Bagus Permadi untuk mengendalikan DPC PDIP Kota Singapraja, Bagus Permadi juga mengangkat salah satu orang dekatnya, Widjiyanto, sebagai Sekretaris DPC PDIP Kota Singapraja. Dengan menempatkan Wara Srikandi sebagai Bendahara dan Widjiyanto sebagai Sekretaris DPC PDIP Kota Singapraja, maka tidak hanya ada ketergantungan sumberdana partai kepada Ketua dan Bendahara, tetapi juga memudahkan dalam membuat kebijakan partai yang hanya memerlukan rapat pimpinan partai.

Sejalan dengan paparan data tersebut, Cahya mengemukakan bahwa sejak awal jabatannya yang kedua, Bagus Permadi sudah bermaksud mengajukan isterinya sebagai pengganti dirinya.

Setelah terpilih menjadi walikota, untuk yang kedua, Pak Bagus Permadi mengangkat Bu Bagus Permadi sebagai Bendahara DPC PDIP, sama sekretarisnya Wijianto. Karena dia berpikir bahwa, saya sudah menjabat walikota dua kali, dia berpikir ya seperti itu. Jadi target dia sudah sesuai. Waktu periode pertama, gambar-gambar program pemerintah semuanya memasang foto Pak Bagus Permadi, agar bisa terpilih lagi. Tapi pada periode kedua, foto Pak Bagus Permadi kalah banyak dibandingkan dengan foto-foto atau gambar-gambar Bu Bagus Permadi di baliho-baliho yang dipasang di berbagai tempat strategis (Sumber Data pada lampiran 6: 5. 41).

Dengan kedudukan sebagai Bendahara DPC PDIP Kota Singapraja, serta sejumlah jabatan organisasi sosial sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, Wara Srikandi memiliki peluang lebih besar untuk tidak hanya membangun popularitas dirinya, yang ini tampak dari berbagai hasil survai popularitas atau elektabilitas para bakal calon Walikota Singapraja, tetapi juga memiliki cukup alasan karena kedudukannya sebagai kader sekaligus fungsionaris DPC PDIP Kota Singapraja untuk mendapatkan rekomendasi dari DPP PDIP.

## 2. Rekayasa Kepengurusan PAC PDIP untuk *Nepos*

Sesuai pasal 22 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDIP, struktur dan jenjang kepengurusan PDIP terdiri dari: (1) Dewan Pimpinan Pusat Partai disingkat DPP Partai; (2) Dewan Pimpinan Daerah Partai disingkat DPD Partai; (3) Dewan Pimpinan Cabang Partai disingkat DPC Partai; (4) Pengurus Anak Cabang disingkat PAC Partai; (5) Pengurus Ranting Partai; dan (6) Pengurus Anak Ranting Partai. Dengan demikian, di bawah DPC PDIP Kota Singapraja, masih terdapat tiga jenjang kepengurusan partai, yaitu: Pengurus Anak Cabang disingkat PAC Partai; Pengurus Ranting Partai; dan Pengurus Anak Ranting Partai.

Mempertimbangkan PDIP sebagai organisasi yang demokratis dan berjenjang, Bagus Permadi tidak hanya berusaha mengendalikan organisasi pada jenjang Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota Singapraja, tetapi juga jenjang di bawahnya khususnya PAC, yang kedudukannya ada di setiap kecamatan. Berkenaan dengan kedudukan strategis PAC PDIP dalam pencalonan kepala daerah, lazimnya penjarangan bakal calon dilakukan di tingkat Rapat Kerja DPC Kabupaten/Kota, yang diikuti oleh para pengurus DPC dan PAC PDIP tingkat Kecamatan. Forum ini bisa mengajukan hasil penjarangan untuk mendapatkan persetujuan dari DPC PDIP tingkat Kota/Kabupaten. Hasil musyawarah demikian, diterima sebagai aspirasi yang mewakili seluruh anggota PDIP tingkat Kota/Kabupaten.

Agar aspirasi yang mewakili seluruh anggota PDIP sejalan dengan tujuannya untuk mencalonkan Wara Srikandi sebagai Walikota Singapraja, maka Bagus Permadi berusaha mengatur sedemikian rupa, sehingga hampir seluruh pengurus PAC PDIP di Kota Singapraja juga diisi oleh orang-orang yang berafiliasi dan loyal terhadap Bagus Permadi dan Wara Srikandi bersepakat mengajukan Wara Srikandi sebagai bakal calon Walikota Singapraja dari DPC PDIP Kota Singapraja. Dengan susunan pengurus harian DPC PDIP Kota Singapraja sebagaimana disebutkan, serta pengurus PAC PDIP yang loyal kepada Bagus Permadi dan Wara Srikandi, kedua orang ini pun mampu mengarahkan Musyawarah Kerja PAC PDIP Kota Singapraja untuk membuat keputusan bulat mendukung Wara Srikandi sebagai Bakal Calon Walikota Singapraja 2013-2018 dari PDIP Kota Singapraja.



Memang tidak ada jaminan bahwa semua anggota dan pengurus PDIP sejalan dengan kehendak Bagus Permadi. Namun demikian, Bagus Permadi juga telah dikenal sebagai politisi yang tidak setengah-setengah dalam melancarkan strateginya. Beberapa kasus bisa menggambarkan dan menjelaskan mengapa Bagus Permadi cenderung berhasil dalam mewujudkan kehendaknya.

Salah satu kejadian yang bisa menggambarkan perilaku politik Bagus Permadi adalah tentang hubungannya dengan Bambang GW. Ketika pemberian rekomendasi DPP PDIP kepada Sri Sendari sekaligus pemecatan Bagus Permadi, Wara Srikandi dan Widjianto diberitakan di media massa, ada salah satu warga Kota Singapraja yang bernama Harsono, mempermasalahkan pemberitaan tersebut. Menurut Bambang GW, apa yang disampaikan Harsono, yang membela Bagus Permadi, Wara Srikandi dan Widjianto tersebut sama sekali tidak objektif.

Komentar Mas Harsono sangat tidak obyektif karena kalau benar-benar memahami sejarah berdirinya PDIP sejak awal, aku sangat terlibat aktif dengan berbagai resikonya tapi ketika aku digeser oleh saudara Bagus Permadi saat itu kenapa anda tak ada komentar sama sekali??? Aku pikir DPP PDIP telah mengambil sikap dengan berbagai pertimbangan dan itu adalah keputusan organisasi tertinggi partai, coba bandingkan dengan kondisi saat aku tiba-tiba dinonaktifkan, tidak ada selebar surat keputusan apapun dari DPP PDIP. Bicara sejarah haruslah kita lebih obyektif dan realistis, jangan subyektif begitu! (Sumber Data pada lampiran 6: 5.4).

Bambang GW adalah salah satu pengurus DPC PDIP Kota Singapraja yang tersingkir karena keputusan sepihak Bagus Permadi sekali Ketua DPC PDIP Kota Singapraja. Setelah tersingkir dari DPC PDPI, Bambang GW bergabung dengan PNBK. Bambang GW sendiri memiliki karakter sangat berbeda dengan Widjianto

yang senantiasa menyetujui keputusan Bagus Permadi. Dengan ungkapan lain, Widjianto adalah seorang loyalis Bagus Permadi, sehingga akhirnya termasuk ke dalam salah satu dari tiga orang yang diberhentikan baik selaku Sekretaris DPC PDIP Kota Singapraja maupun keanggotaan PDIP. Widjianto dinilai bersama-sama Bagus Permadi dan Wara Srikandi telah melakukan tindakan indisipliner.

Terlepas dari persoalan pemecatan yang menjadi titik tolak perbincangan tersebut, dapat diketahui dengan jelas bahwa Bagus Permadimembangun pengaruh dan kekuasaannya dengan mengurangi sampai seminimal mungkin segala potensi yang akan mengganggu kepentingannya, dan mengerahkan sampai semaksimal mungkin segala potensi yang akan mendukung kepentingannya. Pengaturan sedemikian rupa susunan kepengurusan PAC PDIP kecamatan-kecamatan di Kota Singapraja, jelas akan lebih memudahkan Bagus Permadi dan Wara Srikandi untuk meningkatkan popularitas Wara Srikandi, meningkatkan peringkat survai elektabilitas, dan sangat mungkin mendapatkan rekomendasi dari DPP PDIP.

### 3. Rekayasa Rapat Kerja dan Penyerahan Formulir *Nepos*

Tercermin dalam namanya, PDIP merupakan salah satu partai politik yang menempatkan demokrasi sebagai salah satu dari nilai-nilai yang tidak hanya dijunjung tinggi oleh partai, tetapi juga menjadi salah satu nilai yang hendak diperjuangkan oleh seluruh organ dan anggota partai. Karena itu, tata-cara penjarangan bakal calon kepala daerah yang berlaku dalam partai ini pun diupayakan melalui mekanisme demokratis dengan memperhatikan aspirasi warga partai.



Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan kalangan partai ini, diperoleh gambaran bahwa proses penjaringan dimulai dari tingkat PAC PDIP Kecamatan. Selanjutnya, semua pengurus PAC PDIP menyelenggarakan musyawarah dalam rapat kerja DPC PDIP untuk memilih bakal calon yang hendak diajukan secara resmi melalui DPC kepada DPP. Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan bagi DPD untuk mengajukan bakal calon kepala daerah kepada DPP. Disebut proses penjaringan karena keputusan akhir untuk memberikan atau tidak memberikan rekomendasi kepada bakal calon kepala daerah, baik yang diajukan oleh DPC maupun DPD, secara mutlak merupakan kewenangan DPP, khususnya Ketua DPP PDIP.

Mempertimbangkan mekanisme penjaringan dari bawah tersebut, maka salah satu langkah awal dari strategi Peningkatan popularitas dan legalitas Wara Srikandi sebagai calon walikota adalah dengan mempengaruhi sedemikian rupa jalannya rapat kerja DPC PDIP agar menempatkan Wara Srikandi sebagai satu-satunya bakal calon walikota yang akan diajukan oleh DPC PDIP untuk mendapatkan rekomendasi dari DPP PDIP. Upaya mengatur proses dan hasil rapat kerja ini berjalan lancar tidak hanya karena Bagus Permadi adalah Ketua DPC PDIP Kota Singapraja dan Walikota Singapraja, tetapi juga karena telah didahului oleh langkah-langkah menempatkan Wara Srikandi sebagai Bendahara DPC PDIP Kota Singapraja serta rekayasa kepengurusan semua PAC PDIP di Kota Singapraja yang loyal kepada kepengurusan DPC PDIP Kota Singapraja. Selain itu, penyediaan sumberdaya dan anggaran dari

Bagus Permadi dan Wara Srikandi telah secara relatif menciptakan ketergantungan di kalangan pengurus PAC PDIP di Kota Singapraja.

Sesuai rencana, Rapat Kerja DPD PDIP Kota Singapraja diselenggarakan tanggal 29 Desember 2011 di Kartini Imperial Building (Gedung PKK) Kota Singapraja. Sesuai pula dengan harapan dan tujuan Bagus Permadi dan Wara Srikandi, rapat kerja yang menghimpun aspirasi dari tingkat Pengurus Anak Ranting, Pengurus Anak Cabang, hingga Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Singapraja bersepakat untuk mengusulkan satu nama saja, yakni Wara Srikandi sebagai satu-satunya bakal calon walikota yang akan diberangkatkan DPC PDIP Kota Singapraja dalam Pemilihan Kepala Daerah 2013. Memenuhi undangan Bagus Permadi, selaku Ketua DPC PDIP Kota Singapraja, ketika itu juga hadir pimpinan dan perwakilan beberapa partai politik yang ada di Kota Singapraja, yaitu: Partai Keadilan Sejahtera, Partai Hanura, dan Partai Golkar. Juga hadir ikut dalam rapat kerja tersebut Pengurus DPD PDIP Jawa Timur, Anggota DPR RI dari PDIP Singapraja Raya, Sri Sendari, serta Bupati Probolinggo.

Pria yang kerap disapa Bagus Permadi itu menambahkan, meski hanya ada satu calon tunggal untuk Walikota Singapraja, namun partai membuka peluang kepada kader lain yang mau mendaftar dan mencalonkan diri menjadi walikota. "Siapa saja boleh mendaftar asalkan bisa memenuhi berbagai persyaratan yang telah disepakati partai," imbuhnya.

"Adapun beberapa persyaratan itu yaitu, kualitas SDM, ketokohan di partai dapat dibuktikan, kesejarahannya jelas, tidak ada keterlibatan dengan masalah hukum dan mempunyai anggaran. Apabila bisa memenuhi syarat tersebut, silahkan saja mendaftar ke PDIP," sambung Bagus Permadi (Sumber Data pada lampiran 6: 5.5).

Walaupun tersirat, sebenarnya persaingan sengit antara Wara Srikandi dan Sri Sendari untuk mendapatkan rekomendasi DPP PDIP dan memenangkan Pemilukada sudah tampak saat rapat kerja ini. Dalam kesempatan itu, Bagus Permadi memang menyampaikan bahwa DPC PDIP Kota Singapraja hanya akan mengajukan satu nama bakal calon walikota, yaitu: Wara Srikandi. Namun demikian, pada kesempatan yang sama Bagus Permadi juga mengemukakan tentang masih adanya kesempatan bagi anggota atau kader PDIP lain yang ingin mengajukan diri sebagai calon walikota dengan beberapa ketentuan atau persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya adalah kualitas SDM, tingkat kesejahteraan yang tidak diragukan, ketokohan di partai yang bisa dibuktikan, tidak ada keterlibatan dengan masalah hukum, dan mempunyai anggaran yang cukup untuk mencalonkan dan memenangkan Pemilukada. Persyaratan terakhir tentang anggaran tersebut sangat ditekankan, karena sebagaimana dikemukakan oleh Bagus Permadi, untuk mengembalikan formulir saja, setiap kader yang mengajukan diri menjadi calon walikota harus membayar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dana tersebut, masih menurut Bagus Permadi, diperlukan untuk membiayai kegiatan survai elektabilitas bakal calon walikota (Sumber Data pada lampiran 6: 5.6).

Setelah mendapatkan dukungan seluruh PAC PDIP Kota Singapraja, tanggal 26 Mei 2012, Wara Srikandi didampingi Bagus Permadi mendatangi Kantor DPC PDIP Kota Singapraja untuk menyerahkan formulir bakal calon walikota yang sudah diisi. Kesempatan ini pun digunakan oleh Bagus Permadi untuk menunjukkan besarnya dukungan masyarakat terhadap Wara Srikandi, yang ditunjukkan dengan



jumlah simpatisan yang turut mengantar. Kembali Bagus Permadi menyampaikan kepada khalayak bahwa rapat kerja partai telah memperoleh kesepakatan bulat, mulai dari anak cabang hingga tingkat ranting, hanya merekomendasikan satu bakal calon atau calon Walikota Singapraja Periode 2013-2018, yaitu: Wara Srikandi.

Menurut Bagus Permadi, sosok Wara Srikandi merupakan orang yang tepat untuk mendapat kesempatan menjadi Walikota Singapraja. Dia pun menggaris-bawahi, bahwa sama dengan dirinya, Wara Srikandi merupakan bakal calon yang belum pernah terlibat dalam masalah hukum, apalagi melakukan korupsi dan merampas uang rakyat. Lebih dari itu, Wara Srikandi juga mendapatkan dukungan dari 300 elemen masyarakat Kota Singapraja di luar warga PDIP Kota Singapraja.

"Calon dari PDIP hanya satu yaitu bunda (sebutan isteri Bagus Permadi). Dan masyarakat harus teguh dengan satu pilihan, " teriak Bagus Permadi kepada puluhan ribu simpatisan ikut mengantar.

Bagus Permadi menegaskan, jika pencalonan isterinya sangat tepat tanpa tersangkut kasus hukum. Apalagi melakukan korupsi, merampas uang rakyat. Ia melanjutkan dengan memuji dirinya selama memimpin Kota Singapraja dua periode tak pernah mengkorupsi uang rakyat.

"Seperti Bagus Permadi tak pernah korupsi, bunda juga orang yang bersih, " ucap Bagus Permadi disambut tepuk tangan simpatisan.

Bagus Permadi menambahkan, jika pencalonan isterinya telah didukung 300 elemen masyarakat Kota Singapraja.

"Ini membuktikan warga Singapraja mendukung sepenuhnya isterinya sebagai walikota, " imbuh Bagus Permadi.

Dalam pengambilan formulir Wara Srikandi juga menyertakan uang pendaftaran sebesar Rp 100 juta nantinya digunakan untuk menggelar survai elektabilitas calon. Wara Srikandi sendiri akan melanjutkan program suaminya dalam membuat Kota Singapraja lebih maju (Sumber Data pada lampiran 6: 5.7).

Penegasan Bagus Permadi tentang Wara Srikandi yang tidak pernah terlibat dalam masalah hukum tersebut sebenarnya merupakan sindiran sekaligus siasat untuk

mendiskreditkan Sri Sendari. Perihal kenyataan bahwa Sri Sendari pernah menjadi tersangka dalam kasus korupsi semasa menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Singapraja memang telah dijadikan salah satu pesan kampanye oleh Bagus Permadi dan Wara Srikandi. Meskipun Jaksa Penuntut mengajukan banding atas keputusan Pengadilan Negeri, ternyata dalam berkas banding tersebut dinyatakan tidak lengkap dan terlambat oleh Pengadilan Tinggi, sehingga keputusan tidak bersalah untuk Sri Sendari sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Selain acapkali dikemukakan dalam berbagai kesempatan bahwa Wara Srikandi merupakan sosok yang tidak pernah terlibat kasus hukum, dalam sejumlah besar mobil angkutan kota juga pernah dipasang stiker besar dengan tulisan cukup besar bahwa Bunda Wara Srikandi tidak pernah terlibat kasus hukum. Pernyataan itu ditulis dalam Bahasa Jawa dialek Singapraja: “*Gak Tau Kasus!*” Stiker besar sosialisasi Wara Srikandi itu sendiri telah disebar dan terpasang di banyak Angkutan Kota mendahului sosialisasi yang dilakukan oleh semua bakal calon yang akhirnya juga mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Singapraja.

#### 4. Pemanfaatan Organisasi NGOGO untuk *Nepos*

Telah dibahas pada bab sebelumnya, NGOGO sangat berpeluang untuk dipolitisasi baik oleh kepala daerah petahana ataupun orang yang memiliki kedekatan dengan petahana untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas. Peluang ini sangat dimungkinkan karena jabatan pimpinan NGOGO melekat dalam struktur organisasi

dan jabatan pemerintahan. Peluang demikian tidak hanya menyangkut kedudukan struktural dan keanggotaan organisasi, tetapi juga berkenaan dengan kemungkinan untuk menggunakan berbagai program, acara dan sumberdaya publik.

***a. Pemanfaatan Organisasi PKK***

Penempatan organisasi PKK dalam jejaring politik *nepotisme* sebagaimana telah dibahas sebelumnya, menunjukkan betapa penting fungsi organisasi PKK ini bagi peningkatan popularitas dan elektabilitas Wara Srikandi. Sebagai contoh adalah pemanfaatan sumberdaya Kartini Imperial Building Kota Singapraja, yang tidak lain adalah Gedung PKK Kota Singapraja. Gedung cukup representatif di tengah kota ini bisa dengan leluasa digunakan Bagus Permadi dan Wara Srikandi untuk kegiatan sosialisasi bakal calon walikota Wara Srikandi, baik atas nama DPC PDIP Kota Singapraja maupun atas nama TP PKK Kota Singapraja. Keleluasaan demikian jelas tidak dimiliki oleh para bakal calon walikota lain, termasuk Sri Sendari yang merupakan pesaing berat Wara Srikandi, baik dalam upaya mendapatkan rekomendasi DPP PDIP maupun dalam memenangkan Pemilukada.

Dengan jenjang organisasi dan struktur kepengurusan hingga tingkat RT, misalnya, PKK tidak hanya memiliki sumberdaya cukup besar, tetapi juga merupakan mesin sosialisasi yang sangat besar dan mencakup seluruh keluarga di Kota Singapraja. Karena itu, jauh hari sebelum masa kampanye calon kepala daerah dimulai, Wara Srikandi sudah menggunakan organisasi PKK tidak hanya untuk memperkenalkan dirinya kepada seluruh kaum perempuan di Kota Singapraja, tetapi



juga memanfaatkan jaringan PKK untuk mendistribusikan uang santunan kepada ibu-ibu rumah tangga, baik menjelang Pemilu yang memenangkan Bagus Permadi maupun menjelang Pemilu 2013.

Informasi yang berhasil didapat melalui wawancara dengan seorang Guru Sekolah Menengah Atas – yang karena lura saat itu perempuan, sehingga ketua PKK tingkat Kelurahan diserahkan kepadanya – menyebutkan bahwa menjelang masa pemilihan Kepala Daerah secara langsung untuk kali pertamanya, Wara Srikandi selaku Ketua Tim penggerak PKK Kota Singapraja menghadiri undangan yang diajukan oleh Ketua TP PKK Kelurahan beberapa saat sebelumnya, dimana usulan mengundang tersebut berasal dari para anggota PKK Kelurahan. Dalam kunjungan tersebut, Wara Srikandi selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kota Singapraja, hendak menyerahkan sejumlah uang yang diperuntukkan sebagai kas PKK setempat. Namun berdasarkan kesepakatan bersama, akhirnya uang yang diperuntukkan sebagai uang kas tersebut dibagi kepada setiap anggota yang hadir dalam pertemuan tersebut, adapun kutipan wawancara tersebut dapat ditulis sebagai berikut:

Dulu pernah waktu menjelang Pilkada tahun 2008, waktu itu karena lura disini perempuan, sehingga Ketua PKK dipercayakan kepada saya. Pernah ada kejadian lucu. Saya selaku Ketua PKK banyak mendapat masukan untuk menghadirkan Bu Bagus Permadi ke sini, dengan alasan belum pernah mendapat *dum-duman*. Akhirnya saya menindaklanjutinya dengan menemui Bu Bagus Permadi di Balai Kota. Saat itu niat kami disambut baik oleh beliau dan saya disuruh menemui stafnya supaya diagendakan. Saat kunjungan ke sini, Bu Bagus Permadi digoda oleh beberapa orang kader PKK untuk memberikan sesuatu, karena warga belum pernah menerima *dum-duman* dari Bu Bagus Permadi. Akhirnya Bu Bagus Permadi mempunyai maksud untuk membantu mengisi kas PKK, dan hal tersebut sepertinya tidak begitu diharapkan para anggota. Sehingga setelah berunding, akhirnya disepakati

uang tersebut dibagikan kepada masing-masing anggota yang hadir pada waktu itu (Sumber Data pada lampiran 6: 5.8).

Setelah memenangkan pemilihan kepala daerah secara langsung, Bagus Permadi mulai memperbanyak frekuensi dan meningkatkan intensitas pelibatan isterinya sebagai bagian dari upaya sosialisasi ke publik. Dengan berbagai jabatan rangkap oleh Wara Srikandi, termasuk yang secara otomatis dijabat oleh isteri seorang Walikota, ternyata hal itu dinilai masih kurang. Ini bisa dikenali dari masih dilibatkannya dan digunakannya berbagai organisasi kemasyarakatan yang lain untuk meningkatkan popularitas Wara Srikandi.

Sebagai organisasi perempuan, PKK memiliki cakupan fungsi cukup luas. Namun demikian, justru karena program kerja PKK sangat luas dan hampir menyentuh seluruh bidang kehidupan, peran dan fungsi PKK seringkali tumpang tindih dengan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah daerah. Keadaan demikian membuka peluang sangat besar bagi pimpinan PKK untuk menumpang dan bahkan mengklaim sejumlah keberhasilan yang sebenarnya merupakan tugas pokok dan fungsi utama, dan bahkan didanai dengan anggaran daerah, sebagai hasil kerja PKK.

Sebagai contoh program Keluarga Berencana yang memiliki wilayah kerja cukup luas termasuk didalamnya terdapat Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia. Setidaknya dari ketiga program kerja tersebut merupakan wilayah yang masih memiliki kedekatan dengan fungsi dan peranan Tim Penggerak PKK. Keadaan demikian seringkali dijumpai di hampir semua daerah diklaim sebagai hasil kerja dari TP PKK bersama dengan institusi pemerintahan yang

melaksanakan program Keluarga Berencana tersebut. Setelah dilaksanakannya Otonomi Daerah, institusi pemerintah di daerah yang melaksanakan program Keluarga Berencana tersebut tidak lagi menggunakan nama BKKBN melainkan bergantung pada masing-masing daerah. Kota Singapraja menggabungkan Keluarga Berencana dengan Pemberdayaan Masyarakat sehingga fungsi Keluarga Berencana masuk ke dalam fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM).

Publikasi kegiatan yang dilakukan oleh Wara Srikandi tidak hanya dilakukan dengan memanfaatkan sarana dan fasilitas Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Singapraja, tetapi juga cara dan sarana lain. Dinas Komunikasi dan Informasi bersama dengan BKBPM dan TP PKK Kota Singapraja, misalnya, juga mengajak Singapraja TV untuk mendokumentasikan dan menyiarkan acara dialog publik yang bertempat di SMAN 8 Kota Singapraja yang dilaksanakan 29 November 2011 (Periksa Lampiran 1, Gambar 5.1). Acara dialog publik tersebut membicarakan berbagai hal terkait bagaimana menciptakan sebuah keluarga yang berkualitas, sejahtera dan harmonis. Berperan sebagai nara sumber dari acara tersebut adalah Ketua TP PKK Kota Singapraja Wara Srikandi, Kepala Sekolah SMAN 8 Kota Singapraja Ninik Kristiani, dan satu nara sumber lagi, yaitu: Jarot Edy Sulistyono. Acara tersebut melibatkan para pelajar juga perwakilan wali murid, mahasiswa, anak jalanan dan masyarakat umum sebagai undangan.

Masih banyak lagi potensi organisasi dan program pemerintah yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan citra positif dan popularitas Wara Srikandi. Ini



terutama dimungkinkan karena kedudukan Bagus Permadi sebagai Walikota Singapraja. Kesamaan visi, misi, tujuan, dan sasaran antara organisasi non pemerintah, dimana Wara Srikandi terlibat sebagai pengurus, dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program milik Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), memungkinkan dilakukannya kerjasama, baik yang memang dirancang khusus mempopulerkan Wara Srikandi maupun yang tidak dirancang secara khusus. Kegiatan yang tidak dirancang khusus demikian, dengan sendirinya juga memberikan peluang lebih besar kepada Wara Srikandi untuk lebih cepat dan lebih luas dikenal oleh warga Kota Singapraja.

Sebenarnya perlu dibedakan antara peningkatan popularitas secara umum dengan peningkatan popularitas Wara Srikandi sebagai calon Walikota Singapraja. Dalam penelitian ini, peningkatan popularitas senantiasa menunjuk, tidak hanya keterkenalan seseorang di tengah masyarakat, tetapi keterkenalan dalam arti positif. Giddens (1998) mengistilahkan upaya menjadikan seseorang atau sebuah partai terkenal secara positif ini sebagai politik citra (*politics of image*). Sejalan dengan konsep ini, melalui berbagai upaya, Wara Srikandi senantiasa ditampilkan dalam citra sangat positif, sebagai sosok wanita yang telah berjasa besar kepada Pemerintah dan masyarakat Kota Singapraja.

Salah satu bentuk dari politik citra dimaksud adalah peran-serta dan jasa besar Wara Srikandi dalam membangun kesadaran masyarakat Kota Singapraja membayar pajak sebagaimana diberitakan dalam sebuah media cetak. Diberitakan bahwa TP PKK Kota Singapraja telah bekerjasama dengan Dinas Pendapatan Daerah Kota

Singapraja dalam bidang pajak. Sebelum penandatanganan kerjasama yang dilakukan antara Dinas Pendapatan Daerah dengan Wara Srikandi selaku Ketua TP PKK Kota Singapraja, yang bertempat di Balai Kota Singapraja, Rabu 30 Januari 2013, terlebih dulu dikemukakan bahwa Wara Srikandi telah melakukan gerakan awal yang dimulai dengan Gerakan Ibu Sadar Pajak yang dimulai dengan Program Lunas PBB Kota Singapraja.

Seperti pemberitaan dalam pertandingan olahraga, disebutkan bahwa melalui Program Lunas PBB Kota Singapraja, Wara Srikandi telah berhasil mencetak rekor quattrick (lunas empat tahun) secara berkelanjutan. Sukses Program Lunas PBB tersebut selanjutnya dipublikasikan dan dikemas dalam bentuk acara yang berjudul Pekan Panutan Pajak (Periksa Lampiran 1, Gambar 5.2). Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Kota Singapraja pada 27 Januari 2012 dan diungkapkan sebagai titik awal gerakan ibu sadar pajak. Secara simbolis gerakan ibu sadar pajak tersebut dilakukan dengan memberikan penghargaan kepada ibu-ibu yang bisa menjadi panutan dalam melunasi kewajiban membayar pajak.

#### ***b. Pemanfaatan Organisasi GNOTA***

Program selanjutnya yang dimanfaatkan oleh Bagus Permadidan Wara Srikandi untuk meningkatkan popularitas adalah Gerakan Orang Tua Asuh (GNOTA). GNOTA merupakan sebuah gerakan sosial yang dibentuk melalui instruksi Presiden pada 29 Mei 1996 di Semarang. Sebagai gerakan yang diprakarsai oleh pemerintah, GNOTA merupakan organisasi yang bersifat nirlaba, independen dan transparan. Menurut sejarahnya, gerakan sosial ini dipergunakan sebagai salah

satu cara untuk menjawab permasalahan keterbatasan pemerintah dalam menjamin rakyat tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan mereka, terutama ketika Indonesia hendak menetapkan kebijakan wajib belajar 9 tahun.

Dalam menjalankan perannya, GNOTA tidak hanya menghimpun donasi dan sumbangan dari masyarakat, tetapi sekaligus menyalurkan dalam bentuk bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu agar bisa membiayai pendidikan, seragam sekolah, alat tulis, buku/diktat pelajaran, dan lain sebagainya. Dengan tujuan yang dimiliki, GNOTA senantiasa berusaha agar warga masyarakat, yang dalam praktiknya terutama adalah para pegawai pemerintah, mau menyisihkan penghasilannya untuk disumbangkan demi kelangsungan pendidikan anak-anak dari keluarga kurang sejahtera. Karena diprakarsai dan senantiasa melibatkan Pemerintah Daerah, maka GNOTA memiliki pengaruh relatif memaksa kepada para pegawai negeri di daerah. Pengaruh relatif memaksa ini bisa dilakukan baik dalam bentuk instruksi maupun himbauan kepala daerah kepada seluruh instansi daerah.

Permasalahan GNOTA di Kota Singapraja timbul karena, di satu sisi para pegawai negeri harus memberikan bantuan, baik secara sukarela maupun terpaksa dengan sistem potong gaji, sedangkan di sisi lain kegiatan penyalurannya senantiasa menampilkan sosok Wara Srikandi selaku Ketua GNOTA Kota Singapraja. Sebagai contoh, GNOTA Kota Singapraja memperingati hari Ibu, 22 Desember 2008, dengan memberi bantuan kepada 234 siswa yang berasal dari dua belas sekolah, diantaranya adalah SMPN 24, SMPN 14, SMP Dharmaraya Bhakti, SMPI Paramitra, paket B di



SKB Kalisari, SMPN 10, SMPN 7, SMPN 23, SMP Al Amin, SMP Nurul Mutaqin, SMP PGRI 8, MTs di daerah Kedungkandang, dan lain sebagainya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua GNOTA Wara Srikandi, menyerahkan bantuan berupa uang tunai sejumlah Rp. 125.000,00 per siswa ditambah 10 buah buku tulis per siswa. Bantuan tersebut diserahkan Wara Srikandi di dua tempat, yaitu: Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kalisari, Blimbing, dan (2) SMAN 10 Kedungkandang. Penyaluran bantuan tersebut didasarkan atas usulan yang dibuat oleh masing-masing sekolah.

Secara publik, kegiatan GNOTA yang tampak senantiasa berupa pemberian sumbangan kepada yang membutuhkan, sedangkan kegiatan GNOTA yang tidak tampak berupa penarikan sumbangan dari kelompok masyarakat tertentu, terutama pegawai negeri daerah. Karena itu, baik disengaja maupun tidak, GNOTA senantiasa meningkatkan popularitas dan citra positif Wara Srikandi. Salah satu kejadian yang tampaknya disengaja untuk meningkatkan popularitas dan citra positif Wara Srikandi adalah ketika salah satu siswa sekolah SMAN 7 Kota Singapraja tidak mampu membayar uang perpindahan senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga ijazah yang bersangkutan belum bisa diberikan.

Kejadian yang sebenarnya sangat biasa dalam dunia persekolahan ini, ternyata punya dampak pemberitaan besar karena dipublikasikan oleh media cetak dan elektronik. Disebutkan bahwa segera setelah mengetahui adanya kasus tersebut, Wara Srikandi, selaku ketua GNOTA Kota Singapraja, langsung menghubungi orangtua siswa yang ijasahnya ditahan tersebut. Kedua orangtua siswa itu pun diundang ke

rumah dinas walikota, pertama untuk mengklarifikasi kejadian yang sebenarnya, dan kedua, untuk menerima bantuan dari Wara Srikandi (Periksa Lampiran 1, Gambar 5.3).

Diberitakan bahwa setelah mendengarkan cerita langsung siswa beserta keluarganya bahwa ayah siswa yang bersangkutan adalah buruh serabutan yang penghasilannya tidak menentu, dan masih mempunyai kewajiban membiayai dua anak lainnya untuk masuk SD dan SMP, maka selain memberi bantuan langsung kepada siswa tersebut, Wara Srikandi juga menawarkan agar keluarga yang bersangkutan segera mendaftarkan kedua anaknya ke GNOTA supaya bisa mendapatkan bantuan dengan beberapa mekanisme yang harus dipenuhi (Sumber Data pada lampiran 6: 5.54).

Kecenderungan untuk menggunakan setiap kasus sebagai cara untuk meningkatkan popularitas dan citra positif Wara Srikandi tersebut, ternyata menimbulkan persoalan tersendiri di kalangan sekolah di Kota Singaperaja. Sebagai pihak yang lebih tahu tentang siswa dan latar belakang keluarganya, sekolah mengharapkan agar bantuan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Siswa yang berlatar belakang keluarga cukup mampu bertanggungjawab atas biaya pendidikan diharapkan dengan sungguh-sungguh memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan informasi dari sejumlah guru, terutama yang menangani penerimaan siswa baru, diperoleh gambaran tentang banyaknya orangtua siswa yang sebenarnya tidak bisa dikategorikan sebagai yang berhak mendapatkan bantuan,

malah berramai-ramai langsung menemui Wara Srikandi atau Kepala Dinas Pendidikan Kota Singapraja, untuk mendapatkan rekomendasi keringanan dan bahkan penghapusan segala biaya pendidikan. Sebegitu jauh, para orangtua siswa yang berhasil menghubungi Wara Srikandi atau Kepala Dinas Pendidikan Kota Singapraja hampir pasti mendapatkan keringanan dan atau penghapusan segala biaya pendidikan. Sementara itu, masih menurut informasi dari para guru, sejumlah calon siswa baru yang sebenarnya termasuk kategori miskin tetapi tidak memiliki akses ke Wara Srikandi atau Kepala Dinas Pendidikan Kota Singapraja, justru tidak mendapatkan bantuan yang benar-benar mereka butuhkan.

Dengan kebijakan dan praktik yang seringkali mengabaikan mekanisme pemberian keringanan atau pembebasan biaya pendidikan sebagaimana diuraikan tersebut, telah menimbulkan rasa tidak nyaman dan bahkan tidak simpati terhadap Wara Srikandi dan Kepala Dinas Pendidikan. Para guru yang bertugas melakukan pemetaan dan survai kondisi sosial ekonomi keluarga siswa merasa tidak digunakan dengan baik hasil kerjanya. Lebih dari itu, para guru yang bertugas dalam penerimaan siswa baru seringkali merasa diadu dengan walimurid. Semua itu terjadi karena praktik peningkatan popularitas dan citra positif Wara Srikandi melalui GNOTA dan pengaruhnya terhadap Kepala Dinas Pendidikan Kota Singapraja. Berikut adalah petikan wawancara dari salah satu guru yang bertugas melakukan survai dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB):

Siswa baru yang tidak mampu langsung diminta ke Bu Bagus Permadi untuk mendapatkan kemudahan atau keringanan. Akhirnya wali murid yang



menangkap kemudahan seperti itu akhirnya kalau ke sekolah menyampaikan. Ini katanya Bunda seperti ini, ini, ini, dan bahkan itu juga membawa surat rekomendasi dari Bunda. Sampai-sampai teman saya yang jadi ketua PPDB itu sempat mengatakan, "Lho kami ini tidak mengenal Bunda, Bunda, Bunda apa itu? Bundas ya?"

Itu karena saking jengkelnya karena banyak sekali yang membawa rekomendasi itu. Pada dasarnya jika anak tersebut tidak mampu, sekolah pasti akan membantu, karena pada dasarnya sekolah sudah mempunyai ketentuan jika ada buktinya, nanti saat diterima itu ada survai dari sekolah tanpa harus ada rekomendasi dari Bu Bagus Permadi.

Sebutan Bundas atau Bunda Penunggu Pohon sendiri sebenarnya karena sudah mblenger aja, ingin perubahan juga, apalagi kalau teman-teman diiming-imingi macam-macam sudah *ndak kepincut*, karena selama ini itu kalau *butuhe thok* kayak *yak yak o*, tapi setelah itu ndak ada wujudnya gitu aja, *wong* orang sudah bisa berfikir yang jelas arahnya kemana, nanti janji-janjinya *thok* gitu (Sumber Data pada lampiran 6: 5.12)

Dalam kapasitas sebagai Ketua GNOTA Kota Singapraja, Wara Srikandi memiliki cukup keleluasaan untuk memasuki dunia persekolahan di Kota Singapraja. Dengan difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kota Singapraja, bahkan Wara Srikandi bisa melakukan roadshow pemberian bantuan ke sekolah-sekolah secara langsung, sebagaimana yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2011. Dalam kesempatan itu, Ketua Gerakan Nasional Orang Tua Asuh bekerjasama dengan Diknas Pendidikan Kota Singapraja menggelar *roadshow* untuk memberikan bantuan berupa biaya sekolah dan seragam sekolah di sekolah-sekolah swasta yang berlokasi di pinggiran Kota Singapraja, yaitu: (1) SMP Aisyiyah Muhammadiyah 3, Jalan Thamrin No. 3, (2) SMK YP 17 – 2, Jalan Melati Utara No. 65, dan (3) MTs-MA Muhammadiyah (Jalan Kyai Sofyan Yusuf No. 32, Kedungkandang.

Di SMP Aisyiyah Muhammadiyah, GNOTA telah menyalurkan bantuan kepada 25 siswa baru @ Rp. 25.000. Bantuan juga diberikan kepada siswa kelas 2 dan 3 sebanyak 47 siswa @ Rp. 25.000 selama 3 bulan. Tak hanya itu,

bantuan LKS juga diberikan kepada 18 anak panti asuhan @Rp. 80.000, - dan bantuan seragam kepada 18 anak panti asuhan @Rp. 500.000, dengan total nilai bantuan yang diserahkan di SMP Aisyiyah sejumlah Rp. 14. 590. 000.

Kunjungan berikutnya di SMKYP 17-2, Ketua GNOTA memberikan bantuan kepada 40 siswa kelas 1 dan 2 @Rp 10.000 (selama 6 bulan), 36 siswa baru @Rp 17.000; seragam baru (olahraga) kepada 36 siswa @Rp 50.000 dan seragam abu-abu putih kepada 30 siswa (berupa seragam) @Rp 127.000. sehingga total nilai bantuan yang disalurkan saat kunjungan ke SMKYP 17-2 senilai Rp 9.384.000, -.

Selanjutnya, MTs-MA Muhammadiyah merupakan tujuan terakhir dalam agenda roadshow tersebut, Ketua GNOTA telah menyerahkan sejumlah bantuan senilai Rp 9.500.000,-. Bantuan tersebut dapat dirinci sebagai berikut, untuk bantuan seragam dan SPP kepada 25 siswa MTs kelas 1 senilai @Rp 500.000,- dan kepada 19 siswa MA kelas 1 senilai @Rp 500.000 (Sumber Data pada lampiran 6: 5.13).

Melalui kegiatan pemanfaatan program GNOTA tersebut, setidaknya ada dua keuntungan yang diperoleh Wara Srikandi, yakni yang pertama adalah pembentukan *image* di lingkungan siswa, terutama siswa yang telah mempunyai hak pilih, dan wali murid yang harapannya tentu saja diketahui oleh orang-orang selingkungan siswa dan wali murid. Sedangkan keuntungan yang kedua, adalah pemanfaatan media massa yang berpeluang menimbulkan *hallo effect*, sehingga perbuatan baik sosok Wara Srikandi yang begitu menaruh perhatian pada dunia persekolahan tersebut diketahui oleh masyarakat Kota Singapraja secara luas (Periksa Lampiran 1, Gambar 5.4).

Berkenaan dengan pemanfaatan GNOTA untuk meningkatkan popularitas dan citra positif Wara Srikandi, tetap harus dicatat adanya sejumlah kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Intervensi yang memanfaatkan kedudukan sebagai Ketua GNOTA Kota Singapraja, dan sebagai isteri Walikota Singapraja, cenderung mengganggu kewibawaan sekolah dan tenaga pendidik, rasa tanggungjawab masyarakat, maupun profesionalisme SKPD, serta ketidak-adilan

yang dialami oleh mereka yang tidak memiliki akses kepada Wara Srikandi dan atau Dinas Pendidikan Kota Singapraja.

### *c. Pemanfaatan Organisasi Dharma Wanita*

Secara rutin sebulan sekali, Dharma Wanita Persatuan Kota Singapraja menyelenggarakan pertemuan di Balai Kota Singapraja. Selain pertemuan rutin demikian, pada saat-saat tertentu, Dharma Wanita juga menyelenggarakan acara khusus, seperti ketika memperingati Hari Kartini. Dalam kesempatan demikian, tentu ada peluang bagi Penasehat Dharma Wanita, Wara Srikandi, untuk mensosialisasikan dirinya, baik untuk kepentingan karir politik maupun tidak. Pada Peringatan Hari Kartini 2012, misalnya Dharma Wanita Persatuan Kota Singapraja menyelenggarakan lomba ketrampilan pembuatan kerajinan dari barang bekas agar anggota Dharma Wanita di Kota Singapraja semakin kreatif (Periksa Lampiran 1, Gambar 5.5).

Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kota Singapraja, Wara Srikandi mengaku sangat senang dengan kegiatan yang dilakukan oleh ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kota Singapraja. Kegiatan ini menjadi mengingatkan kembali pada perjuangan Ibu Kartini agar masyarakat Indonesia 133 tahun yang lalu bisa mengenyam pendidikan.

“Tidak hanya berdandan seperti Kartini yang pada zamannya memang sudah luar biasa karena beliau adalah putri keraton yang berada. Lebih utama lagi adalah menauladani sosok Kartini dalam memperjuangkan perempuan,” tegas Wara (Sumber Data pada lampiran 6: 5.16).

Telah dikemukakan, bahwa keanggotaan organisasi ini bersifat terbatas. Walaupun demikian, organisasi ini memiliki hubungan yang erat dengan sebaran pengaruh kekuasaan di antara para anggotanya. Ini terjadi karena secara struktural Dharma Wanita memiliki kesebangunan dengan struktur dan hirarkhi organisasi



pemerintahan. Unsur pimpinan atau pengurus Dharma Wanita Persatuan adalah isteri para pejabat Pemerintah Daerah. Karena itu, sebagaimana dalam organisasi pemerintah, mereka yang menduduki jabatan pengurus dalam Dharma Wanita Persatuan tidak hanya bisa mempengaruhi para anggota bawahannya, tetapi juga sangat mungkin mempengaruhi para pejabat pemerintah bawahan.

Gejala adanya pengaruh diagonal, dari isteri pejabat terhadap pejabat pemerintah daerah, misalnya, sangat tampak dalam hubungan antara isteri Walikota Singapraja terhadap Kepala Dinas Pendidikan. Walaupun secara formal tidak ada hubungan struktural antara isteri Walikota Singapraja dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Singapraja, dalam praktik sehari-hari tampak kalau isteri Walikota Singapraja bisa mengendalikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Singapraja. Demikian juga, meskipun tidak ada hubungan formal antara isteri Walikota Singapraja dengan Camat dan Lurah di Kota Singapraja, dalam praktiknya baik Camat dan Lurah cenderung menempatkan isteri Walikota Singapraja sebagai atasan langsungnya.

Peran Wara Srikandi, bahkan sejak memperjuangkan kemenangan Bagus Permadi yang kedua (2008), saat mendekati masa pemilihan kepala daerah, dia selalu tampil aktif tak hanya di pertemuan-pertemuan Dharma Wanita, melainkan juga di berbagai program Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Singapraja. Kehadiran Wara Srikandi yang senantiasa ikut memberikan sambutan, selalu berisi pesan agar seluruh peserta memberikan dukungan Bagus Permadi.

Rasa sungkan penyelenggara pendidikan dan pelatihan bila tidak memberikan kesempatan kepada Wara Srikandi untuk memberikan sambutan, ternyata benar-benar dimanfaatkan oleh isteri Walikota Singapraja. Seorang Wakil Ketua Dharma Wanita unit sekolah menengah di Kecamatan Kedungkandang, mengemukakan sebagai berikut:

Ya mesti ada, pada saat pemilihan ya diselipkan, supaya nanti dukungannya ke sana, ya ada. Jangankan kok itu, di diklat-diklat saja kan selalu didatangi oleh Pak Bagus Permadi didampingi Bu Bagus Permadi. Tetapi seringkali yang aktif biasanya Bu Bagus Permadi. Biasanya kan memang diberi kesempatan untuk memberikan sambutan. Jadi sedikit banyak ya pasti ada kampanyenya (Sumber Data pada lampiran 6: 5.17).

Melihat struktur dan sifatnya, kelembagaan Dharma Wanita memang memiliki perbedaan dengan organisasi TP PKK, karena organisasi Dharma Wanita ini berada di masing-masing unit kerja yang anggotanya adalah isteri Pegawai Negeri, Perangkat, dan atau Pegawai Negeri perempuan. Fakta penting yang harus dipertimbangkan dalam menelaah dimensi politik Dharma Wanita adalah bahwa organisasi ini bisa memberikan keuntungan timbal-balik antara pimpinan dan anggotanya, karena seorang isteri staf maupun staf yang memiliki kedekatan hubungan dengan isteri pejabat, yang tidak lain adalah pimpinan Dharma Wanita, cenderung lebih cepat meningkat karir dan jabatannya dibanding mereka yang sama sekali tidak aktif atau tidak dekat dengan pimpinan Dharma Wanita.

Ya logis sajalah. Para suami kan mendengarkan isterinya. Ketika Bu Bagus Permadi memuji loyalitas seorang isteri bawahan suaminya sangat baik, maka pasti akan didengarkan oleh Pak Wali. Jadi bila memang ada peluang jabatan struktural yang kosong, pasti dipilih yang isterinya bisa saling bekerjasama melalui Dharma Wanita. Tapi yang lebih cepat itu adalah para pegawai yang

secara langsung membantu Bu Bagus Permadi, menjadi semacam ajudan Bu Wali. Tidak hanya perempuan lho? Kan siapa pun di sini tahu, siapa yang membantu Bu Bagus Permadi di GNOTA. Nah, cepat sekali kan menjadi Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Singapraja? (Sumber Data pada lampiran 6: 5.18).

Sifat dasar hubungan yang timbal-balik dalam Dharma Wanita tersebut jelas tidak ditemukan pada PKK. Sedekat apa pun seorang kader PKK tidak akan bisa membantu suaminya memperbaiki karir dan pekerjaannya karena para suami anggota PKK tidak memiliki hubungan kedinasan dengan Kepala Dinas ataupun Walikota Singapraja. Karena itu, beberapa pengurus dan anggota Dharma Wanita bisa saja dengan sukarela ikut mengkampanyekan Bagus Permadi ketika itu, maupun mengkampanyekan Wara Srikandi saat menjelang Pemilukada. Kegiatan demikian senantiasa bersifat positif bila berhasil, dan tidak berpengaruh apa-apa ketika gagal, karena yang melakukan bukan staf pegawai negeri, melainkan hanya isteri pegawai negeri.

#### ***d. Pemanfaatan Organisasi BAZIS***

Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) merupakan sebuah lembaga yang dibentuk untuk mengelola zakat, infaq dan shadaqah masyarakat. Dasar pembentukan lembaga ini adalah Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini hanya mengakui dua lembaga yang berwenang mengelola zakat, yaitu: Badan Amil Zakat yang dibentuk dan dikelola oleh Pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk secara otonomi dan dikelola oleh organisasi sosial keagamaan.



Zakat merupakan salah satu kewajiban umat Islam yang mampu secara ekonomi, sedangkan infaq dan shadaqah merupakan bentuk sumbangan bagi kepentingan umum tetapi tidak merupakan kewajiban. Sejak dulu, pemerintah memiliki perhatian pada ketiga bentuk sumber pemerataan dana untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat dan kemanfaatan umum. Untuk itu, agar potensi ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, negara dipandang perlu mengaturnya dalam bentuk perundang-undangan tanpa harus mengambil alih kewenangan masyarakat untuk juga mengelolanya secara bertanggungjawab.

Berkaitan dengan keberadaan Basiz, setiap pemerintah daerah juga memiliki program berkaitan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS), yang sasaran utamanya adalah para pejabat dan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai yang berkewajiban (*muzzaki*), dan masyarakat fakir dan miskin sebagai yang berhak menerima (*mustahiq*). Berkenaan dengan zakat, asumsi yang senantiasa dipegang oleh kebanyakan kepala daerah dan pejabat daerah adalah bahwa secara umum para pejabat dan pegawai negeri sipil niscaya tergolong sebagai umat Islam yang sudah tergolong wajib mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah. Asumsi demikian yang selanjutnya muncul dalam bentuk kebijakan kepala daerah, melalui Basiz, untuk menariknya dan menyalurkannya kepada yang berhak. Prinsip dasar zakat sendiri, memang bukan muzzaki yang secara sukarela membayar, melainkan panitia (*amil*) yang harus menariknya dari yang berkewajiban.

Persoalan memang muncul saat sebuah kebijakan tentang zakat, infaq dan shadaqah ditetapkan dan diberlakukan untuk semua pejabat dan pegawai negeri sipil

di daerah. Pertama, sangat jelas bahwa tidak semua pegawai negeri sipil beragama Islam, sehingga tidak memiliki kewajiban untuk membayar zakat, apalagi infaq dan shadaqah. Kedua, masih ada sejumlah umat Islam yang menganggap bahwa zakat memiliki kedudukan hukum yang sama dengan infaq dan shadaqah. Dalam zakat, panitia boleh aktif menarik, sedangkan dalam infaq dan shadaqah justru masyarakat yang mampu yang harus aktif.

Tampak masih banyak yang kurang memahami bahwa membayar itu wajib, tetap perkara melalui siapa dan diberikan kepada siapa, memang tidak harus melalui Bazis yang dikelola oleh Pemerintah Kota Singapraja. Berikut ini adalah petikan wawancara yang menggambarkan persepsi sebagian pegawai negeri yang masih berpandangan bahwa zakat merupakan sumbangan sukarela.

Dua teman saya yang sudah senior dipanggil kepala sekolah, ditanya, kenapa *sih* pak kok *ndak* mau? Jawabnya, lha saya ya *ndak* mau, *wong* nyumbang itu kan sifatnya sukarela, apalagi ini diwajibkan setiap bulan, arahnya *ndak* jelas. Kata kepala sekolah: "Kalau bapak *ndak* mau, saya bayari saja". Jawab kedua teman saya: "ya silahkan, yang pasti saya tidak mau". Karena itu tadi, kepala sekolah takut dianggap tidak mampu mengkondisikan program Pemerintah Kota Singapraja, ya harus dipaksa, pokoknya semua harus mau (Sumber Data pada lampiran 6: 5.19).

Persoalan dasar dalam zakat adalah mengeluarkan dengan memberikan kepada yang berhak, yang bila dikelola sendiri berarti *muzzaki* mengetahui dengan persis bahwa yang menerima adalah yang benar-benar berhak menerima. Namun demikian, bila dikelola oleh Bazis, maka sangat mungkin dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan popularitas seseorang, termasuk mereka yang memiliki agenda politik, baik dalam pemilihan kepala daerah maupun anggota legislatif.

Bazis juga menempatkan walikota sebagai pembina organisasi, sehingga wajar jika dalam struktur Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (Bazis), selaku walikota Bagus Permadi juga menjadi salah satu pembinanya. Sementara itu, dalam kapasitas sebagai Ketua GNOTA, Wara Srikandi bisa ikut mempengaruhi dan terlibat langsung dalam pendistribusian dana dari Bazis.

Terkait penggunaan kewenangan walikota untuk mengatur penarikan dan pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah, tampak dari Surat Edaran Walikota Singapraja tentang Pemotongan Gaji untuk Zakat, Infaq dan Shodaqoh nomor 470/322/35.73.123/2011 tertanggal 31 Maret 2011. Surat edaran walikota ini dikirim ke semua SKPD Kota Singapraja. Dalam surat edaran ini, disebutkan tentang adanya penarikan dana zakat, infaq dan shadaqah dengan sistem pemotongan gaji kepada seluruh pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil, tanpa terkecuali, sebesar 2,5 persen setiap bulan (Sumber Data pada lampiran 6: 5.20). Surat edaran ini dinilai telah menimbulkan kerawanan penyimpangan, baik berkenaan dengan penggunaan anggaran maupun ketepatan hukum karena tidak semua Pegawai Negeri Sipil beragama Islam. Baik berdasarkan hukum syari'ah Islam maupun Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, surat edaran tersebut dinilai telah menyimpang.

Pada kesempatan yang sama, Sutiadji yang pada waktu itu berkapasitas sebagai anggota komisi D, DPRD Kota Singapraja mengatakan bahwa komisi D akan



segera melakukan pemanggilan kepada SKPD terkait untuk mengetahui kronologi dan implementasi surat edaran tersebut.

Kami ingin tahu seperti apa keinginan pemkot. Menurut saya, dalam struktur lembaga ZIS ini harus dikelola oleh orang yang paham hukum dan profesional. Pemkot tidak boleh terlibat di dalamnya (Sumber Data pada lampiran 6: 5.21).

Reaksi penolakan terhadap penerbitan dan pemberlakuan isi surat edaran tersebut juga dilakukan oleh Ketua PC NU Kota Singapraja, KH. Marzuki Mustamar, yang sehari-hari menjadi pengasuh Pondok Pesantren Sabilurosyad Gasek Karangbesuki, Kota Singapraja. Menurutnya, dalam syari'ah agama terdapat syarat dan ketentuan yang harus diikuti untuk mengeluarkan zakat, amal dan shadaqah. Ada ketentuan yang biasa disebut dengan perhitungan nisab atau batas terkena zakat, yang nilainya ketika itu sekitar Rp. 30.000.000. Selain itu, zakat tidak dikeluarkan setiap bulan, melainkan setahun sekali. Berikut adalah pernyataan KH. Marzuki Mustamar yang dimuat harian Singapraja Post:

Kalau diwajibkan, itu tidak sesuai dengan syariat agama. Zakat itu ada syarat dan ketentuannya. Ada batasan nisab dalam zakat, yang tidak boleh dilewatkan dalam berzakat adalah niat. Seseorang yang akan mengeluarkan zakat harus berniat terlebih dahulu. Kalau langsung dipotong dari gaji, bagaimana bisa mau berniat? Bagaimana kalau dia punya keponakan, tetangga-tetangga yang miskin di lingkungannya yang biasanya dia berikan sedekah atau zakatnya. Padahal mereka juga berhak untuk menerima zakat dan sedekah, seharusnya Pemerintah Kota Singapraja mendata secara terang-terangan pejabat yang memiliki penghasilan atau harta mencapai Rp 30 juta, sesuai dengan nisabnya (Sumber Data pada lampiran 6: 5.22).

Achmad Subakir, seorang Pengawas Pendidikan Kota Singapraja, mengemukakan bahwa program ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah) merupakan program yang cukup efektif digunakan meningkatkan popularitas dan pengaruh seseorang yang memiliki ambisi politik. Jadi, mekanismenya menggunakan kewenangan untuk menarik zakat, infaq dan shadaqah dengan sistem potong gaji pejabat daerah atau pegawai negeri sipil secara langsung, dan selanjutnya menumpang sosialisasi diri saat mendistribusikan zakat, infaq dan shadaqah, baik dalam bentuk langsung kepada yang menerima maupun dengan mempublikasikannya. Lebih dari itu, politisasi juga bisa dilakukan dalam menetapkan khalayak sasaran yang mendapatkan dana zakat, infaq dan shadaqah, sebagaimana dilakukan oleh Bagus Permadi dan Wara Srikandi.

Selain GNOTA ada satu lagi yang dipergunakan Bagus Permadi untuk kepentingan agenda politiknya, ZIS, atau Zakat, Infaq dan Shadaqah. Itu dulu kalau di guru, barengan sama pembagian sertifikasi bagi guru, yang kemudian dipayungi dengan itu, apakah tidak sebaiknya mengisikan untuk itu, dan akhirnya adanya gejolak itu karena ada keharusan itu, tapi ya masih jalan terus potongan itu sampai sekarang. Itu memang badan formal, hanya mobilisasi dananya yang mungkin beda dengan tempat lain. Dana itu bebas dikelola, dana itu tidak untuk dikorupsi, tapi bisa untuk ditumpangi politik, sangat bisa. Hanya ketika membantu itu kan tidak jelas, tidak disebutkan dana itu dari siapa, itu kan beda. Permasalahannya kan teman-teman PNS tidak bisa menolak ketika hal itu dikehendaki oleh atasan (Sumber Data pada lampiran 6: 5.23)

Politisasi Basis oleh kepala daerah dan bakal calon kepala daerah juga sempat menjadi wacana publik di Kota Singapraja. Sekitar dua tahun menjelang pergantian Walikota Singapraja, tepatnya 14 Juli 2011, menurut Didit Soleh, Koordinator Badan Pekerja Singapraja Corruption Watch (SCW) telah mengidentifikasi adanya

penyelewengan dana yang terkumpul dalam BAZIS, karena tidak adanya sistem kontrol yang jelas dalam pengelolaan dana tersebut. Menurut perhitungan SCW, dana yang terkumpul dari ZIS mencapai Rp. 910.000.000 per bulan, atau Rp. 19.920.000.000 per tahun. Dasar perhitungannya adalah data sekitar 13.000 pegawai Pemerintah Kota Singapraja. Mereka ini setiap bulan secara langsung membayar zakat 2,5%, yang dipotong dari gaji masing-masing.

Berikut adalah kutipan pernyataan Didit Soleh, dalam sebuah pemberitaan di Media Center tanggal 15 Juli 2011:

Dewan harus memaksimalkan fungsi pengawasannya dengan meminta transparansi kepada Pemkot, siapa yang mengelola ZIS itu. Kami khawatir dana yang terkumpul itu digunakan untuk kepentingan tertentu. Yang patut diawasi oleh legislatif adalah bagaimana pengelolaan dananya, mekanisme pendistribusiannya sehingga tepat sasaran dan ada transparansi dana yang terkumpul. “Apalagi Kota Singapraja dua tahun ke depan akan melangsungkan pemilihan kepala daerah. Kami juga khawatir digunakan untuk kepentingan tertentu, dan masyarakat tidak tahu kalau itu dana dari ZIS pegawai.” (Sumber Data pada lampiran 6: 5.24).

Tidak hanya menyampaikan keberatan melalui pemberitaan, SCW juga melakukan aksi protes terkait ZIS pada tanggal 14 Juli 2011. Protes SCW dilakukan bersama Aliansi Masyarakat Miskin Singapraja (AMMS), Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), serta Kelompok Mahasiswa Peduli Publik. Aksi yang digelar pada tanggal 23 Juli 2011 tersebut terjadi karena belum ada reaksi yang nyata dari Pemerintah Kota Singapraja atas keberatan yang telah disampaikan sebelumnya. Dengan memanfaatkan momentum menjelang bulan



Ramadhan, mereka berharap para pejabat di Kota Singapraja melakukan instropeksi diri.

Ada sejumlah tuntutan yang diajukan dalam protes tersebut, yakni: pencabutan Surat Edaran Walikota terkait Zakat Infaq dan Sadaqah (ZIS) bagi para PNS; segera mengusut tuntas kasus P2SEM; segera menginventarisasi dan melindungi semua asset di Kota Singapraja; segera merivisi Perda No. 3 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Singapraja; segera memberi informasi SK penjabaran APBD pada rakyat; adanya payung hukum untuk perlindungan pasar tradisional; Kejaksaan diminta segera melakukan penelitian terhadap pemerintah Kota Selopuro terkait laporan keuangan yang *disclaimer* selama tiga tahun berturut-turut (Periksa Lampiran 1, Gambar 5.6).

Penolakan yang berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat maupun ketua PC NU Kota Singapraja tersebut ternyata tidak mempengaruhi Bagus Permadi untuk terus melaksanakan niatnya dalam memberlakukan keputusannya untuk mewajibkan seluruh PNS menyumbangkan sebagian gajinya ke Badan Zakat, Infaq dan Shadaqah. Untuk itu, Bagus Permadi melalui Pemerintah Kota Singapraja melakukan merevitalisasi BAZIS, agar menjadi sebuah organisasi yang lebih kredibel, yang dilaksanakan tanggal 4 Agustus 2011, di ruang Tumapel Balaikota Singapraja.

Dalam kegiatan revitalisasi tersebut juga diselenggarakan kegiatan pemilihan pengurus Bazis. Terpilih sebagai pengurus baru adalah M. Baidlowi Muslich yang

juga Ketua MUI Kota Singapraja sebagai Ketua Bazis Kota Malana, Wakil Ketua M. Mas'ud Said, Sekretaris Kasuwi Saiban, Wakil Sekretaris Sudjoko Santosa, sedangkan Bendahara diisi Sri Wahyuningtyas yang ketika itu adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Singapraja, dan Farida. Untuk meredam keberatan berdasarkan pertimbangan agama para pegawai negeri sipil, maka dalam revitalisasi tersebut juga dilibatkan perwakilan agama-agama yang diakui oleh pemerintah, yaitu: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu.

Segera setelah revitalisasi Bazis, selaku Sekda Kota Singapraja, Joyodroto menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Singapraja tidak memaksa PNS untuk membayarkan melalui Badan Amil Zakat yang dikelola Pemerintah Kota Singapraja. Selain menyampaikan bahwa tidak ada paksaan dari Pemerintah Kota Singapraja, Joyodroto juga menyampaikan bahwa zakat pendapatan tiap PNS mempunyai besaran yang berbeda antar pegawai, karena disesuaikan dengan pangkat dan golongan ruang gaji masing-masing, sebagaimana disampaikan Guru SMK Negeri 10 Singapraja bahwa "Setiap PNS yang golongan III itu 75 ribu, golongan IV itu 80 ribu" (Sumber Data pada lampiran 6: 5.26).

Anggaran cukup besar dan berpotensi untuk digunakan sesuai kepentingan tertentu tersebut menurut keterangan beberapa orang dipergunakan untuk membantu pembangunan mushola, masjid, dan sarana-sarana peribadatan lainnya di samping juga untuk kegiatan-kegiatan sosial keagamaan. Polemik yang munculnya seputar status wajib atau sukarela pembayaran zakat, infaq dan shadaqah ini sangat terasa di instansi-instansi pendidikan sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Achmad

Subakir, seorang pengawas sekolah menengah Kota Singapraja. Pokok masalah yang sama juga disampaikan oleh seorang guru dari SMK Negeri 10 Kota Singapraja. Beberapa guru sekolah tersebut sempat dipanggil Kepala Sekolah karena merasa keberatan membayar zakat dengan cara potong gaji.

Salah satu kewajiban pegawai negeri sipil adalah membantu kesuksesan program yang ditetapkan pemerintah. Meskipun merupakan kewajiban, tidak serta-merta zakat dapat dilaksanakan dengan lancar, khususnya ketika khalayak yang diwajibkan tidak memperoleh penjelasan untuk tentang program tersebut. Sebagaimana terjadi pada program kewajiban Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) yang pengelolaannya belum cukup jelas tersampaikan kepada *muzzaki*. Lebih sulit lagi, bila ada kecurigaan atau ketidakpercayaan kepada pihak pengelolanya.

Karena ini programnya Kota Singapraja, memang diminta semuanya berpartisipasi aktif dan mendukung kegiatan ini, peruntukannya, itu katanya si, peruntukannya ya untuk kepentingan sosial, ibadah terus kalau untuk *mbangun* mushola itu biasanya, katanya si seperti itu, tapi ya *ndak* tau apakah benar.

Kebetulan saya dekat dengan kepala sekolah saya yang waktu itu perempuan juga. jadi saya punya kesempatan tanya ke kepala sekolah, bu uangnya ini untuk apa, lho *yo* untuk itu, kepentingan nanti pembangunan masjid, mushola di sekolah-sekolah itu, terus untuk membantu anak-anak yang tidak mampu. Terus bu, itu ada laporannya, katanya, ya ada tapi *yo emboh* (Sumber Data pada lampiran 6: 5.27).

Begitu kuat pengaruh surat edaran tersebut kepada Kepala Sekolah, sehingga ketika ada guru yang keberatan dipotong gaji untuk zakat, maka Kepala Sekolah tetap membayarkannya secara kolektif sesuai jumlah guru dan karyawan sekolah. Alasan



yang terucap dari Kepala Sekolah adalah untuk memenuhi kewajiban sekaligus menjaga citra baik sekolah di hadapan Pemerintah Kota Singapraja.

Ketika awal itu ya, kan semuanya diminta untuk mendukung itu. Tapi teman saya ada dua, dari sekolah itu ada dua yang tidak mau, karena mesti ini *ndak* jelas arahnya. Waktu itu banyak yang protes dari masing-masing sekolah, bahkan ada sekolah yang sama sekali *ndak* mau *mbayar*. Akhirnya kepala sekolahnya dipindah, karena dianggap tidak bisa mengkondisikan hal yang semestinya dilakukan warga PNS yang ada disitu, ini kan untuk program kota Singapraja, diantaranya pindahnya karena itu. Terus yang tidak mau-tidak mau itu dikumpulkan di satu sekolah, itu kalau tidak salah di SMK 5, supaya semuanya mendukung ini dan lain sebagainya, terus ditanya apa alasannya kok *nggak* mau mendukung. Teman-teman yang kesana cerita begini: *yoo, gak katene* aku, *mbayar iku, wong gak* jelas arahnya, kalau *nyumbang* jelas arahnya berapapun sih mau, kalau ini *wong* biasanya karena *wong* dipikirkannya teman-teman yang tidak mau itu, banyak curangnya dari pada iya nya. Hal itu terjadi sejak tahun 2011 (Sumber Data pada lampiran 6: 5.28).

Dari kutipan tersebut tampak bahwa meskipun secara terucap kepala sekolah bertindak membayari sendiri sejumlah pegawai negeri bawahannya yang membangkang terhadap instruksi sebagaimana tertuang dalam surat edaran walikota semata-mata untuk mensukseskan program pemrintan, ternyata menurut sejumlah guru, alasan sebenarnya adalah ketakutan apabila dirinya dipindahkan atau malah diberhentikan sebagai kepala sekolah karena gagal mensukseskan program pemerintah.

#### ***e. Pemanfaatan Organisasi BSS***

Selain memanfaatkan PKK, Wara Srikandi juga dilibatkan sebagai Pembina Bank Sampah Singapraja (BSS). Berdasarkan penelusuran terhadap struktur dasar organisasi BSS, posisi Pembina BSS sebenarnya ditetapkan untuk pemerintah kota atau kabupaten. Namun demikian, dalam pelaksanaan di Kota Singapraja, posisi

pembina dipegang oleh Wara Srikandi. Dengan posisi sebagai Pembina BSS, tentu saja Wara Srikandi juga bisa menggunakan organisasi ini untuk meningkatkan popularitasnya sebagai calon Walikota Singapraja.

Bank Sampah Kota Singapraja (BSS) merupakan sebuah lembaga berbadan hukum koperasi yang mempunyai hubungan kemitraan dengan Pemerintah Kota Singapraja dan CSR PT. PLN Distribusi Jawa Timur. Koperasi ini bertujuan sebagai wadah untuk membina, melatih, mendampingi sekaligus membeli dan memasarkan hasil kegiatan pengelolaan sampah dari masyarakat kota Singapraja dalam rangka pengurangan sampah di TPS/TPA sekaligus juga merupakan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan sampah (Periksa Lampiran 1, Gambar 5.7).

Program Bank Sampah Singapraja sebenarnya merupakan pelaksanaan dari Program Bank Sampah Masyarakat yang dilaksanakan secara nasional. Program ini memiliki potensi untuk diadopsi oleh semua daerah di Indonesia, karena memang faktanya seluruh daerah di Indonesia dihadapkan pada timbunan sampah yang kurang terurus. Gagasan dasar program ini adalah mengurangi potensi pencemaran sampah dengan melakukan penanganan berdasarkan prinsip 3R (*reduce, reuse and recycle*). Tentu saja, sebelum dilakukan penanganan berdasarkan ketiga prinsip tersebut, terlebih dulu sampah dipilah berdasarkan jenis sampahnya.

Koperasi Bank Sampah Singapraja (BSS) dibentuk untuk masyarakat dengan fasilitasi Pemerintah Kota Singapraja pada tanggal 26 Juli 2011, yang dituangkan dalam akte Notaris tertanggal 12 Agustus 2011, dan mendapatkan pengesahan dari Walikota Singapraja tanggal 16 Agustus 2011 (Sumber data 5.29). Kantor pusat BSS di Kota Singapraja terletak di Jalan S. Supriyadi No. 38 Singapraja.

Untuk mensukseskan program ini, Pemerintah Kota Singapraja sempat mengundang Menteri Lingkungan Hidup (Balthasar Kambuaya), Senin 14 November 2011, untuk meresmikan program BSS tersebut. Menurut Balthasar Kambuaya, pengelolaan BSS menyentuh tiga aspek sekaligus, yaitu: aspek lingkungan (kebersihan), aspek sosial (kepedulian), dan aspek ekonomi (pendapatan tambahan). Karena itu, BSS dapat disebut sebagai program yang cukup inovatif, setidaknya dari segi upaya dalam membiasakan warga kota untuk menjaga lingkungannya dari timbuan sampah yang bila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan banjir, kumuh, penyakit menular, dan sebagainya.

Dalam kapasitas sebagai pembina BSS Kota Singapraja, Wara Srikandi sempat mewakili Kota Singapraja berangkat ke Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah (2012), untuk berbagi pengalaman tentang pengelolaan sampah melalui BSS. Wara Srikandi pun berkesempatan menyampaikan materi tentang manajemen pengelolaan bank sampah, khususnya cara memilah sampah keluarga menjadi sampah-sampah yang bisa dimasukkan sebagai tabungan pada rekening bank. Paparan ini dilakukan di hadapan Bupati Banggai, para pejabat dan staf pemerintah kabupaten, serta para kader lingkungan hidup setempat (Sumber Data pada lampiran 6: 5.30).

Tampak dalam gambar (Periksa Lampiran 1, Gambar 5.8), secara jelas disebutkan bahwa komposisi Pembina BSS terdiri dari dua unsur, yaitu: Pemerintah Kota Singapraja dan CSR PT PLN (Persero). Tidak ada baik nama perseorangan Wara Srikandi, maupun organisasi di luar Pemerintah Kota Singapraja, yang dalam



hal ini adalah TP PKK Kota Singapraja. Namun demikian, dalam praktiknya, posisi Pembina BSS dipegang oleh Wara Srikandi, yang bertindak sebagai Ketua TP PKK.

Bila dibandingkan dengan yang terjadi pada organisasi yang lain, pemanfaatan BSS untuk peningkatan popularitas Wara Srikandi tidak semasif dan seefektif yang terjadi di NGOGO lain, seperti PKK, Dharma Wanita, GNOTA, dan Bazis. Selain keanggotaan yang terbatas atau berjumlah kecil, program ini diselenggarakan melalui koperasi yang dikelola sendiri oleh para pengurus dan warga masyarakat yang menjadi anggotanya. Manfaat yang diperoleh oleh Wara Srikandi hanya sebatas publikasi akan posisi dan perannya yang juga tidak terlalu dikenal oleh masyarakat luas. Hingga penelitian ini selesai mengumpulkan data lapangan misalnya, tidak banyak warga masyarakat yang mengerti akan keberadaan, peran dan kegiatan BSS di Kota Singapraja.

#### 5. Pendelegasian Kewenangan dalam Acara Seremonial

Dukungan dan keperbihakan Bagus Permadi untuk Wara Srikandi juga dilakukan dengan senantiasa memberikan kesempatan kepada Wara Srikandi untuk mewakili dirinya selaku Walikota Singapraja, guna meresmikan, menyambut, dan bertindak sebagai wakil Pemerintah Kota Singapraja dalam berbagai acara seremonial, baik di lingkungan Pemerintah Kota Singapraja, dan lebih-lebih dalam berbagai acara yang melibatkan masyarakat luas.

Beberapa contohnya adalah saat Wara Srikandi tampil pada penyerahan bantuan siswa tidak mampu pada peringatan Hari Pendidikan Nasional 2010; acara

Flexi M-Teens School Competition 2010; acara penyerahan hadiah pemenang Festival 1000 Ken Dedes Kota Singapraja 2011; acara Pekan Panutan Pajak 2012 (cikal bakal penandatanganan kerjasama Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Singapraja dengan TP PKK Kota Singapraja); penyerahan *mercandise* acara Pesta Singapraja Sejuta Buku 2012; menghadiri acara peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2013 serta perayaan Gong Xi Fat Choi 2013. Masih banyak lagi acara yang tampaknya juga dengan sengaja dirancang sebagai momentum peningkatan popularitas dan pencarian dukungan politik bagi Wara Srikandi.

Hampir dua tahunan ini, setiap permohonan untuk meresmikan apa saja selalu dikabulkan oleh Walikota Singapraja. Bedanya, kalau dulu sekitar 80% dihadiri sendiri oleh Pak Wali, sisanya oleh Pak Wawali atau kadang Sekda. Sekarang, hampir 100% dihadiri oleh Bu Bagus Permadi. Kadang memang sudah diberitahu kalau yang akan mewakili Pak Wali adalah Bu Bagus Permadi, tetapi kadang juga tidak. Jadi persiapannya seperti menyambut Pak Wali, tetapi sebenarnya yang tampil adalah Bu Bagus Permadi (Sumber Data pada lampiran 6: 5.33)

Pada tanggal 3 Mei 2010 berbagai penghargaan di bidang pendidikan diberikan oleh Bagus Permadi saat upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di depan Balaikota Singapraja. Sebanyak 21 orang mendapat penghargaan, di antaranya penghargaan untuk Syaikhu Ahmad Yani, S. Pd., guru SDI Sabilillah Singapraja, dengan prestasi yang diraih sebagai juara 1 dalam *Quality Improvement of Teachers and Education Personnel in Mathematics* (QITEP Matematika). Sebanyak 20 puluh penghargaan lainnya diberikan kepada para pelajar, dengan berbagai macam kejuaraan baik di bidang ilmu pengetahuan maupun olahraga.

Rabid Yahya Putradasa, siswa SMPN 1 memperoleh penghargaan atas prestasinya sebagai Juara 2 *International Junior Science Olimpiade*; Nauval El Faiz siswa SMPN 3, sebagai anggota tim internasional *The 7 the Internationaol Junior Science Olimpiade*. Dalam kesempatan tersebut, Bagus Permadi juga menyerahkan bantuan Gerakan Orang Tua Asuh (G-OTA) Kota Singapraja kepada 250 siswa kurang mampu dari jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA, dengan untuk siswa SD Rp. 125.000 per siswa; siswa SMP sebesar Rp. 150.000 per siswa, dan SMA/SMK sebesar Rp. 175.000 per siswa. Dalam menyerahkan bantuan uang tersebut, Bagus Permadi didampingi oleh ketua G-OTA Kota Singapraja, Wara Srikandi (Sumber Data pada lampiran 6: 5.34).

Dalam acara *Flexi M-Teens School Competition 2010*, Minggu 27 Juni 2010, di kawasan Singapraja Town Square Wara Srikandi juga memerikan sambutan setelah pimpinan redaksi Singapraja Post, Indra Herdinata (Periksa Lampiran 1, Gambar 5.9). Dalam kesempatan tersebut, Wara Srikandi menyampaikan dukungannya terhadap acara positif semacam itu.

Saya sangat mendukung seluruh acara-acara yang positif bagi anak-anak remaja karena ini merupakan bentuk penyaluran yang positif, karena kalau saya lihat akhir-akhir ini kenakalan-kenakalan itu sudah melampaui batas bahkan sudah tak bisa di banyangkan (Sumber Data pada lampiran 6: 5.34).

Tanggal 10 November 2011 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Singapraja menggelar Festival 1000 Ken Dedes. Festival Ken Dedes ini dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Singapraja dengan harapan dapat



meningkatkan kepedulian dan penghargaan dari generasi muda sejarah disamping juga sebagai upaya untuk meningkatkan kunjungan wisata Kota Singapraja. Berikut adalah foto yang dapat digunakan untuk menggambarkan penyelenggaraan acara tersebut (Periksa Lampiran 1, Gambar 5.10).

Kegiatan yang melibatkan Ken Arok Organizer dan KNPI Kota Singapraja ini juga memberikan kesempatan kepada Wara Srikandi untuk menyerahkan hadiah kepada pemenang Festival 1000 Ken Dedes, yang berlangsung di halaman Kantor Walikota Singapraja bertepatan dengan gelar upacara Hari Pahlawan 10 November 2011 (Periksa Lampiran 1, Gambar 5.11). Festival ini memenangkan Karang Taruna Bandulan sebagai Juara I; juara SMKN 3 Kota Singapraja sebagai Juara II, dan Juara III Karang Taruna Kecamatan Lowokwaru. Untuk kategori anak-anak dimenangkan oleh SMPN 9 Kota Singapraja sebagai Juara I; SMPN 3 Kota Singapraja sebagai Juara II; dan SDN Sukun 1 sebagai Juara III. Di luar kedua kategori tersebut, masih ada kategori lainnya, yakni kategori *Singapraja Keprabon* diraih oleh Ettyk Salon, dan peserta Paling Atraktif dimenangkan oleh Ikatan Waria Singapraja (IWAS).

Selain beberapa contoh tersebut, ada satu kegiatan lagi yang juga digunakan Bagus Permadi untuk mendekatkan Wara Srikandi dengan masyarakat penggemar olahraga. Sebagaimana dipahami bahwa sepak bola merupakan salah satu cabang olah raga yang mendapat tempat khusus, karenanya pada tanggal 30 November 2012, pengurus cabang PSSI Kota Singapraja mengadakan turnamen futsal wanita untuk tingkat pelajar dan mahasiswa sekota Singapraja di futsal Premier jalan Sukarno Hatta. Dalam kesempatan itu, Wara Srikandi kembali mendapat kesempatan untuk

membuka turnamen tersebut dengan ditandai oleh sebuah tendangan bola. Dalam kesempatan tersebut, Wara Srikandi didaulat sebagai Ketua Persatuan Tinju Nasional (Pertina) Kota Singapraja (Sumber Data pada lampiran 6: 5.38).

Secara kedinasan sebenarnya cukup jelas, bahwa Wara Srikandi bukan seorang pejabat politik atau pejabat pemerintah, melainkan semata-mata sebagai isteri Bagus Permadi. Namun demikian, karena jabatan politik suaminya, Wara Srikandi seolah-olah menjadi bagian sangat penting dari kegiatan pejabat Pemerintah Kota Singapraja, sehingga melebihi, misalnya, Sekretaris Kota Singapraja, dan para Kepala SKPD dan UPTD di lingkungan Kota Singapraja. Ini tampak dari berbagai acara seremonial yang semasa menjelang Pilkada Kota Singapraja 2013, Wara Srikandi banyak sekali terberitakan (*being exposed*), baik dalam kapasitas mewakili Walikota Singapraja maupun sebagai Ketua TP PKK atau organisasi kemasyarakatan lain untuk mendapat kehormatan dalam berbagai acara seremonial yang diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun organisasi dan lembaga masyarakat.

Akhir tahun 2012, misalnya, sedikitnya ada tiga acara yang berhubungan dengan penjualan buku murah, yaitu: *Singapraja Book Fair 2012* (4 s.d. 10 oktober 2012) di Aula SKODAM V Brawijaya, Pesta Singapraja Sejuta Buku 2012 (10 s.d. 16 Oktober 2012) di Kartini Imperial Building Kota Singapraja, dan Pameran Buku Murah Gramedia (agenda rutin setiap bulan) di Perpustakaan Umum Kota Singapraja.

Dalam berbagai kesempatan acara seremonial terkait buku tersebut, Wara Srikandi yang dikenal dekat dengan Johan Budhie Sava, seorang pengusaha buku pemilik Penerbit dan Toko Buku Toga Mas, senantiasa diberi kesempatan untuk

tampil di panggung pembukaan ataupun penutupan, terutama saat Wara Srikandi sedang giat mensosialisasikan keinginannya mencalonkan diri sebagai Walikota Singapraja (Periksa Lampiran 1, Gambar 5.12).

Tampak pada gambar tersebut (Gambar 5.12), ketika acara Pesta Singapraja Sejuta Buku 2012 di Gedung Kartini Imperial Ballroom, Wara Srikandi juga tampil di panggung kehormatan untuk menerima *marchandise* dari panitia penyelenggara yang menamakan dirinya sebagai *Walikan Singapraja*, sesuai kebiasaan berbahasa arek Singapraja yang suka membalik-balik kata seperti lumayan menjadi *nayamul*. Berkenaan dengan kedekatan hubungan antara Wara Srikandi dengan Johan Budhie Sava, pada tahapan kampanye Calon Walikota dan Wakil Walikota Singapraja, yang bersangkutan ditetapkan sebagai Ketua Relawan Pemenangan Pasangan Dadi (Wara Srikandi dan Wibisono).

#### 6. Mutasi Pejabat Dinas, Badan dan Instansi Daerah

Meskipun senantiasa dikemukakan di dalam berbagai pemberitaan media, bahwa mutasi dan promosi merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Walikota Bagus Permadi terhadap pejabat daerah, namun secara politik kegiatan tersebut sulit untuk dipisah hubungannya dengan kegiatan Pilkada yang melibatkan isterinya sebagai salah satu calon. Tampak ada persiapan khusus yang dilakukan oleh Bagus Permadi untuk menjamin dan meningkatkan elektabilitas isterinya dengan memanfaatkan birokrasi daerah sebagai "mesin politiknya".



Mengawali tahun baru 2013, tepatnya pada tanggal 2 Januari 2013, Pemerintah Kota Singapraja melakukan mutasi besar-besaran terhadap pejabat Eselon di lingkungan Pemerintah Kota Singapraja, mulai dari jabatan Eselon II sampai Eselon V. Mutasi yang dilaksanakan di gedung Kartini tersebut melibatkan sekitar 730 pejabat mulai dari sekretaris daerah sampai guru yang kemudian diangkat sebagai kepala sekolah.

Bagus Permadi selaku Walikota Singapraja mengatakan dengan diplomatis tentang alasan dilakukannya mutasi, setidaknya ada tiga alasan mendasar. Pertama, mutasi untuk meningkatkan kinerja. Kedua, mutasi dilakukan karena beberapa pejabat yang menempati tempat sebelumnya dinilai tidak cocok menempati bidangnya. Ketiga, sebagai persiapan Pemerintah Kota Singapraja dalam menghadapi kekosongan pejabat karena adanya banyak pejabat yang pensiun (Periksa Lampiran 1, Gambar 5.13).

Bagus Permadi menjelaskan, selain untuk meningkatkan kinerja, mutasi dilakukan karena beberapa pejabat yang menempati tempat sebelumnya dinilai tidak cocok menempati bidangnya. “Mutasi dilakukan bisa karena ada ketidakcocokan di bidangnya. Apalagi pada Februari nanti banyak pejabat yang akan pensiun,” ujarnya. Rencananya, para pejabat yang baru dilantik hari ini, Kamis 3/1) besok akan menempati pos baru masing-masing minggu depan (Sumber Data pada lampiran 6: 5.41).

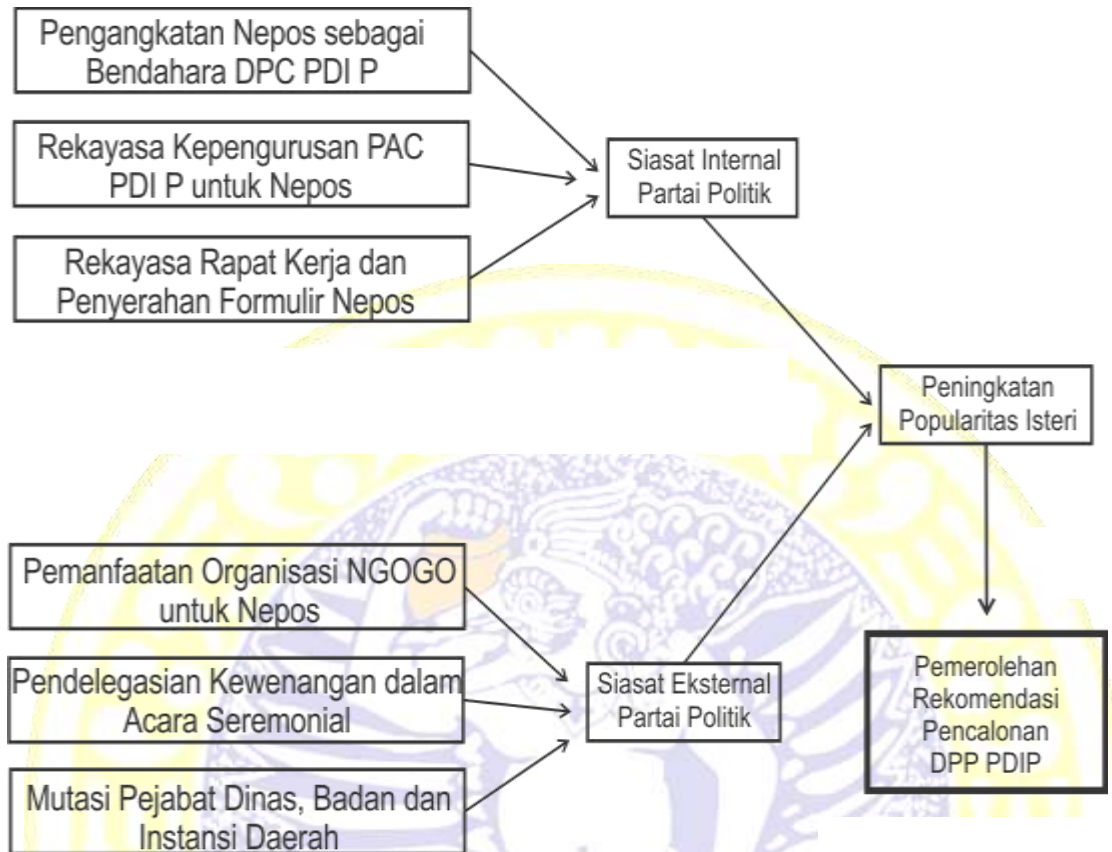
Sebenarnya ada kejanggalan berkenaan dengan alasan peningkatan kinerja dan ketidakcocokan bidang pejabat yang dimutasi, karena semua pejabat yang dimutasi tersebut juga merupakan hasil keputusan Bagus Permadi sendiri selaku

Walikota Singapraja. Sebagai Walikota Singapraja yang menjabat hampir sepuluh tahun, ternyata baru mengetahui ketidak-cocokan bidang bawahannya, dan membuat keputusan justru di akhir masa jabatannya sebagai Walikota Singapraja.

#### 7. Rangkuman Peningkatan Popularitas *Nepos*

Melalui sejumlah siasat, Bagus Permadi berupaya meningkatkan popularitas Wara Srikandi, baik melalui jalur internal partai maupun eksternal partai. Pada internal partai PDIP, upaya yang dilakukan adalah: (1) pengangkatan isteri sendiri (*nepos*) sebagai fungsionaris DPC PDIP Kota Singapraja, (2) merekayasa susunan kepengurusan PAC PDIP dengan orang-orang yang sejalan dengan kehendaknya, dan (3) merekayasa Musyawarah Kerja DPC PDIP Kota Singapraja hingga secara bulat mendukung isterinya, Wara Srikandi sebagai calon walikota dari PDIP Kota Singapraja.

Pada eksternal partai, upaya yang dilakukan oleh Bagus Permadi adalah: (1) memanfaatkan NGOGO sebagai sarana meningkatkan popularitas Wara Srikandi, (2) mewakili perannya sebagai Walikota Singapraja kepada Wara Srikandi dalam berbagai acara seremonial kedinasan, meng-ekspose atau menampilkan serta menyampaikan pada publik apa yang telah dilakukan Wara Srikandi, (3) melakukan mutasi pejabat di instansi-instansi strategis, baik dalam arti yang paling banyak bersentuhan dengan masyarakat, maupun yang paling memberikan kontribusi bagi pendanaan kampanye.



**Gambar 5.14: Upaya Peningkatan Popularitas Isteri Kepala Daerah**

## B. Strategi Pemerolehan Legalitas

### 1. Kegagalan Mendapatkan Rekomendasi dari DPP PDIP

Pada dasarnya mekanisme penjaringan bakal calon walikota atau wakil walikota yang berlangsung di PDIP memiliki kemiripan dengan mekanisme penjaringan calon kepala daerah partai-partai lain. Pertama, dilakukan penjaringan aspirasi dari unsur kepengurusan paling bawah, untuk selanjutnya disaring pada tingkatan kepengurusan di atasnya. Kepengurusan paling bawah dalam organisasi



PDIP adalah Anak Ranting, kemudian Ranting, Anak Cabang (PAC), dan Cabang (DPC). Kedua, semua bakal calon yang masuk nominasi harus mengikuti semacam uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) yang diselenggarakan oleh DPC PDIP Kota Singapraja. Hasil dari uji kepatutan dan kelayakan itu yang selanjutnya diajukan kepada DPP PDIP. Dalam hal ini, sebenarnya keputusan untuk menetapkan siapa yang mendapat rekomendasi memang mutlak di tangan DPP PDIP. Artinya, meskipun sudah mendapatkan dukungan dari bawah, kalau menurut penilaian DPP PDIP tidak memenuhi persyaratan, bisa saja tidak diberikan rekomendasi, atau rekomendasi DPP PDIP diberikan kepada bakal calon lain.

Telah disajikan sebelumnya, upaya untuk memperoleh rekomendasi DPP PDIP sebagai calon Walikota Singapraja telah dilakukan oleh Bagus Permadi dan Wara Srikandi sejak dini (2011). Sebagai Ketua dan Bendahara DPC PDIP Kota Singapraja, Bagus Permadi dan Wara Srikandi memiliki pengaruh dominan dalam menentukan tidak hanya pengurus DPC PDIP Kota Singapraja yang lain, tetapi juga para fungsionaris tingkat PAC, Ranting dan bahkan Anak Ranting.

Hampir semua pengurus Anak Ranting, Ranting, PAC dan DPC cenderung menyetujui apa pun usulan dan kebijakan Bagus Permadi dan Wara Srikandi. Ini terbukti dengan hasil Musker DPC PDIP pada tanggal 29 Desember 2011, yang melibatkan seluruh unsur kepengurusan, menghasilkan keputusan bahwa DPC PDIP Kota Singapraja hanya akan mengajukan satu bakal calon tunggal untuk mendapatkan rekomendasi dari DPP PDIP sebagai wakil partai yang akan maju dalam pemilihan kepala daerah. Satu calon tunggal yang dimaksud adalah Wara Srikandi.

Dalam kesempatan Raker DPC PDIP Kota Singapraja tersebut, Ketua DPC PDIP Kota Singapraja, Bagus Permadi mengemukakan tekad untuk tidak hanya memenangkan pemilihan walikota, tetapi juga menargetkan agar PDIP Kota Singapraja juga memenangkan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014. Juga dikemukakan bahwa meskipun Raker DPC PDIP Kota Singapraja hanya mengajukan satu calon tunggal untuk maju dalam Pemilihan Walikota Singapraja, namun PDIP juga membuka peluang kepada kader lain yang mau mendaftar dan mencalonkan diri menjadi walikota. Ditegaskan bahwa siapa pun boleh mendaftar, sepanjang bisa memenuhi berbagai persyaratan yang telah menjadi kesepakatan partai. Beberapa syarat dimaksud adalah kualitas diri calon, ketokohan yang dapat dibuktikan, riwayat kesejarahan yang jelas, tidak pernah terlibat dengan masalah hukum, serta tentu saja memiliki anggaran cukup untuk pencalonan. Syarat terakhir tersebut diberi penekanan karena ada target bahwa calon dari PDIP harus menang. Karena itu, pada tahap awal elektabilitas calon dari PDIP harus dibuktikan dengan hasil survei elektabilitas secara langsung terhadap masyarakat pemilih.

Telah dikemukakan, bahwa sejak awal Bagus Permadi dan Wara Srikandi sudah mengetahui bahwa salah satu pesaing terberat dari internal partai dalam memperebutkan rekomendasi DPP PDIP adalah Sri Sendari, anggota DPR RI dari PDIP yang juga isteri Abimanyu, Ketua DPW PDIP Jawa Timur. Seperti Wara Srikandi, Sri Sendari juga merasa optimis bisa mendapat rekomendasi dari DPP PDIP. Optimisme tersebut dibarengi dengan melakukan survei pribadi yang sudah dilakukannya kepada warga Kota Singapraja. Sri Sendari mengatakan bahwa dirinya

benar-benar ingin menjadikan Kota Singapraja menjadi lebih baik. Sehingga dengan optimisme yang dibarengi dengan usaha, ia yakin akan mendapatkan kesempatan tersebut.

"Semua orang harus optimis dan berusaha jika mempunyai keinginan, supaya bisa tercapai, " kata Yayuk, Panggilan Sri Sendari, Minggu (3/6/2012). Menurutnya, Survai yang akan dilakukan DPP nantinya pasti dilaksanakan secara selektif dan bebas kepentingan. Sehingga, apa yang jadi keputusan DPP, itulah yang terbaik. Keyakinan tersebut dibarengi Yayuk dengan usahanya untuk melakukan survai pribadi. Survai pribadi ini, kata Yayuk, sebagai bahan monitoring dan evaluasi untuk dirinya. Terkait hasil survai, ia enggan menyampaikannya. "Survai itu hanya untuk saya pribadi. Supaya saya tahu saya ini siapa di mata warga, " kata Yayuk. Yayuk adalah salah satu bakal calon Wali Kota dari Partai PDIP. Saat ini, di tingkat DPC PDI Kota Singapraja sudah ada 2 nama yang masuk, yaitu Sri Sendari dan Wara Srikandi. Sedangkan untuk bakal calon Wakil Wali Kota Singapraja hanya ada satu, yakni Priyatmoko Oetomo. (Sumber Data pada lampiran 6: 5.42).

Hingga DPC PDIP Kota Singapraja membuka pendaftaran untuk bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Singapraja, baik Wara Srikandi maupun Sri Sendari sama-sama optimistis bisa mendapatkan rekomendasi dari DPP. Desakan yang dilakukan oleh kubu Bagus Permadi dan Wara Srikandi senantiasa melibatkan massa yang cukup banyak, bahkan pada saat penyerahan formulir pendaftaran bakal calon Walikota Singapraja di kantor DPC PDIP pun ratusan simpatisan Wara Srikandi memadai Kantor DPC PDIP Kota Singapraja.

Didampingi sang suami, Wara Srikandi bakal calon Walikota Singapraja, menyerahkan formulir pendaftaran bakal calon Walikota Singapraja pada hari Sabtu, 26 Mei 2012. Wara Srikandi menyerahkan secara langsung ke Kantor DPC PDIP Kota Singapraja, dengan diiringi ratusan simpatisan yang memadati kantor. Saat



mendampingi Wara Srikandi, selaku Ketua DPC PDIP Kota Singapraja, Bagus Permadi mengklaim bahwa mulai anak cabang hingga tingkat ranting hanya akan mengajukan satu calon, yakni isterinya untuk jadi Bakal Calon Walikota Singapraja periode 2013-2018.

"Calon dari PDIP hanya satu yaitu Bunda (sebutan isteri Bagus Permadi). Dan masyarakat harus teguh dengan satu pilihan, " teriak Bagus Permadi kepada puluhan ribu simpatisan ikut mengantar. Bagus Permadi menegaskan, jika pencalonan isterinya sangat tepat tanpa tersangkut kasus hukum. Apalagi melakukan korupsi, merampas uang rakyat. Ia melanjutkan dengan memuji dirinya selama memimpin Kota Singapraja dua periode tak pernah mengkorupsi uang rakyat.

"Seperti Bagus Permadi ini. Tak pernah korupsi, bunda juga orang yang bersih, " ucap Bagus Permadi disambut tepuk tangan simpatisan. Bagus Permadi menambahkan, jika pencalonan isterinya telah didukung 300 elemen masyarakat Kota Singapraja. "Ini membuktikan warga Singapraja mendukung sepenuhnya isterinya sebagai walikota, " imbuh Bagus Permadi (Sumber Data pada lampiran 6: 243).

Saat pengembalian formulir pendaftaran bakal calon walikota untuk PDIP di Kantor DPC PDIP Kota Singapraja, secara terbuka Wara Srikandi juga menampakan kalau sudah menyertakan uang pendaftaran sebesar Rp 100 juta. Sebagaimana pernah dikemukakan, uang sebesar itu akan digunakan untuk melaksanakan survei elektabilitas bakal calon walikota yang akan diajukan melalui PDIP Kota Singapraja. Menurut penilaian Wara Srikandi, selama Bagus Permadi menjadi Walikota Singapraja, pembangunan maju cukup pesat. Karena itu, salah satu visinya secara singkat adalah melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan oleh Bagus Permadi.

"Program walikota sekarang akan kita lanjutkan, terutama masalah kesejahteraan, " tukas Wara. Hadirnya puluhan ribu simpatisan Wara Srikandi

memacetkan arus lalu lintas Singapraja-Lumajang yang berada tepat di depan Kantor DPC PDIP Kota Singapraja di Jalan Panji Suroso. Sebelumnya Sri Sendari, isteri Ketua DPD PDIP Jawa Timur sudah mengembalikan formulir pencalonan walikota. keduanya akan bertarung memperebutkan rekomendasi dari Ketua Umum PDIP (Sumber Data pada lampiran 6: 5.44).

Sementara itu, dengan optimisme yang sama Sri Sendari, Anggota DPR RI yang ikut meramaikan bursa pencalonan Wali Kota Singapraja juga yakin bisa mendapat rekomendasi dari DPP PDIP. Optimisme tersebut dibarengi dengan melakukan survai pribadi yang sudah dilakukannya kepada warga Kota Singapraja. Berkenaan dengan tujuan pencalonannya, Sri Sendari mengatakan bahwa dia benar-benar ingin menjadikan Kota Singapraja menjadi lebih baik. Dengan optimisme yang dibarengi dengan usaha, dia yakin akan mendapatkan kesempatan tersebut. Sri Sendari merupakan salah satu calon Kepala Daerah yang bersaing dengan Wara Srikandi untuk memperebutkan rekomendasi dari DPP PDIP.

"Saat ini, di tingkat DPC PDI Kota Singapraja sudah ada 2 nama yang masuk, yaitu Sri Sendari dan Wara Srikandi. Sedangkan untuk bakal calon Wakil Wali Kota Singapraja hanya ada satu, yakni Priyatmoko Oetomo" (Sumber Data pada lampiran 6: 5.45).

Salah satu hal yang telah dipersiapkan Sri Sendari untuk mendapatkan rekomendasi dari DPP PDIP ketika itu adalah memastikan tingkat popularitasnya cukup tinggi. Karena itu, Sri Sendari juga memiliki dan memanfaatkan tim survai internal.

"Semua orang harus optimis dan berusaha jika mempunyai keinginan, supaya bisa tercapai. Menurutnya, survai yang akan dilakukan DPP nantinya pasti dilaksanakan secara selektif dan bebas kepentingan. Sehingga, apa yang jadi keputusan DPP, itulah yang terbaik. Keyakinan tersebut dibarengi Yayuk dengan usahanya untuk melakukan survai pribadi. Survai pribadi ini, kata

Yayuk, sebagai bahan monitoring dan evaluasi untuk dirinya. Terkait hasil survai, ia enggan menyampaikannya. "Survai itu hanya untuk saya pribadi. Supaya saya tahu saya ini siapa di mata warga, " kata Yayuk. (Sumber Data pada lampiran 6: 5.46)

Akhirnya dua nama bakal calon Walikota Singapraja, yaitu: Wara Srikandi dan Sri Sendari, dan satu calon wakil Walikota Singapraja, masuk ke DPP PDIP. Sambil menunggu dikeluarkannya rekomendasi oleh DPP PDIP, banyak hal dilakukan oleh kubu Bagus Permadi dan Wara Srikandi. Beberapa tindakan sebagai upaa mempengaruhi keputusan rekomendasi DPP PDIP memang bersifat positif, tetapi beberapa di antaranya bersifat negatif. Salah satu tindakan positif yang dilakukan Bagus Permadi untuk mempengaruhi keputusan rekomendasi DPP PDIP adalah dengan membangun sebuah "kantor baru" DPC PDIP Kota Singapraja yang terletak di Jl Mayjen Sungkono.

Kompleks dan gedung baru Kantor DPC PDIP Kota Singapraja ini jauh lebih luas, lebih lengkap dan lebih megah daripada Kantor DPC PDIP lama yang terletak di Jl. Panji Suroso, yang berdampingan dengan kantor DPD Partai Golkar Kota Singapraja dan DPC PPP Kota Singapraja. Suasana peletakan batu pertama hingga proses pembangunan kantor baru ini sangat meriah, dengan begitu banyak umbul-umbul dan baliho partai PDIP. Kegiatan dan umbul-umbul partai di gedung baru tersebut bertahan hingga saat rekomendasi DPP PDIP diterbitkan.

Bentuk upaya lain yang dilakukan oleh Bagus Permadi dan Wara Srikandi untuk mempengaruhi keputusan rekomendasi DPP PDIP adalah dengan menunjukkan betapa besar dukungan rakyat terhadap Wara Srikandi. Salah satunya adalah dengan



menggalang dukungan terbuka yang menggunakan 5000 meter kain untuk tandatangan sebagai penanda mendukung Bunda Wara Srikandi, dimana tanda tangan tersebut berasal dari beberapa komunitas dan dilaksanakan di Rumah Dinas Walikota Singapraja Jalan Ijen No 2, Singapraja.

"Ini bentuk dukungan dari komunitas macam-macam, ya ada dari komunitas seni, paguyuban pedagang, PKK, Guru PAUD datang untuk mendukung bunda sebagai walikota, " kata Bunda Wara di Singapraja, Sabtu (12/1). Penggalangan tandatangan ini dimulai tanggal 11 Januari 2013. Baru sehari dikabarkan sudah mendapat 2000 tandatangan untuk dukungan yang bertajuk "Petisi 500.000 dukungan untuk Bunda". Penggalangan tandatangan akan dilakukan hingga 20 hari.

Ini merupakan pemberi semangat pada bunda untuk melaju menjadi Walikota Singapraja (Tambah Istri Walikota Singapraja ini). Ketika ditanya terkait penggalangan ini merupakan langkah alternatif jika rekomendasi dari PDIP tidak turun kepadanya, Bunda menyatakan bahwa dirinya tetap menunggu rekomendasi tersebut. Saya gak mau berandai-andai, saya tetap menunggu dari partai, ada kabar hari senin besok ada teman-teman yang membantu 10000 nasi kotak, dikirim kesini" ujarnya (Sumber Data pada lampiran 6: 5.47).

Persaingan sengit antara Wara Srikandi dengan Sri Sendari untuk mendapatkan rekomendasi DPP PDIP memang sempat mengisi kolom berita media massa, baik elektronik, online maupun cetak. Dalam kenyataannya, persaingan antar bakal calon dari PDIP ini bahkan sudah seperti persaingan antar calon walikota. Beberapa komentator mengemukakan bahwa Pilkada saat itu sudah hampir pasti hanya menjadi ajang persaingan antara Wara Srikandi dengan Sri Sendari.

Bunda Wara juga berharap Pilkada Singapraja nantinya akan berjalan dengan tenang dan damai. Dalam kain sepanjang 5000 meter tersebut selain tanda tangan ada juga beberapa pesan dan motivasi kepada Bunda, seperti "sekali Bunda tetap Bunda", "*Luweh Penak Melok Bunda*" "Bunda Yes" dsb.

Puji Rahayu (44), salah satu warga yang membubuhkan tanda tangan warga jalan Lahor menyatakan bahwa Bunda adalah sosok yang sering berpartisipasi terhadap perempuan, selain juga merupakan sosok pemimpin perempuan. Seperti diketahui bahwa Rekomendasi Calon Walikota dari PDIP belum keluar, sehingga dua bakal calon dari partai ini yakni Wara Srikandi dan juga Sri "Yayuk" Rahayu masih berusaha meraih galangan dukungan dari masyarakat (Sumber Data pada lampiran 6: 5.48).

Mencermati bahwa DPP PDIP belum juga memberikan rekomendasi kepada Wara Srikandi, maka Bagus Permadi pun melakukan beberapa tindakan yang seolah-olah terpisah dari usaha mendapatkan rekomendasi dari DPP PDIP untuk Wara Srikandi. Berulang kali Bagus Permadi mengemukakan bahwa seharusnya PDIP tidak bersifat elitis dalam memberikan rekomendasi, tetapi harus memperhatikan hasil keputusan melalui mekanisme partai di bawah. Ini sejalan dengan apa yang telah dia upayakan sebelumnya, bahwa DPC PDIP Kota Singapraja hanya mengajukan satu calon tunggal untuk Pilkada 2013, yaitu: Wara Srikandi.

Bagus Permadi, sebagai bagian dari strateginya untuk mempengaruhi DPP PDIP, juga memberikan peringatan bahwa bila DPP PDIP tetap bersifat elitis, maka kasus yang terjadi di Tulungagung akan terjadi juga di Kota Singapraja. Seperti banyak diberitakan, dalam Pilkada Kabupaten Tulungagung, calon yang tertolak oleh DPP PDIP, yang tidak mendapatkan rekomendasi DPP PDIP justru memenangkan Pilkada. Kasus demikian jelas memermalukan dan menurunkan cita positif PDIP.

Hingga tiga hari menjelang pembukaan pendaftaran calon Wali Kota Singapraja dari partai politik (Parpol), siapa calon PDIP yang mendapat rekom dari DPP, masih belum diketahui. Rekomendasi DPP PDIP masih ditunggu oleh dua bakal calon walikota (Bacawali), yakni Wara Srikandi, isteri Ketua DPC PDIP Singapraja

dan Walikota Singapraja, Bagus Permadi dan Sri Sendari, anggota DPRRI, isteri Ketua DPD PDIP Jatim, Abimanyu Tjondropragolo. Berkenaan dengan kemungkinan diberikannya rekomendasi kepada Sri Sendari, secara tegas Bagus Permadi menyatakan akan melakukan perlawanan (Sumber Data pada lampiran 6: 5.49).

Sementara itu, pendaftaran bakal calon WaliKota Singapraja di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Singapraja dibuka pada 18 Februari 2013. Bagus Permadi saat itu mengatakan jika DPP PDIP pada akhirnya tidak merekomendasikan Wara Srikandi yang merupakan refleksi kehendak masyarakat, maka Bagus Permadi tidak akan menerimanya.

"Jika nantinya DPP PDIP tidak merekom calon yang dihendaki rakyat Kota Singapraja, saya tegaskan tidak akan menerima. " Menurut Bagus Permadi, demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang berbasis daerah. Karenanya, rekomendasi DPP PDIP harus sesuai dengan keinginan rakyat. "Rekom itu bukan keinginan orang Jakarta, walaupun yang menentukan rekom itu adalah DPP." (Sumber Data pada lampiran 6: 5.50).

Bagus Permadi meyakini bahwa dasar penentuan rekomendasi, harus sesuai dengan hasil survei yang telah dilakukan oleh DPP PDIP. Berdasarkan survei, yang disukai rakyat adalah Wara Srikandi. Ia merupakan kader yang menempati peringkat pertama dibandingkan calon lainnya. Bagus Permadi pun waktu itu sempat mengingatkan agar DPP PDIP tidak salah dalam mengambil keputusan dan untuk menghindari hal tersebut maka DPP PDIP harus menggunakan logika ilmiah, bahwa dalam menentukan keinginan rakyat harus menyesuaikan dengan keinginan rakyat.

Bagus Permadi kemudian mendeklarasikan diri sebagai pejuang demokrasi, sehingga muncul rentetan statemen jika DPP PDIP tidak menjatuhkan rekomendasinya kepada Wara Srikandi, di antaranya yang paling banyak



dikenal peliput berita adalah: Pertama, "Jika rekom tidak ke Wara Srikandi, saya tak akan gentar jika dianggap melawan keputusan DPP PDIP", kedua, "Saya kan pejuang demokrasi. Jadi tidak gentar jika dianggap membangkang. Bahkan, dipecat dari jabatan Ketua DPC PDIP Kota Singapraja, saya tidak takut, ", dan ketiga, "PDIP itu partai yang peduli wong cilik. Saya selaku kadernya harus berjuang demi wong cilik" (Sumber Data pada lampiran 6: 5.51).

Pernyataan Bagus Permadi tersebut ternyata sempat mendapatkan perhatian dari banyak kalangan, salah satunya adalah ahli Hukum Tata Negara dari Universitas Muhammadiyah Singapraja, Sulardi. Menurut Sulardi, perebutan rekomendasi tersebut akan menguntungkan Parpol atau pasangan calon lain yang sudah lebih dulu siap. Menurutnya, bisa saja Bacawali yang tidak direkomendasi DPP, loncat ke Parpol lain dan bukan tidak mungkin seperti yang dialami PDIP dalam Pilkada Tulungagung.

"Ya bisa saja kasus di Tulungagung terjadi di Singapraja karena dua calon ini kan sama-sama dikenali masyarakat, misalkan rekom DPP PDIP nantinya jatuh ke Wara Srikandi, bukan tidak mungkin Yayuk-panggilan Sri Sendari akan berpindah haluan dan maju lewat Parpol lain dan sebaliknya" (Sumber Data pada lampiran 6: 5.52).

Sebagai seorang ahli hukum tata negara di Universitas Muhammadiyah Singapraja, Sulardi menyampaikan perlunya ada pembatasan kekuasaan yang dimiliki oleh Pengurus Pusat. Pengurus pusat cukup memberikan legalitas berupa pengesahan terhadap calon yang telah diusulkan dari bawah.

Idealnya, pusat hanya memberikan legalitas. Jadi pusat hanya tinggal tekan, tetapi untuk penentuan calon dilakukan daerah. Ada pembagian tugas. Kalau salah satu dipilih, saya kira tidak ada masalah karena kan sudah melibatkan masyarakat (Sumber Data pada lampiran 6: 5.53).

Sebelumnya, saat Pilkada Tulungagung, DPP PDIP merekomendasi Isman sebagai calon bupati, menyisihkan Syahri Mulyo. Namun, Syahri Mulyo yang kemudian dicalonkan oleh koalisi partai gabungan PKNU, PDP dan Partai Patriot. Hasil Pilkada justru dimenangkan oleh Isman. Dengan argumentasi agar kasus seperti Pilkada Tulungagung tidak terulang, Bagus Permadi menggalang sejumlah DPC PDIP untuk mengajukan mosi tak percaya kepada DPD PDIP Jawa Timur, Abimanyu suami Sri Sendari.

Bagus Permadi, Ketua DPC PDIP Kota Singapraja, kemudian menjadi penggerak mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDIP Jawa Timur. Dalam berbagai kesempatan Bagus Permadi menyampaikan alasan bahwa gerakannya bukan merupakan bentuk perebutan rekomendasi pada Pilkada Kota Singapraja, karena menurut dia masalah rekomendasi Pilkada Kota Singapraja sudah selesai.

Saat itu, Bagus Permadi mengatakan bahwa "Kami juga tidak akan *nyengrek* rekomendasi dari DPP, tapi kami hanya butuh mesin politik partai yang sehat, " (Sumber Data pada lampiran 6: 5.54). perkataan tersebut diucapkan oleh Bagus Permadi sebagai upayanya dalam meyakinkan semua kalangan, khususnya DPP PDIP bahwa segala yang dia lakukan bukan untuk menghalangi isteri Abimanyu, Sri Sendari untuk mendapatkan rekomendasi DPP PDIP agar dapat mencalonkan diri sebagai Walikota Singapraja.

Menindaklanjuti hal tersebut, sebagaimana diberitakan salah satu media cetak, bahwa pada hari rabu (13/2/2013) malam, sebanyak 31 DPC yang menyatakan mosi

tidak percaya terhadap Abimanyu membahas agenda menghadap ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Megawati Soekarno Putri (Surya, 14 Februari 2013, Bagus Permadi: Rekomendasi Pilkada Kota Singapraja Sudah Selesai).

Memang dalam berbagai media massa, Bagus Permadi berhasil menggerakkan sebanyak 31 dari 38 DPC PDIP yang ada di Jawa Timur untuk mengeluarkan mosi tidak percaya atas kepemimpinan Abimanyu dan Hasto Kristanto. Dengan demikian, 31 DPC PDIP tersebut juga meminta agar DPP PDIP membekukan kepengurusan DPD PDIP Jawa Timur. Dikemukakan bahwa Abimanyu telah melakukan tindakan dan kebijakan tidak terpuji. Ini disampaikan oleh Bagus Permadi di hadapan puluhan wartawan di rumah dinas Walikota Singapraja.

Dalam jumpa pers tersebut, Bagus Permadi juga menyampaikan bahwa dirinya menyadari, sangat tidak etis ketika masalah internal disampaikan ke publik. Namun, dengan alasan demi kebenaran, maka dengan sangat terpaksa Bagus Permadi menyampaikan ke publik melalui media.

"Kelakuan tak terpuji Hasto adalah yang bersangkutan diduga telah menjual rekomendasi pencalonan kepala daerah kepada sejumlah DPC yang ada di Jawa Timur. Hasto ini telah meminta uang kepada beberapa DPC PDIP di Jatim. Tujuannya, agar bisa memberikan rekom untuk pencalonan dalam pilkada. Kader seperti itu tidak layak berada di DPP PDIP," (Sumber Data pada lampiran 6: 5.55).

Bagus Permadi menyatakan bahwa informasi dia dapat berasal dari sumber informasi terpercaya, serta diakui oleh korban secara langsung langsung. Berdasarkan alasan itu, maka sebanyak 31 DPC PDIP di Jawa Timur mendesak agar Ketua Umum DPP PDIP, menonaktifkan Abimanyu dan Hasto. Lebih lanjut, kedua fungsionaris



PDIP Jawa Timur tersebut juga tidak boleh mencalonkan diri sebagai pengurus partai PDIP di daerah mana pun.

Perang wacana pun mulai terjadi, antara Abimanyu dengan Bagus Permadi. Dalam pemberitaan lain, Abimanyu menyampaikan bahwa kepengurusan DPD PDIP Jawa Timur tetap solid. Abimanyu masih terlihat cukup tenang dalam menyampaikan tanggapan atas berbagai isu-isu negatif yang telah dituduhkan oleh Bagus Permadi kepada dirinya. Abimanyu menambahkan bahwa hingga saat itu, dia masih berkegiatan menjalankan tugas-tugas kepartaian dan agenda perjuangan pro-rakyat seperti biasa. Soal berbagai tuduhan yang dilakukan Bagus Permadi kepada diri dan rekannya bukan merupakan soal serius, dan tidak perlu terlalu ditanggapi (Sumber Data pada lampiran 6: 5.56)

Sehari sebelum pendaftaran Cawali-cawawali Kota Singapraja, yang dibuka mulai 18 - 24 Februari 2013, Dewan Pimpinan Pusat PDIP sudah menetapkan rekomendasi, yang diberikan kepada Sri Sendari dan Priyatmoko Oetomo untuk maju sebagai pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Singapraja periode 2013-2018. Surat Keputusan (SK) penetapan pasangan calon tersebut dibacakan oleh Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur, Kusnadi di hadapan ratusan simpatisan PDIP, para ketua PAC dan Ranting PDIP di seluruh wilayah Kota Singapraja, Minggu petang. Surat penetapan pasangan calon kepala daerah tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 3256/IN/DPP/II/2013 yang ditandatangani oleh Sekjen PDIP Tjahyo Kumolo dan disetujui oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tertanggal 16 Februari 2013. Setelah dibacakan di hadapan ratusan kader dan

simpatisan PDIP, Surat Keputusan yang sering diistilahkan sebagai rekomendasi tersebut, langsung diserahkan kepada Calon Wali Kota (Cawalai) dan Calon Wakil Wali Kota (Cawawali) Singapraja Sri Sendari dan Priyatmoko Oetomo.

Dengan penerbitan, pembacaan, pengumuman dan penyerahan surat keputusan DPP PDIP tersebut, maka wacana persaingan antara kubu Bagus Permadi dan Wara Srikandi melawan Abimanyu dan Sri Sendari di tubuh PDIP Kota Singapraja dan DPD PDIP Jawa Timur bisa disebut telah selesai. Bahkan, penyelesaian itu juga diikuti oleh instruksi kepada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Singapraja agar segera mendaftarkan Sri Sendari dan Priyatmoko Oetomo sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Singapraja ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Singapraja, dan instruksi agar rekomendasi diamankan oleh seluruh kader PDIP, serta agar pasangan calon tersebut dimenangkan dalam Pilkada Kota Singapraja 2013, yang dilaksanakan tanggal 23 Mei 2012. Secara tegas juga diingatkan agar semua kader PDIP mengamankan, sedangkan yang melakukan tindakan yang melawan instruksi tersebut dipastikan akan mendapatkan sanksi dari DPP PDIP.

Dengan pemberian rekomendasi kepada Sri Sendari, anggota Komisi IX DPR RI yang juga isteri Ketua DPD PDIP Jatim Abimanyu, maka sudah tertutup kesempatan isteri Wali Kota Singapraja Bagus Permadi, yakni Wara Srikandi untuk bisa mencalonkan diri dari PDIP. (Sumber Data pada lampiran 6: 5.57).

Selanjutnya, pada hari Minggu 16 Februari 2013, diberitakan bahwa karena sering berbuat kisruh, maka Megawati memecat Bagus Permadi. Keputusan pemecatan tertuang dalam surat nomor 240/KPKS/DPP/2/2013 yang ditandatangani

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Tjahjo Kumolo. Surat tertanggal 16 Februari 2013 itu juga telah disetujui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

" Bagus Permadi dan Bibit jelas melanggar peraturan partai, " kata Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah PDIP Jawa Timur, Kusnadi di hadapan simpatisan dan pengurus PDIP Kota Singapraja di depan kediaman calon wali kota Singapraja Sri Sendari, yang juga istri Ketua DPD Jawa Timur Abimanyu, Ahad 17 Februari 2013. Dalam surat itu disertai penjelasan pencopotan Bagus Permadi karena dianggap tidak militan serta tidak patuh kepada keputusan dan mekanisme partai (Sumber Data pada lampiran 6: 5.58).

Pertimbangan lain dari pemecatan Bagus Permadi adalah pernyataan dia yang menyatakan siap melawan DPP PDIP jika istrinya, Wara Srikandi, tidak mendapat rekomendasi. Dikemukakan bahwa pernyataan itu sendiri sudah merupakan bentuk pembangkangan terhadap kebijakan DPP PDIP. Demikian juga, pernah diberitakan bahwa Bagus Permadi sempat mengenakan kaus Partai Demokrat saat mengikuti gerak jalan bersama Ketua DPD Partai Demokrat Soekarwo. Terhadap berbagai tindakan Bagus Permadi, DPP PDIP senantiasa melakukan pemantauan dan akhirnya memutuskan untuk memberikan sanksi pemberhentian kepada Bagus Permadi dan Widjianto, selaku Ketua dan Sekretaris DPC PDIP Kota Singapraja.

Perihal pembangkangan Bagus Permadi terhadap partai yang ditunjukkan dengan kesediaan dia memakai atribut partai lain, memang pernah diberitakan dan mendapatkan reaksi cukup mencolok, karena ternyata pemberitaan itu mengakibatkan unuk-rasa oleh para kader PDIP Kota Singapraja yang loyal terhadap Bagus Permadi. Radar Singapraja, salah satu anak perusahaan penerbitan Jawa Pos, pernah memuat foto Bagus Permadi sedang memakai seragam Partai Demokrat. Karena kegiatan dan



dan pemuatan foto tersebut berdekatan dengan pelaksanaan Pilkada 2013, maka oleh sebagian kader PDIP yang loyal terhadap Bagus Permadi dan Wara Srikandi dianggap memiliki unsur kesengajaan untuk memecah-belah PDIP Kota Singapraja.

Tidak cukup jelas apakah memang merupakan gerakan otonom atau memang sengaja digerakkan oleh Bagus Permadi, yang pasti terjadi unjuk-rasa oleh sekitar seribuan kader PDIP Kota Singapraja di kantor Radar Singapraja. Selain unjuk-rasa mengajukan keberatan terhadap pemuatan foto Bagus Permadi yang sedang memakai seragam Partai Demokrat, Radar Singapraja juga dituduh melakukan adu-domba karena juga memuat pernyataan tokoh PDIP lain yang mengancam keras perbuatan Bagus Permadi.

Sekitar seribu massa PDIP mendatangi kantor Radar Singapraja di Jalan Arjuno, Singapraja. Mereka protes atas pemberitaan Koran Harian Radar Singapraja yang memuat foto Bagus Permadi, Ketua DPC PDIP menggunakan pakaian berlogo partai Demokrat di sebuah acara jalan sehat. Di samping itu, Radar Singapraja juga memuat statemen Wakil Sekertaris Jenderal Bidang Kesekretariatan DPP PDIP, Hasto Kristianto yang menyatakan bahwa jika ada kader PDIP yang menggunakan atribut partai lain maka hal itu dianggap mengotori citra PDIP.

DPC PDIP Singapraja bergerak cepat untuk mengantisipasi hal itu. Kerumunan massa bisa ditenangkan dan tidak bertindak anarkis (Sumber Data pada lampiran 6: 5.59).

Unjuk-rasa yang melibatkan massa cukup banyak tersebut ternyata juga dipandang bisa menimbulkan kerawanan dan mengganggu ketertiban masyarakat, sehingga sejumlah petugas kepolisian juga diturunkan untuk menjaga keamanan unjuk-rasa di kantor media cetak Radar Singapraja. Begitu mengetahui kejadian tersebut, Bagus Permadi langsung bergerak menuju tempat kejadian unjuk-rasa.

Bagus Permadi pada waktu itu mengimbau agar massa tetap tenang. Dalam upayanya mengendalikan massa, Bagus Permadi pada hari ini (29/1) di depan rumah Dinas Wali Kota, Jalan Ijen, Singapraja. Mengatakan: "Saya sebagai Ketua Partai meminta rekan-rekan semuanya agar dalam kondisi terkendali. Ini peringatan dari saya, untuk kali ini kita harus tenang hati dulu, kami minta jangan seperti itu, jangan melempar api. Ini masyarakat sudah panas jangan disiram minyak seperti ini." (Sumber Data pada lampiran 6: 5.60)

Dari pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh Bagus Permadi, tampak jelas bahwa selain bermaksud meredakan emosi massa yang berunjuk-rasa, tampaknya Bagus Permadi juga hendak memberikan peringatan kepada Radar Singapraja agar senantiasa menjaga prinsip-prinsip pemberitaan yang berimbang.

Bagus Permadi juga mengajak Radar Singapraja dan media lainnya agar memberikan informasi yang seimbang, sehingga tidak menimbulkan chaos. Dia menduga ada pihak yang ingin memecah belah PDIP Singapraja. "Kita cari siapa orang-orang yang memecah belah itu. Saya yang bertanggung jawab." (Sumber Data pada lampiran 6: 5.61).

Sebagai tindakan antisipatif terhadap kemungkinan-kemungkinan yang tidak diharapkan, mengingat kecenderungan Bagus Permadi untuk mengerahkan massa, maka sejak penerbitan rekomendasi untuk Sri Sendari dan pemberhentian Bagus Permadi dan Widjianto, kantor DPC PDIP Kota Singapraja Jalan Panji Suroso, tidak pernah terlihat kosong dari para kader atau pengurus DPC PDIP Kota Singapraja. Tentu saja, Pengurus DPC PDIP Kota Singapraja yang dimaksud dalam hal ini bukan lagi yang diketuai Bagus Permadi, dan sekretaris Wijiyanto, tetapi pejabat pengurus baru yang ditetapkan oleh DPP PDIP, yaitu: Eddy Rumpoko sebagai pelaksana harian Ketua, Priyatmoko Oetomo sebagai Sekretaris DPC, dengan bendahara tetap dijabat oleh Wara Srikandi.

Perihal pemberhentian Wara Srikandi sebagai Bendahara DPC PDIP Kota Singapraja, memang sudah bisa diduga dari pernyataan Kusnadi. Wara Srikandi akan diberhentikan apabila tetap mencalonkan diri sebagai Walikota Singapraja melalui partai lain.

DPP kemudian menunjuk Eddy Rumpoko sebagai pelaksana harian Ketua DPC PDIP Kota Singapraja menggantikan Bagus Permadi. Sedangkan Sekretaris DPC dijabat Priyatmoko Oetomo dan bendahara tetap dijabat Wara Srikandi, istri Bagus Permadi. "Jika Bu Wara mencalonkan diri dengan partai lain, tentu akan diberhentikan," kata Kusnadi (Sumber Data pada lampiran 6: 5.62).

Kesempatan bagus karena pemecatan Bagus Permadi dan Widjianto tersebut tidak disia-siakan oleh kubu Sri Sendari. Ibarat sekali merengkuh dayung, dua tiga pula terlampaui, kubu Sri Sendari dan Priyatmoko Oetomo pun membuat iklan layanan masyarakat yang berisi penetapan mereka sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota, sekaligus pemecatan Bagus Permadi dan Widjianto (Periksa Gambar 5.15).

Tampak dalam gambar (Gambar 5.15) tersebut, pengumuman pemberhentian tersebut dimuat pada Harian Surya, dengan judul "Pemecatan Pengurus Harian DPC PDIP Kota Singapraja" (Sumber Data pada lampiran 6: 5.63). Ada beberapa butir isi pengumuman tersebut, yaitu: (1) Surat Ketetapan DPP PDIP tentang rekomendasi Sri Sendari sebagai Calon Walikota Singapraja, dan Priyatmoko Utomo sebagai Calon Wakil Walikota Singapraja, (2) Surat Keputusan pemecatan Bagus Permadi sebagai anggota PDIP Kota Singapraja, (3) Surat Keputusan pemecatan Wara Srikandi sebagai anggota PDIP Kota Singapraja, dan (4) Surat Keputusan pemecatan Wijianto



sebagai anggota PDIP Kota Singapraja. Juga disuratkan bahwa berdasarkan rekomendasi tersebut, DPC PDIP Kota Singapraja telah mendaftarkan Sri Sendari sebagai Calon Walikota Singapraja, dan Priyatmoko Utomo sebagai Calon Wakil Walikota Singapraja, dengan nomor urut 2 (Periksa Lampiran 1, Gambar 5.15).

Penjagaan Kantor DPC PDIP Kota Singapraja yang dilakukan oleh paling tidak ada dua petugas satuan tugas (Satgas) dimaksudkan sebagai tindakan antisipatif karena semakin memanasnya suhu politik di internal kader PDIP Kota Singapraja setelah penerbitan rekomendasi DPP PDIP kepada Sri Sendari sebagai calon Walikota Singapraja. Diberitakan sebelumnya, selaku Plh Ketua DPC PDIP Kota Singapraja, Eddy Rumpoko menginstruksikan kantor DPC harus dijaga empat Satgas per hari. Empat Satgas yang bersiaga di kantor DPC dibagi dua shift. Setiap shift terdiri dua orang. Shift pertama bersiaga mulai pukul 09.00-18.00 WIB. Sedangkan shift kedua harus menjaga kantor mulai pukul 18.00-09.00 WIB.

"Ini perintah atasan mas, kantor tidak boleh dibiarkan kosong. Harus ada yang jaga. Saya hari ini jaga dari jam 09.00 sampai jam 18.00, " tegas Suhadi, Satgas DPC PDIP Kota Singapraja yang sedang berjaga, Selasa (19/2/2013) pagi.

Dijelaskan Suhadi, dirinya sebenarnya tidak ikut-ikutan berpihak kepada dua kubu. Dia berharap, kader partai berlambang banceng moncong putih ini tetap solid paska turunnya rekom. "Kalau saya ndak ikut-ikutan kubu siapa. Saya hanya diserahi tugas jaga kantor. Sebagai kader yang sudah bertahun-tahun, saya berharap tidak ada gontok-gontokan karena kita semua kan satu partai, " imbuh pria berkumis tebal ini (Sumber Data pada lampiran 6: 5.65).

Setelah memperoleh kepastian bahwa yang mewakili PDIP Kota Singapraja dalam pencalonan Walikota Singapraja adalah Sri Sendari dan Priyatmoko Oetomo, DPC PDIP Kota Singapraja menyelenggarakan Rapat Kerja Cabang Khusus (25

Februari 2013). Pada kesempatan itu, nama Wara Srikandi sempat disebut dalam Rapat Kerja Cabang Khusus (Rakercabsus) PDIP Kota Singapraja. Saat nama Bunda Wara, panggilan Wara Srikandi, disebut seluruh peserta langsung mencibir. Penyebutan itu sendiri, bermula dari Ketua Panitia Rakercabsus, Sri Untari yang menyebutkan nama-nama calon walikota sebagai informasi kepada seluruh yang hadir.

Saat nama bunda HP disebut, seluruh ruangan langsung menyahut, "huuuu...!" Bahkan ada yang berteriak, "Jangan sebut nama pengkhianat!" Sri yang memberi sambutan berhenti sejenak. Untuk meredakan suasana, Sri mengatakan calon PDIP yang akan merebut kemenangan. "Nanti kita rebut kemenangan. Tidak perlu dua putaran, langsung satu putaran, " ujarnya dan disambut tepuk tangan seluruh yang hadir. PDIP telah memberikan rekomendasi Sri Sendari-Priyatmoko Oetono menjadi pasangan calon walikota Kota Singapraja (Sumber Data pada lampiran 6: 5.66).

Sementara di kantor DPC PDIP lama, Jl Panji Suroso selama 24 jam dijaga oleh petugas keamanan partai, di kantor baru yang dibangun oleh Bagus Permadi di Jl Mayjen Sungkono, berlangsung kegiatan mencabuti berbagai baliho dan bendera PDIP, termasuk melepas segala atribut PDIP. Pencopotan baliho, bendera dan atribut PDIP ini merupakan perintah Bagus Permadi sendiri. Dengan kejadian ini, berarti "iming-iming" dari Bagus Permadi agar dengan kantor baru yang lebih megah tersebut rekomendasi DPP PDIP akan diberikan kepada Wara Srikandi telah gagal, sehingga "iming-iming" tersebut ditarik kembali oleh Bagus Permadi.

Beberapa bulan setelah semua kejadian tersebut, gedung yang semula oleh Bagus Permadi diperuntukkan sebagai Kantor DPC PDIP Kota Singapraja, berubah menjadi Gedung Sasana Amurwabhumi, yang selain bisa disewakan untuk kegiatan

pribadi, juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang cenderung bertentangan dengan kebijakan umum DPP PDIP. Di antaranya adalah untuk pelantikan pengurus Red Army tingkat kecamatan se Kota Singapraja yang mendukung Wara Srikandi (Minggu, 25 Agustus 2013), Kongres HMI tandingan (8-10 November 2013), serta deklarasi Perempuan Koalisi Merah Putih Dukung Prabowo-Hatta (Selasa, 24 Juni 2014).

## 2. Keberhasilan Mendapatkan Rekomendasi dari DPP PAN

Banyak diduga oleh para pengamat dan warga Kota Singapraja, ada skenario bahwa bila Wara Srikandi gagal mendapatkan rekomendasi dari DPP PDIP akan tetap mencalonkan diri, baik melalui pencalonan oleh partai politik maupun sebagai calon perseorangan. Salah satu partai yang diduga akan dijadikan kendaraan politik Wara Srikandi adalah Partai Demokrat. Namun demikian, karena latar belakang partai politik serta keinginan Ketua DPD Partai Demokrat Kota Singapraja sendiri yang sebenarnya juga ingin mencalonkan diri, setidaknya menjadi Wakil Walikota Singapraja, menjadikan upaya untuk mendapatkan rekomendasi dari DPP Partai Demokrat tidak mudah.

Dituturkan oleh Cahya, sebenarnya pihak DPP Partai Demokrat menghendaki Cahya untuk mencalonkan diri melalui Partai Demokrat. Sebagai mantan Sekretaris Kota Singapraja, nama Cahya memang cukup dikenal dan relatif bisa mengimbangi figur Bagus Permadi ketika itu. Namun demikian, karena tidak mendapatkan restu dari Ibundanya, maka Cahya tidak mau mencalonkan diri pada periode sebelumnya.



Setelah Ibundanya wafat, pada Pemilu Kota Singapraja 2013, sebenarnya Cahya sudah mau mempertimbangkan untuk mencalonkan diri sebagai Walikota Singapraja. Namun demikian, Cahya berpikir strategis, bahwa bila mencalonkan diri maka pasangannya harus dari partai lain yang memiliki basis pemilih cukup kuat, yaitu PAN. Permintaan Cahya untuk mencari pasangan dari luar Partai Demokrat kurang mendapatkan respon positif justru dari DPD Partai Demokrat sendiri. Ini ditunjukkan dengan komentarnya yang seolah-olah tidak mengenal sosok Cahya (Sumber Data pada lampiran 6: 5.67).

Memang peta politik menjelang Pemilihan Walikota Singapraja berubah total setelah rekomendasi DPP PDIP diberikan kepada Sri Sendari yang berpasangan dengan Priyatmoko Oetomo. Gambaran kemungkinan koalisi antar partai pun menjadi sulit diprediksi. Termasuk di antaranya adalah beredarnya kabar bahwa DPP Demokrat merekomendasi Cahya sebagai calon Walikota Singapraja. Diberitakan bahwa mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Singapraja tersebut akan berpasangan dengan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Singapraja, Ir Arief Darmawan.

Namun, ketika perihal pencalonan Cahya tersebut dikonfirmasi kepada Arief Darmawan, Ketua DPRD Kota Singapraja dari Partai Demokrat tersebut justru mempertanyakan dan merasa tidak mengenal Cahya. Dari reaksi dan ungkapan yang dia gunakan, sangat tampak kalau Arief Darmawan tidak menghendaki Cahya. Sementara itu, juga sangat jelas bahwa DPP Partai Demokrat juga kurang menghendaki Arief Darmawan untuk mencalonkan diri sebagai Walikota atau Wakil Walikota Singapraja.

Dua hari setelah pemberitaan tersebut, terjadi keputusan penting yang dilakukan oleh Arief Darmawan. Diberitakan bahwa Arief Darmawan mngungurkan diri dari bursa pencalonan Walikota Singapraja. Arief Darmawan menyatakan mundur dari bursa pencalonan kepada pengurus DPC PD Kota Singapraja. Sikap resmi Arief Darmawan disampaikan pula dalam rapat resmi DPC PD Kota Singapraja. Ini dilakukan oleh Arief Darmawan saat masa pendaftaran calon Walikota dan Wakil Walikota Singapraja di KPU akan ditutup.

"Saya tidak maju lagi. Biar yang lain yang lebih mampu. Kalau saya banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk pilkada membutuhkan *cost* yang besar," kata Arief merendah saat dihubungi kemarin siang. Ia sudah menyampaikan sikapnya itu ke sejumlah pengurus PD Kota Singapraja, kemarin sore. "Nanti malam (semalam, Red.) ada rapat partai. Sikap ini akan saya sampaikan dalam rapat itu," sambung ketua DPRD Kota Singapraja ini.

Apakah mundur karena tekanan? Ditanya begitu, Arief langsung membantah. Dia menegaskan, tak ada tekanan dari siapa pun. Pengunduran dirinya, juga bukan karena ada masalah. Termasuk bukan karena ditinggal oleh kubu Dra Hj Wara Srikandi MAP. Baginya, dinamika tersebut memberi hikmah tersendiri. "Tuhan maha baik, Tuhan maha bijaksana dan Tuhan berikan keputusan terbaik untuk saya dan Demokrat," katanya.

Arief kukuh tak mau maju dalam pesta demokrasi Kota Singapraja itu setelah mempertimbangkan berbagai hal, walau sebelumnya ia sempat dipasangkan dengan Wara Srikandi. Ia beralasan, ingin fokus pada kemenangan PD dan tugas sebagai ketua dewan. Selanjutnya, ia ikut mencarikan figur lain yang diusung PD. "Saya akan tanyakan ke teman-teman, siapa yang layak diajukan. Tentu dengan parameter yang jelas," kata dia (Sumber Data pada lampiran 6: 5.68).

Setelah Arief Darmawan menyatakan secara resmi tidak akan ikut dalam pencalonan Walikota Singapraja, sejumlah nama bakal calon kembali muncul yang dikabarkan akan mencalonkan atau dicalonkan melalui PD. Di antaranya adalah Ketua Fraksi Demokrat DPR RI, Nurhayati Ali Assegaf, mantan Sekda Kota

Singapraja sebagaimana telah disebutkan, Cahya, serta tokoh sepak bola, Iwan Budianto.

Sebelum Arief mundur, sudah beredar sejumlah nama yang bakal running melalui PD. Yakni ketua Fraksi Demokrat DPR RI, Nurhayati Ali Assegaf, mantan Sekda Kota Singapraja, HM Nur dan tokoh sepak bola, Iwan Budianto. Namun sampai berita ini diturunkan, Singapraja Post belum berhasil mendapat konfirmasi terhadap tiga nama tersebut.

Sumber Singapraja Post memberi isyarat, HM Nur akan dipilih. Namun sumber lain menyebutkan nama Nurhayati Assegaf dan Iwan Budianto. Nama Nurhayati baru muncul terakhir pasca PD gagal mengusung Wara Srikandi. "Kepastiannya ditentukan malam ini (semalam). Jadi tunggu saja, " kata sumber Singapraja Post tersebut. Dari berbagai nama itu, nama HM Nur yang paling santer beredar (Sumber Data pada lampiran 6: 5.69).

Meskipun sudah menyatakan mundur dari bursa pencalonan Walikota Singapraja, perihal ketidak-setujuan Ketua DPD PD akan pencalonan Cahya tetap ditampakkan oleh Arief Darmawan. Perbedaannya, kalau pada awal tanggapan dia menyatakan tidak mengenal sosok Cahya, pada akhirnya sebagai Ketua DPC PD Kota Singapraja, dia merasa belum pernah diajak berkomunikasi.

Namun Arief Darmawan, justru mengaku tak mengenal sosok HM Nur. Bahkan dia tidak mengetahui HM Nur bisa masuk dalam bursa di Demokrat. "Saya belum ketemu sama sekali dengan Pak Nur. Juga belum pernah diajak berkomunikasi. Siapa yang bawa, saya tidak mengerti. Mestinya, say hello dulu ke kami, " kata dia.

Sampai kemarin siang, PD intens berkomunikasi dengan PKS, Hanura dan PKPB. Menurut sumber Singapraja Post lainnya, empat partai tersebut saling menjajaki untuk bangun koalisi besar. Hanya saja, belum ada keputusan siapa yang ditetapkan sebagai calon wali kota dan wawali. Tapi figur yang diusung PD dipastikan menjadi calon wali kota dari koalisi ini. Sedangkan figur yang dibawa PKS ditetapkan sebagai calon wawali. "Kami masih komunikasi. Belum bicara tentang pasangan, " kata Arief (Sumber Data pada lampiran 6: 5.70).



Selanjutnya, menurut penuturan Cahya, sebenarnya Wara Srikandi, dengan diantar oleh Sekda Kota Singapraja, M Joyodroto, telah berusaha mendapatkan rekomendasi dari DPP Demokrat dengan menemui Nurhayati Assegaf di Jakarta. Sebenarnya ada dua pengurus DPP Partai Demokrat yang mendapat limpahan kewenangan untuk menetapkan rekomendasi bagi calon Walikota Singapraja, yaitu Nurhayati Assegaf dan Soekarwo.

Ada perbedaan skenario menurut versi Cahya dengan versi Bagus Permadi tentang penolakan DPP PD untuk memberikan rekomendasi bagi Wara Srikandi. Menurut penuturan Cahya, isteri Walikota Singapraja tersebut datang menemui anggota DPP PD Nurhayati Assegaf. Namun demikian, sebenarnya sudah ada kesepakatan di antara DPP PD bahwa rekomendasi tidak akan diberikan kepada Wara Srikandi. Semula, apabila mendapatkan rekomendasi, Wara Srikandi akan berpasangan dengan HM Joyodroto, Sekretaris Daerah Kota Singapraja, yang ketika itu datang mengantar Wara Srikandi. Juga dikemukakan bahwa, saat pertemuan tersebut, Nurhayati Assegaf sempat mempersoalkan bahwa suami Wara Srikandi sudah menjabat dua periode, apakah akan diteruskan oleh isterinya?

Ketika mendapat pertanyaan tersebut, Wara Srikandi bersikukuh hendak maju sebagai calon walikota. Bila keberadaan suaminya yang menjadi walikota dua periode menjadi penghalang, maka dia siap menghilangkan penghalang hak politiknya tersebut. "Kalau Pak Bagus Permadi menjadi penghalang bagi hak politik saya untuk mencalonkan diri, saya siap berpisah dengan Pak Bagus Permadi,"demikian kata Cahya menirukan pernyataan Wara Srikandi kepada Nurhayati Assegaf (Sumber Data

pada lampiran 6: 5.71). Pernyataan ini sejalan dengan pernyataan Bagus Permadi bahwa pencalonan isterinya sebagai Walikota Singapraja merupakan hak asasi warga negara.

"Ini soal hak asasi manusia, sudah diatur di UUD 45 Pasal 27 dan Piagam PBB, " ujar ketua DPC PDI-P Kota Singapraja ini.

Menurut Bagus Permadi, yang juga Walikota Singapraja, pencalonan Wara Srikandi untuk menjadi wali kota Singapraja itu bukan termasuk pemerintahan dinasti. Karena istrinya termasuk warga negara dan berhak untuk mencalonkan itu.

"Kalau itu disahkan berarti DPR melanggar UU 45. Apalagi piagam PBB, " tegasnya. Menurutnya, saat ini perempuan harus mendapatkan kesempatan dan hak untuk memimpin sebuah pemerintahan (Sumber Data pada lampiran 6: 5.72).

Sesuai dengan kesepakatan DPP PD, rekomendasi tidak akan diberikan kepada Wara Srikandi. Namun demikian, tampaknya sebagai politisi Nurhayati tidak bisa menyampaikan secara langsung ketika itu juga, sehingga dia merasa harus menunggu lagi kesepakatan dari sesama pengurus DPP PD. Untuk itu, Nurhayati Assegaf meminta Wara Srikandi dan Joyodroto untuk pulang, dan kembali lagi hari Sabtu yang merupakan hari terakhir pendaftaran calon walikota di KPU Kota Singapraja.

Penuturan tersebut sangat berbeda dari yang disampaikan oleh Bagus Permadi. Bagus Permadi dan Wara Srikandi tidak merasa direndahkan dengan istilah tidak mencapatakan rekomendasi dari DPP PD. Istilah yang digunakan Bagus Permadi bukan Wara Srikandi tidak mendapatkan rekomendasi dari DPP Partai Demokrat, tetapi justru Wara Srikandi yang memutuskan untuk "batal menikah" dengan Partai Demokrat.

Merapatnya Partai Golkar ikut mengusung Wara Srikandi di Pilwali Kota Singapraja, terjadi pada Kamis dini hari (21/2/2013). Keputusan itu hanya beberapa saat setelah isteri Walikota Singapraja itu "batal menikah" dengan Partai Demokrat.

Drama rekam di sepertiga malam itu dikisahkan Bagus Permadi, Walikota Singapraja yang juga suami Wara Srikandi. Menurutnya, Rabu (20/2/2013), Wara Srikandi hampir seharian berada di Surabaya dan baru kembali ke Kota Singapraja, Kamis pagi (21/2/2013).

Di Surabaya, Bunda-panggilan Wara Srikandi, bertemu Ketum DPP Partai Demokrat (PD), Anas Urbaningrum dan Ketua Fraksi PD DPR RI, Nur Hasanah. "Nah, kesimpulannya, jam dua pagi (Kamis dinihari) saya ditelepon Bu Nur Hasanah. Kesimpulannya belum jadi. Karena belum jelas ya saya putus sampai di situ, " jelas Bagus Permadi. (Sumber Data pada lampiran 6: 5.73)

Pernyataan diplomatis Nurhayati Assegaf yang meminta Wara Srikandi menunggu hingga hari terakhir pendaftaran calon Walikota Singapraja, dipahami oleh Bagus Permadi sebagai penolakan secara halus yang justru mematikan peluang Wara Srikandi. Karena itu, Bagus Permadi membuat keputusan agar isterinya tidak perlu menunggu janji DPP PD dan menjalin koalisi dengan partai lain. Ini semua dilakukan karena Bagus Permadi merasa yakin bahwa mencalonkan diri melalui partai apa pun, Wara Srikandi tetap memiliki peluang besar untuk memenangkan Pilkada Kota Singapraja 2013. Karena itu, Bagus Permadi sudah menjalin komunikasi dengan partai-partai lain yang dia nilai bisa diatur agar mencalonkan Wara Srikandi sebagai Walikota, dan sosok lain dari partai koalisi untuk menjadi calon Wakil Walikota Singapraja (Periksa Lampiran 1, Gambar 5.16). Partai yang dimaksudkan adalah PAN Kota Singapraja dan Partai Golkar Kota Singapraja.



"Saya disuruh nunggu hingga Sabtu. Prediksi saya, bisa saja saya digunting di ujung permainan. Saya ini orang politik, ndak bisa terima begitu saja. Politik itu sama dengan bahasa Inggris, baca dan tulisannya beda, " sambung Bagus Permadi. Nah, beberapa saat setelah deal dengan PD berakhir, Bagus Permadi lantas menjalin hubungan dengan Partai Golkar (PG), (Sumber Data pada lampiran 6: 5.75).

Tampak pada kutipan tersebut, Bagus Permadi merasa cukup cerdas untuk memahami bahasa diplomatis Nurhayati Assegaf. Dia mengibaratkan sebagai Bahasa Inggris yang ada perbedaan antara tulisan dengan bacaan, sebagaimana ada perbedaan antara ucapan dengan maksud sebenarnya Nurhayati Assegaf. Diucapkan agar menunggu, tetapi maksud sebenarnya adalah menghalangi kemungkinan Wara Srikandi mencalonkan diri sebagai Walikota Singapraja, paling tidak melalui Partai Demokrat.

Menurut penuturan Cahya, pernyataan dan keputusan Bagus Permadi tersebut tidak terlepas dari hasil komunikasinya dengan Raden Kumara. Dituruakan bahwa di tengah ketidak-pastian apakah mendapat rekomendasi dari DPP PD atau tidak, Raden Kumara menghubungi Bagus Permadi agar berhenti mengharap rekomendasi untuk Wara Srikandi dari DPP PD, serta harus bergerak cepat untuk mendapatkan pasangan calon sekaligus koalisi partai yang memenuhi persyaratan untuk bisa mendaftarkan diri ke KPU Kota Singapraja. Cahya mengaku bahwa sebelum menghubungi Bagus Permadi, terlebih dulu Raden Kumara memastikan bahwa Cahya tidak maju sebagai calon Walikota Singapraja, sehingga posisi Wibisono dari Partai Golkar yang semula diminta oleh Raden Kumara untuk tidak aktif mencari pasangan calon, menjadi sama sekali bebas.

Setelah pertemuan bersama Pak Karwo, saya dan Pak Kumara memang terus berkomunikasi. Ketika itu saya lupa, siapa yang menelpon, saya atau Pak Kumara. Tetapi intinya, saya ditanya apakah jadi maju atau tidak? Kalau jadi maju, akan berpasangan dengan siapa? Nah, karena ternyata Ibu Nurhayati Assegaf dari DPP PD, tidak berani mengambil keputusan karena Ketua DPC PD sepertinya hendak maju sendiri, walaupun kemudian tidak jadi, maka saya sampaikan kalau saya tidak jadi maju. Kita maju kan harus dengan perhitungan. Kalau maju hanya didukung oleh PD Kota Singapraja, peluangnya sangat kecil. Cukup untuk mencalonkan, tetapi sulit menang. Jadi saya tegaskan saja ke Pak Kumara, kalau saya tak jadi maju. Silahkan Pak Wibisono dipasangkan dengan siapa? Begitu ceritanya (Sumber Data pada lampiran 6: 5.76).

Dari penuturan tersebut, segera tampak betapa penting peran Raden Kumara dalam proses pemasangan Wara Srikandi dengan Wibisono, sekaligus betapa menentukan peran Raden Kumara dalam proses pemerolehan legalitas bakal calon Wara Srikandi dan Wibisono. Terkait persoalan ini, dari tiga kali kegiatan wawancara cukup lama antara penulis dengan Cahya, penulis mengetahui ada kedekatan hubungan antara sejumlah aktor politik di Singapraja Raya sebagaimana sempat disinggung pada bab sebelumnya. Salah satu aktor yang bukan termasuk politisi praktis, tetapi sangat menentukan dalam setiap kegiatan Pilkada adalah Raden Kumara.

Ada beberapa informan yang bisa memberikan informasi tentang Raden Kumara dan peran pentingnya dalam Pilkada Kota Singapraja 2013. Informan kuncinya adalah Cahya. Selanjutnya, diperoleh tambahan informasi dari Healthy Luckystiono (PG), Wibisono (PG), Balarama (PAN), dan Mohan Katelu (PAN). Sebagaimana dituturkan oleh Cahya, memang tidak mudah untuk bisa bertemu dan berbicara langsung dengan Raden Kumara.

Pak Kumara itu orangnya gampang-gampang susah. Banyak orang dengan berbagai kepentingan selalu datang ke rumahnya. Pernah saya telpon kalau mau ke rumahnya. Dia menjawab “Jangan! Saya saja yang ke Pak Nur di Yamin atau Sutami”. Makanya seluruh wawancara saya dengan Pak Kumara selalu kami lakukan di rumah Puncak Yamin atau di rumah Bendungan Sutami. Hehehehe... yang paling terkesan, setiap kali HP-nya ditelpon, ternyata nada deringnya suara adzan (Sumber Data pada lampiran 6: 5.77).

Keakraban Cahya dengan Raden Kumara bermula saat Cahya menjabat sebagai Sekretaris Kota Singapraja, yang ketika itu Walikotanya adalah Suyitno. Sebagaimana diketahui, Raden Kumara adalah penguasa yang bergerak antara lain dalam pembangunan perumahan kelas menengah ke atas di kawasan Singapraja Raya, sehingga senantiasa berhubungan dengan baik Bupati dan Wakil Bupati Singapanji, Walikota dan Wakil Walikota Singapraja, Walikota dan Wakil Walikota Selopuro, para pimpinan dan anggota DPRD Kota Singapraja, Kota Singapraja dan Kota Selopuro, para Komandan Kodim, Kapolres dan Kapolresta, hingga para Kepala Dinas di ketiga daerah otonom Singapraja Raya.

Setahu saya, Pak Kumara mulai berkibar sejak Reformasi 1998. Saat para pengusaha lain megngistirahatkan kegiatannya karena ketidak-pastian dan risiko tinggi yang mungkin terjadi karena Reformasi, Pak Kumara justru mulai mengembangkan usahanya, terutama di bidang properti. Sehingga kawasan Singapraja Raya seolah dikuasai oleh Pak Kumara. Semula hanya dominan secara ekonomi, tetapi karena punya kepentingan untuk mengamankan dan mengembangkan usahanyanya, Pak Kumara mulai ikut memberikan pengaruh kepada dunia politik, khususnya dalam Pemilihan Kepala Daerah. Dulu waktu saya mencalonkan diri, walaupun sistem pemilihanya tidak langsung, juga tidak terlepas dari pengaruh Pak Kumara. Pengaruh besarnya karena saat itu para calon kepala daerah biasanya tidak punya modal sendiri. Kesempatan punya, tetapi modal tidak punya (Sumber Data pada lampiran 6: 5.78).



Sebagai pengusaha, Raden Kumara dikenal memiliki strategi yang “luar biasa”, karena dia tidak pernah hanya menjagokan atau mendanai satu pasangan calon kepala daerah, tetapi beberapa dan bahkan semua pasangan calon dijagokan dan didanai. Dengan demikian, menurut informasi Cahya, Raden Kumara tidak pernah benar-benar kalah besar.

Semua dijagokan dan didanai. Nah, pinternya Pak Kumara itu, kalau hasil survai elektabilitas tinggi, dia mau mendanai besar. Kalau hasil survai elektabilitasnya rendah, maka dana yang dipinjamkan juga kecil. Jadi salah kalau masyarakat mengatakan bahwa Pak Kumara menjagokan pasangan A-B, dan tidak menjagokan pasangan B-C. Karena itu, siapa pun yang terpilih dan dilantik, sebenarnya tetap saja merupakan jago dan orangnya Pak Kumara. Begitu biasanya. Tetapi kebiasaan itu tidak dilakukan saat Pilkada Kota Singapraja 2013. Pak Kumara tidak secara langsung mendukung dengan dana kepada salah satu pasangan calon. Jadi semacam abstain (Sumber Data pada lampiran 6: 5.79).

Informasi bahwa pada Pemilukada Kota Singapraja 2013, Raden Kumara tidak terlibat dalam pendanaan para pasangan calon walikota dan wakil walikota juga dibenarkan oleh Healthy Luckystiono (PG). Menurut politisi Partai Golkar ini, pasangan Wara Srikandi-Wibisono memang sudah tidak membutuhkan dana tambahan untuk memenangkan Pemilukada Kota Singapraja 2013.

Jujur *nggih*, Pak Bagus Permadi kan sudah menjabat walikota dua periode. Jadi sudah cukup banyak modal yang bisa dikumpulkan untuk mencalonkan Bunda Wara. Sedangkan Pak Wibisono, semua juga tahu kalau beliau ini kan politisi lugu. Hanya punya dukungan dari PASMANTEB, tidak punya modal sendiri. Jadi kalau pilihan langsung, kami yang dari Golkar saja pesimis bisa menang. Sempat bingung juga Pak Wibisono waktu tidak ada satupun bakal calon lain yang mau menggandengnya dengan alasan tidak punya modal. *Melas*. Karena partai kecil Hanura saja akhirnya tidak mau bergabung dengan Pak Wibisono. Makanya terus ke Jakarta untuk konsultasi dengan DPP Golkar. Ternyata DPP sendiri juga tidak punya keputusan yang jelas, hanya bisa memberi rekom. Makanya kami merasa senang dan optimis waktu waktu

Pak Bagus Permadi memanggil pulang Pak Wibisono untuk dipasangkan dengan Bunda Wara. Kalau nggak seperti itu, jelas Pak Wibisono tidak bisa mencalonkan (Sumber Data pada lampiran 6: 5.80).

Telah diketahui, ketika sebelum tahapan Pemilukada yang sebenarnya, para bakal calon walikota dan bakal wakil Walikota Singapraja sudah melakukan sosialisasi, termasuk membentuk komunitas-komunitas pendukung sesuai jargon masing-masing. Untuk Ir. Gunawan Wibisono misalnya telah memiliki slogan PASMANTEB (Produktif, Aspiratif, Solutif, Maju Mandiri, Agamis, Nasionalis, Tertib Aman, Ekonomi Kerakyatan, Bersih Berbudaya) dan memiliki sejumlah besar anggota dan simpatisan yang juga menggunakan nama yang sama, yakni komunitas PASMANTEB (Periksa Lampiran 1, Gambar 5.17).

Perihal alasan Raden Kumara merasa perlu memasangkan Wara Srikandi dengan Wibisono, dijelaskan dengan ringkas oleh Cahya sebagai berikut:

Sejak saya kalah dalam Pilkada tak langsung dulu, setiap kali bertemu atau telpon selalu saja saya ditanya kesediaan saya untuk maju lagi. Tapi waktu Pilkada langsung yang pertama itu, ibu saya tidak mengizinkan maju sebagai calon walikota. Hingga beliau meninggal, saya juga sudah tidak tertarik untuk maju. Nah sewaktu saya mulai berubah pikiran dan menemui Ibu Nurhayati Assegaf, yang juga didukung oleh Pak Dhe Karwo, ternyata permintaan saya agar bisa berpasangan dengan calon dari partai lain tidak bisa diwujudkan, dan hanya dari Partai Demokrat, saya pilih tidak jadi mencalonkan diri. Karena itu, Pak Kumara bebas untuk mendukung siapa saja. Hingga Pak Kumara berniat memasangkan Wara Srikandi, dengan meminjam kurni milik PAN, dengan Wibisono dari Golkar. Itu sudah cukup. Hanya Pak Kumara bilang kalau secara pribadi dia tidak ikut *cawe-cawe* karena dalam hal dana. “Pak Bagus Permadi saja sudah cukup kok”, begitu katanya. Lagi pula, “Saya nggak enak sama keduanya, Pak Bagus Permadi dan Bu Yayuk, kalau harus

berpihak kepada salah satunya” Begitu katanya (Sumber Data pada lampiran 6: 5.81).

Masih ada pertanyaan penting yang belum terjawab berkenaan dengan alasan mengapa para pengurus PAN tidak mengajukan calon sendiri, tetapi justru membolehkan Wara Srikandi menggunakan hak PAN untuk mengajukan calon. Selain sempat disinggung oleh Cahya, wawancara bersama Balarama dan Mohan Katelu (DPD PAN Kota Singapraja), menunjukkan bahwa PAN memang tidak berniat mengajukan calon sendiri, tetapi mengikuti apa kehendak Bagus Permadi dan Raden Kumara.

Kita itu realistis saja. Selain tidak punya tokoh yang masuk dalam peringkat atas dalam survai yang ada, jumlah kursi sedikit, hanya empat, nggak bisa maju sendiri. Nah jumlah kursi legislatif empat juga itu kan cermin kalau PAN tidak bisa mencalonkan sendiri sebagai walikota. Jadi kita mendukung saja yang selain memiliki kerjasama baik juga bakal calonnya punya hasil survai bagus. Sudah lama saya bekerja sama dengan Pak Bagus Permadi, tidak hanya di politik tapi juga di sepakbola dan lain-lain. Terus Bu Bagus Permadi juga punya hasil survai sangat menjanjikan. Makanya kami percayakan kepada Pak Bagus Permadi saja, mau berpasangan dengan siapa. Kalau jadi walikota kan berarti walikotanya dari PAN, baru wakilnya dari partai lain (Sumber Data pada lampiran 6: 5.82).

Berkenaan dengan proses untuk memasang Wara Srikandi dan Wibisono, Cahya menjelaskan bahwa setelah dirinya positif tidak mencalonkan, Raden Kumara menghubungi Bagus Permadi agar menelpon dan memanggil pulang ke Kota Singapraja baik Wara Srikandi yang sedang menunggu kepastian dari Nurhayati Asegaf (DPP Partai Demokrat) di Jakarta maupun Wibisono yang sedang menunggu arahan dari DPP Partai Golkar. Kepada Wibisono, Bagus Permadi diminta untuk menyampaikan bahwa atas saran Raden Kumara, dirinya akan dipasang dengan



Wara Srikandi dengan posisi sebagai Calon Wakil Walikota. Wibisono diminta pulang ke Kota Singaperaja, dan akan dijemput di Bandara Abdurrahman Saleh untuk terus ke kediaman Bagus Permadi yang terletak di Kepanjen Kabupaten Singaperaja, dan berangkat mendaftarkan diri ke KPU Kota Singaperaja.

Waktu itu Anas bertemu Pak Dhe Karwo bersama Nurhayati Assegaf di Grahadi, Surabaya. Pak Karwo tetap meminta saya berpasangan dengan calon dari Golkar. Tapi kondisi berubah, karena waktu itu masuk Arif, Ketua Demokrat dan mau maju. Saya tidak mau. Jadi semua terus bingung, padahal waktu sudah mepet.

Terus kenapa Pak Bagus Permadi ke Golkar? Itu karena bingung tidak ada kepastian. Tapi ini sindikat, ini sindikat. Yang mengatur juga kan Raden Kumara. Waktu pertemuan di Surabaya Raden Kumara ikut. Waktu itu yang meminta saya ke Pak Karwo memang Raden Kumara. Jadi semua biaya dari Raden Kumara, tapi yang mengganti Pak Karwo. Demikian kondisi seperti ini, sedangkan waktu itu Raden Kumara sudah bilang ke Golkar supaya diam saja. Ikut saja apa keputusan dia nanti.

Jadi yang menggantung Ketua Golkar itu sebenarnya Raden Kumara. Demikian saya tidak jadi maju, daripada nggak jelas akhirnya Bagus Permadi dipanggil Raden Kumara, diberitahu kalau belum tentu mendapat rekomendasi dari Demokrat. Pak Bagus Permadi disuruh menurut Raden Kumara saja. Nanti dia yang mengatur. PAN kan sudah jelas mendukung atau ikut Raden Kumara, dengan Golkar ditambah partai-partai kecil, sudah cukup untuk mencalonkan. Jadi akhirnya Bu Bagus Permadi berpasangan dengan Wibisono, karena waktunya juga sudah mepet (Sumber Data pada lampiran 6: 5.83).

Rangkaian kejadian yang dituturkan oleh Cahya tidak sama dengan versi yang disampaikan oleh Healthy Luckystiono, seorang anggota DPRD Kota Singaperaja dari Fraksi Partai Golkar. Menurut Healthy Luckystiono, hingga waktu pendaftaran semakin mendekati penutupan, Wibisono yang ketika itu masih berada di Jakarta menunggu kebijakan DPP Partai Golkar, tetap belum mendapatkan kepastian. Bersamaan dengan itu, Bagus Permadi berkomunikasi Ridwan Hisyam dan Soenaryo,

dua fungsionaris DPD Partai Golkar Jawa Timur. Ketika itu, Bagus Permadi sudah memastikan bahwa Wara Srikandi tidak mungkin menunggu rekomendasi dari DPP PD. Justru yang sudah dipastikan adalah bahwa Wara Srikandi sudah mendapatkan persetujuan dari DPD PAN Kota Singapraja, DPW PAN Jawa Timur dan bahkan DPP PAN untuk mencalonkan diri melalui PAN.

Diketahui sebelumnya, karena jumlah perolehan kursi yang tidak mencukupi, maka Wara Srikandi masih memerlukan koalisi yang bahkan lebih besar. Karena itu, dengan menghubungi Ridwan Hisyam dan Soenaryo, mewakili Wara Srikandi, Bagus Permadi menjajaki kemungkinan untuk berkoalisi dengan Partai Golkar dalam pencalonan walikota atas nama Wara Srikandi.

Selanjutnya, kisah perpasangan antara Wara Srikandi dengan Wibisono relatif sama dengan yang dituturkan oleh Bagus Permadi kepada media massa. Menurut Bagus Permadi, dengan memperhatikan gejala yang ada, serta waktu yang sudah sangat sempit, sudah bisa dipastikan bahwa DPP Partai Demokrat tidak akan memberikan rekomendasi kepada Wara Srikandi. Bagus Permadi mengibaratkan fenomena itu seperti fenomena Bahasa Inggris. Ada perbedaan antara tulisan dengan bunyinya. Artinya, ada perbedaan antara perkataan Nurhayati Asegaf dengan maksud yang sebenarnya. Perkataannya diminta menunggu, tetapi maksudnya tidak akan diberikan rekomendasi.

Apa yang sama sekali tidak disinggung oleh penuturan Bagus Permadi kepada media massa adalah latar belakang Wibisono bersedia dipasangkan dengan Wara Srikandi. Sebagaimana diketahui, problema terbesar yang dihadapi oleh Wibisono

adalah tidak memiliki modal uang untuk pencalonan dan kampanye Pemilu. Sementara itu, lobi Wibisono ke DPP Golkar tidak mendapatkan hasil. Karena itu, ketika Wibisono dihubungi oleh Raden Kumara agar berpasangan dengan Wara Srikandi, dengan kedudukan sebagai calon wakil walikota, dia pun menyetujui dan langsung kembali ke Singapraja. Ketika itu, Wibisono juga dihubungi oleh Bagus Permadi agar segera kembali ke Singapraja, dan langsung menuju di kediaman Bagus Permadi yang berada di Kepanjen.

Perihal Wara Srikandi, dengan PAN sebagai partai yang mencalonkan, yang ternyata berpasangan dengan Wibisono, dengan Partai Golkar sebagai partai yang mencalonkan, memang belum pernah dimunculkan baik dalam wacana masyarakat maupun media massa. Karena itu, saat mereka mendaftarkan diri di KPU, pemberitaan tentang pasangan calon walikota dan wakil walikota ini cukup menarik perhatian.

Wara Srikandi, isteri Walikota Singapraja Bagus Permadi, bikin kejutan. Saat mendaftar ke KPUD Kota Singapraja, Kamis (21/02/2013), kader PDIP yang tak dapat rekom dari DPP ini maju Pilkada melalui Partai Golkar dan meninggalkan Partai Demokrat. Padahal sesuai rencana, Wara Srikandi yang populer dengan sebutan Bunda Wara ini akan mencalonkan diri sebagai Calon walikota melalui Partai Demokrat dengan menggandeng Arief Dharmawan sebagai calon wakil walikotanya.

Namun, ketika mendaftar, Bunda Wara yang diantar Bagus Permadi justru menggandeng Ketua DPD Golkar Kota Singapraja, Wibisono sebagai wakilnya. Saat mendaftar ke KPUD, Bunda Wara dan Wibisono ini mengklaim didukung belasan partai. Di antaranya, Partai Golkar, PAN, Partai Republikan Nusantara dan lain sebagainya. Jumlahnya sebanyak 17 partai. Hampir seluruh kader dari partai tersebut ikut mengantar Bunda Wara dan Wibisono mendaftar ke KPUD Kota Singapraja (Sumber Data pada lampiran 6: 5.84).



Sebelumnya, memang ada sejumlah partai yang diberitakan akan ikut koalisi yang mendukung Wara Srikandi. Beberapa partai dimaksud, yang cukup besar adalah PKS, disusul oleh Partai Hanura dan partai-partai lain yang tidak memiliki kursi di DPRD, yaitu: PDS dan PKPB. Namun saat Wara Srikandi mendaftarkan diri bersama Wibisono, partai-partai yang semula diberitakan akan mendukung mereka justru tidak terlihat.

Jadi, sebagaimana dikemukakan oleh Bagus Permadi, yang ketika itu baru saja dibebaskan tugas dari jabatannya sebagai Ketua DPC PDIP Kota Singapraja Wara Srikandi meninggalkan Partai Demokrat karena partai ini tidak memberikan jawaban pasti. Kalimat Nurhayati Assegaf yang berkali-kali disebutkan oleh Bagus Permadi adalah bahwa Bunda Wara dijanjikan baru akan direkom Jumat atau Sabtu. Karena itu, Bagus Permadi menyatakan tidak mau menunggu. Ini juga dikemukakan oleh Bagus Permadi usai pendaftaran di KPUD Kota Singapraja.

Setelah itu, lanjut Bagus Permadi, fungsionaris Golkar, Ridwan Hisyam mengontak dirinya. Menurut Bagus Permadi, Golkar mengajak bangun Kota Singapraja bersama-sama. Sehingga, terjalinlah komitmen untuk mendaftarkan Bunda Wara menjadi calon Walikota Singapraja. Sedangkan wakilnya adalah Wibisono.

Karena itu, Bunda Wara dan Wibisono diantar para kader tidak hanya dari Golkar dan PAN. Namun, belasan partai non-parlemen lainnya yang ikut gabung mengusung pasangan tersebut. Usai menerima pasangan cawali Wara Srikandi -Wibisono, Ketua KPUD Kota Singapraja Hendri ST berjanji akan melakukan verifikasi berkas pendaftaran yang diserahkan pasangan calon. "Jika ada kekurangan, nanti kami akan beritahu untuk melengkapinya sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, " katanya (Sumber Data pada lampiran 6: 5.85).

Selain berhasil mendominasi DPC PDIP Kota Singapraja, Bagus Permadi memang dikenal dekat dengan beberapa pengurus partai politik lain, terutama pengurus DPD PAN Kota Singapraja. Sosok pengurus DPD PAN Kota Singapraja yang dikenal dekat dengan Bagus Permadi adalah Lokh Mahfuds dan Balarama. Dengan kedua orang ini pula Bagus Permadi bisa dengan leluasa melakukan politik transaksional, sehingga bisa mendapatkan rekomendasi DPP PAN untuk isterinya, Wara Srikandi. PAN Kota Singapraja memiliki 4 (empat) wakil rakyat di DPRD Kota Singapraja.

Ketika Wara Srikandi sudah mendapatkan rekomendasi dari DPP PAN sebagai calon walikota, sebenarnya belum bisa mendaftarkan diri karena tidak memiliki pasangan calon wakil walikota. Sementara itu, meskipun memiliki 5 (lima) anggota legislatif di DPRD Kota Singapraja, bakal calon walikota dari Golkar juga belum mendapatkan pasangan. Ketika itu, sebagaimana dikisahkan oleh Healthy Lukistiyono, Kader Partai Golkar yang juga anggota DPRD Kota Singapraja, Wibisono masih berada di Jakarta untuk berkonsultasi mengenai kedudukan dan kepastiannya untuk maju dalam pencalonan walikota dengan DPP Golkar.

Menurut penuturan Healthy Lukistiyono, pemasangan Wara Srikandi sebagai calon walikota dan Wibisono sebagai wakil walikota merupakan sebuah "anugerah", karena sebenarnya posisi Wibisono sudah "mati". Selain tidak memiliki pasangan, Wibisono juga tidak memiliki modal sama sekali untuk biaya pencalonan dan kampanye Pemilukada. Diturunkan bahwa ketika tiba di Bandara Abdurahman Saleh, Wibisono terlihat merasa ragu ketika masih melihat di papan iklan adagambar Wara Srikandi masih berpasangan dengan Arief Dharmawan (Bundar). Karena keraguan

tersebut, Wibisono kemudian meminta kepada Rudi untuk menuju ke salah satu Hotel di Kota Singapraja. Rudi merupakan salah satu kader Partai Golkar di Kota Singapraja yang ketika itu menjemput Wibisono di Bandara Abdurahman Saleh. Rudi kemudian diminta Wibisono untuk menyiapkan beberapa hal sebagaimana diminta Bagus Permadi ketika Wibisono masih berada di Jakarta.

Setelah semua permintaan dipersiapkan, Wibisono berangkat menuju kediaman Bagus Permadi di Kapanjen. Sementara itu, sesuai permintaan Wibisono, para pengurus DPD Partai Golkar dan sejumlah kader partai, berangkat secara terpisah juga menuju ke kediaman Bagus Permadi di Kapanjen. Sesampai di Kapanjen, Wibisono disambut secara pribadi dengan penuh sukacita oleh Bagus Permadi. Seperti tamu kehormatan yang memang sudah ditunggu kedatangannya, Wibisono tidak hanya oleh Bagus Permadi, tetapi juga para pendukung Bagus Permadi dan Wara Srikandi.

*Sampek* di Singapraja *teko mudhun jleg ndok* Bandara, "Lho kok Bundar (sebutan untuk sosialisasi Bunda Wara Srikandi dan Arief Dharmawan)? Pak Bagus Permadi *opo guyon iki*. Mati aku!" Pak Wibisono *ngomong ngene pak*. Pak Wibisono tidur di salah satu hotel *plek*. "*Wis* Pak Rudi tolong kondisikan. Tolong persiapkan apa yang diminta Pak Bagus Permadi tadi malam. Perintahnya kan satu, baju kebesaran Golkar, kondisi persiapan untuk mendaftar ke KPU. Itu tolong dilengkapi nanti digabung dengan Bunda". Lha sudah kami siapkan itu untuk Pak Wibisono.

*Ngono iku* Pak, pengurus sekaliber aku saja, Fraksi pak aku ini, *gak ana sing weruh*. Pak Wibisono dengan perangkatnya *iku* malu kalau *gak dadi*, Pak Wibisono *iku* sebenarnya malu Pak. Enam milyar hilang. Nah di situlah Pak kondisi Pak Wibisono. Tapi saya *gak* tahu komitmennya bagaimana *pas* itu pokoknya. Itulah *untunge* Pak Wibisono. Terus Pak Wibisono telpon Pak Bagus Permadi. "Pak Bagus Permadi saya sudah di Singapraja. Skarang saya di sini, di hotel".

"Pak Wibisono kami tunggu, sudah kami tunggu. Pintu gerbang di kapanjen terbuka lebar untuk Pak Wibisono. Pak Wibisono tamu agung saya". *Ngono*



*iku Pak. Gendeng pokok e. Iku bener-bener injury time. Yang sangat-sangat gila iku Pak. Bener, jam 10 lebih 15 menit Pak Wibisono mlebu ndok kono, dhueng! Kuaget pak. Ndek kono iku ada massa banyak Pak. Pak Wibisono teko mudhun jlek, Pak Bagus Permadi metu. Pak Wibisono jian nguene (sambil mengacungkan jempol). Koyok wong mabuk Pak Bagus Permadi njoget-njoget Pak, njoget-njoget. Terus Pak Wibisono masuk terus, "Selamat Datang Pak Wibisono". Kabeh kaget, "Hidup Golkar, hidup Golkar". Ngono Pak Pak Bagus Permadi kaget eh... Pak Wibisono iku kaget (Sumber Data pada lampiran 6: 5.86).*

Telah dikemukakan, Sunaryo, salah satu fungsionaris DPD Partai Golkar Jawa Timur, merasa optimistis dengan pasangan Wara Srikandi dengan Wibisono. Menurutnya, ketika itu merupakan saat yang tepat bagi kader Partai Golkar untuk memimpik Kota Singapraja. Sementara itu, Roffiq Awalli, sekretaris DPD PAN Singapraja, menyatakan bahwa pemilihan Wara Srikandi utami sebagai calon dari PAN merupakan hasil dari dinamika perkembangan politik yang kapan pun bisa berubah. Dijelaskan oleh Roffiq Awalli, bahwa DPD PAN Kota Singapraja didatangi oleh Wibisono pada jam 11.00 WIB. Setelah melalui pembicaraan dengan Pengurus DPD PAN Kota Singapraja, akhirnya PAN bersedia melakukan kesepakatan politik dengan Partai Golkar untuk bersama-sama mencalonkan pasangan Wara Srikandi yang atas nama PAN dan Wibisono yang atas nama Partai Golkar.

Sikap optimistik juga ditunjukkan oleh Wara Srikandi bahwa bersama Wibisono, dirinya dapat memenangkan Pilkada Kota Singapraja. Menurut Wara Srikandi, sama sekali tidak ada persoalan dari partai apa yang mencalonkan dirinya, karena dia merasa sudah mendapatkan rekomendasi dari rakyat secara langsung.

"Bunda ini sudah mendapat rekom dari rakyat langsung" jelasnya. Disinggung mengenai dirinya yang tidak dapat "restu" dari PDIP Bunda dengan tenang menjawab bahwa dirinya selama ini tidak merisaukan hal itu, "ya tetep santai, jalan, " lanjutnya.

Terkait posisinya sebagai bendahara PDIP dengan majunya sebagai N-1 Bunda menyatakan bahwa sampai saat ini dirinya masih tetap sebagai Bendahara partai. "Yang dibekukan cuma Bapak (Bagus Permadi) dan Mas Wiji (Wijiyanto), saya masih tetap PDIP, kalau nanti diberi sanksi silakan, hati saya tetap PDIP, " tegasnya (Sumber Data pada lampiran 6: 5.87).

Melalui pengumuman yang dibuat oleh DPC PDIP Kota Singapraja, Ketua Edi Rumpoko dan Sekretaris Priyamoko Utomo, berdasarkan SK Nomor 245/KPTS/DPP/III/2013 tentang Pemecatan Bagus Permadi dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Singapraja; SK Nomor 246/KPTS/DPP/III/2013 tentang Pemecatan Wara Srikandi dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Singapraja, dan SK Nomor 247/KPTS/DPP/III/2013 tentang Pemecatan Wijianto, dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Singapraja (Sumber Data pada lampiran 6: 5.88).

Akhirnya, dengan diarak oleh ratusan pendukung yang kebanyakan merupakan mantan kader PDIP yang selanjutnya memakai atribut Red Army, Wara Srikandi dan Wibisono, dengan diantar oleh Bagus Permadi mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Walikota Singapraja dan Wakil Walikota Singapraja, pada hari Kamis, 21 Februari 2013. Juga tampak jelas kalau Bagus Permadi masih mengenakan kaos merah, walaupun kemudian dibalut dengan jaket hitam (Periksa Lampiran 1, Gambar 5.18).

Karena waktu yang mendesak, sebagaimana diberitakan, berkas pendaftaran pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Singapraja ini tidak semuanya diketik, khususnya nama Wibisono yang ditulis tangan. Walaupun demikian, secara legal

formal, pendaftaran pasangan ini dinyatakan sah oleh KPU Kota Singapraja. Beberapa persyaratan lain diminta untuk segera dilengkapi dan disetorkan ke KPU Kota Singapraja. Namun, dengan telah diterimanya berkas pendaftaran pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota ini, maka dapat disimpulkan bahwa meskipun melalui proses yang panjang dan berliku, akhirnya pasangan Wara Srikandi dan Wibisono mendapatkan legalitas sebagai calon walikota dan wakil Walikota Singapraja.

Selang sehari setelah pendaftaran, tampak ada kegiatan di gedung yang sedianya oleh Bagus Permadi akan dijadikan kantor DPC PDIP Kota Singapraja, yang terletak di Jalan Mayjen Sungkono Kota Singapraja (Periksa Lampiran 1, Gambar 5.19). Akhirnya, melengkapi posko pemenangan Dadi yang lain, gedung itu dialih-fungsikan oleh Bagus Permadi sebagai salah satu posko pemenangan Dadi, serta digunakan untuk kampanye tertutup pasangan Wara Srikandi -Wibisono untuk memenangkan Pilkada Kota Singapraja.

Pengamatan terakhir yang peneliti lakukan, menunjukkan bahwa selain digunakan untuk berbagai acara yang bersifat pribadi, juga digunakan untuk acara-acara yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan PDIP. Sebagai contoh, untuk deklarasi *Red Army* sebagai Organisasi Kemasyarakatan (25 Agustus 2013), Kongres Tandingan PB HMI (8 s.d. 14 November 2013), dan deklarasasi Perempuan Koalisi Merah Putih Kota Singapraja yang mendukung Pendukung Prabowo-Hatta (24 Juni 2014).



### 3. Rangkuman Strategi Pemerolehan Legalitas *Nepos*

Setelah berhasil mendapatkan dukungan dari hasil Musker PAC sebagai calon walikota, Bagus Permadi berusaha unjuk kekuatan dukungan, baik melalui hasil survai, mengerahkan massa pada saat pendaftaran bakal cawalikota di DPC PDIP Kota Singapraja, menekan DPD Jawa Timur dengan mengajukan mosi tidak percaya bersama sejumlah pengurus DPC PDIP di Jawa Timur, juga membangunkan “kantor baru” DPC PDIP Kota Singapraja agar isterinya mendapat rekomendasi dari DPP PDIP. Tetapi ternyata gagal.

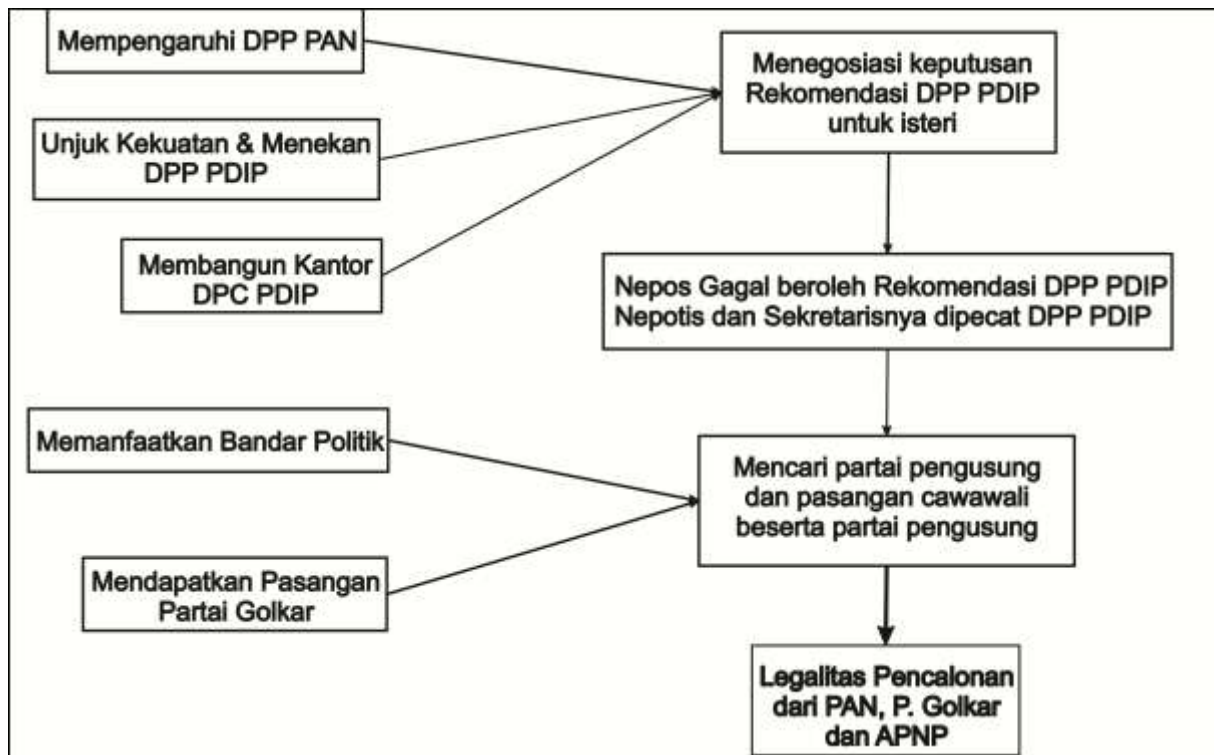
Karena sudah tidak memungkinkan lagi untuk mencalonkan diri sebagai calon perseorangan atau yang lebih dikenal dengan calon independen, maka Bagus Permadi menegosiasi DPD PAN Kota Singapraja agar bisa mencalonkan isterinya. Mengikuti pengaturan yang dilakukan oleh Raden Kumara, seorang pengusaha properti yang memiliki pengaruh besar dalam perpolitikan di Singapraja Raya, Bagus Permadi setuju untuk memasangkan Wara Srikandi dengan Wibisono dari Partai Golkar. Kesiediaan Wibisono, yang mengorbankan PASMANTEB sebagai komunitas pendukungnya yang bersifat lintas partai, disetujui tidak saja oleh DPP Partai Golkar yang cenderung pasif, tetapi juga oleh DPD Partai Golkar Jawa Timur. Sedianya, Wibisono akan dipasangkan dengan Cahya, yang ternyata tidak jadi mencalonkan diri melalui Partai Demokrat karena permintaan Cahya untuk berpasangan dengan calon dari partai selain Partai Demokrat tidak bisa disetujui oleh DPP Partai Demokrat dan DPD Partai Demokrat Kota Singapraja. Karena itu, baik Wibisono maupun Wara Srikandi, sama-sama gagal merealisasikan berbagai komitmen politiknya dengan

partai-partai lain, sehingga sama-sama tidak memiliki pasangan untuk mencalonkan diri sebagai Walikota dan Wakil Walikota Singapraja pada Pilkada Kota Singapraja 2013.

Dengan berbagai cara yang rumit dan berliku-liku tersebut, sebagaimana tampak pada gambar 5.18, akhirnya Wara Srikandi mendapatkan legalitas untuk pencalonan dari DPP PAN dan DPP Golkar, karena berpasangan dengan Wibisono. Secara legal-formal, dengan dukungan dari PAN dan Partai Golkar, sebenarnya pasangan Wara Srikandi dan Wibisono sudah memenuhi persyaratan untuk pencalonan sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Singapraja (2013-2018). Karena itu, kalau pasangan ini juga melibatkan Asosiasi Partai Non Parlemen (APNP), tujuannya bukan untuk kepentingan legalitas, melainkan untuk peningkatan elektabilitas.

Memperhatikan keadaan demikian, bisa diduga bahwa Wara Srikandi tidak bisa lagi mengandalkan suara dari kader dan simpatisan PDIP secara penuh, juga tidak bisa mengandalkan suara dari kader PAN secara penuh. Akan halnya Wibisono, pada gilirannya mendapatkan penolakan justru dari para relawan dan simpatisan yang semula bergabung dalam PASMANTEB, yang memang menghendaki dirinya untuk mencalonkan sebagai Walikota dan bukan Wakil Walikota Singapraja (Periksa Lampiran 1, Gambar 5.18). Sejumlah gejala ini perlu dikemukakan karena diduga akan berhubungan dengan strategi peningkatan elektabilitas dan hasil akhir atau perolehan suara pasangan Wara Srikandi dan Wibisono.

Secara keseluruhan, siasat yang dilakukan nepotis untuk mengupayakan legalitas pencalonan nepos dengan pasangannya bisa digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 5.20: Siasat dalam mendapatkan legalitas**

Tampak dalam gambar (Gambar 5.20), ada perubahan mendasar berkenaan dengan partai yang mencalonkan nepos, sehingga juga mempengaruhi segala strategi peningkatan elektabilitas nepos dan pasangannya. Pasangan nepos, tidak hanya berusaha mengandalkan loyalitas pribadi, tetapi juga berupaya mengganggu loyalitas kepada partai (PDIP) yang mengajukan calon lain.



### C. Strategi Peningkatan Elektabilitas

Kendati sama-sama merupakan pemilihan umum (*general election*), ada perbedaan penting antara pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden dengan pemilihan anggota legislatif. Dalam pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden, cenderung berlaku apa yang disebut *The Winner Takes all*. Artinya, dalam pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden, tidak ada gunanya sama sekali kalau kalah dalam perhitungan suara walaupun perbedaannya sangat tipis. Hasilnya sama saja dengan seandainya kalah tanpa mendapatkan suara yang signifikan. Sementara itu, kemenangan walaupun dengan perbedaan sangat tipis, tetap saja menang dan mendapatkan semua hak politik sebagai konsekuensi dari kemenangan tersebut.

Ada implikasi penting dari keberlakuan ungkapan "Pemenang Mengambil Semuanya". Salah satunya adalah pertarungan yang seolah-olah mempertaruhkan semua yang dimiliki agar bisa memenangkan proses pemilihan tersebut. Bila popularitas para calon cenderung seimbang, misalnya sebagaimana ditunjukkan oleh hasil survai elektabilitas, maka bisa diduga bahwa segala cara akan diupayakan agar bisa memenangkan persaingan politik dimaksud. Kondisi demikian sangat nampak pada Pilkada Kota Singapraja 2013.

Meskipun sedikit menyinggung sejumlah strategi peningkatan elektabilitas yang digunakan oleh Pasangan Calon Kepala Daerah yang lain, uraian berikut lebih memusatkan perhatian pada berbagai strategi yang digunakan oleh pasangan Wara Srikandi dan Wibisono, yang didukung oleh walikota petahana Bagus Permadi untuk

meningkatkan elektabilitas pasangan calon nomor urut 3, dari lima pasangan calon Kepala Daerah Kota Singapraja.

Sejumlah strategi dilakukan oleh Pasangan Wara Srikandi dan Wibisono (Dadi), untuk meningkatkan elektabilitas mereka, terutama sejak mereka resmi menjadi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Singapraja (2013-2018). Beberapa strategi tersebut bisa dikelompokkan menjadi enam strategi, yaitu: (1) Pemanfaatan Organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), (2) Pemanfaatan Media Massa; (3) Pemanfaatan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan, (4) Penggunaan Sumberdaya Pemerintah Daerah, (5) Pembentukan Tim Pemenangan dan Juru Kampanye, dan (6) Mutasi Pejabat Daerah dan Pengendalian Strategi Pemenangan.

#### 1. Pemanfaatan Organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Sebagaimana sudah dibahas, baik pada uraian tentang jejaring politik nepotisme daerah maupun strategi peningkatan popularitas *nepos*, Organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) memiliki sejumlah karakteristik yang memberikan kemungkinan bagi *nepotis* dan *nepos* untuk memanfaatkannya baik untuk peningkatan popularitas maupun elektabilitas calon kepala daerah *nepos*.

Karakteristik pertama berkenaan sifat organisasi PKK yang memiliki hubungan keorganisasian khusus dengan Kepala Daerah dan Pemerintah Daerah. Hubungan demikian memungkinkan PKK menjadi satu-satunya NGOGO yang mendapatkan bantuan sumberdaya publik secara rutin dan berkesinambungan, baik

dalam bentuk bantuan dari anggaran daerah maupun pemanfaatan prasarana dan sarana, serta sumberdaya manusia milik Pemerintah Daerah. Melalui kegiatan sepanjang tahunnya, PKK bisa menjadi sarana peningkatan popularitas dan elektabilitas sepanjang waktu bagi Wara Srikandi selaku Ketua TP PKK.

Ada dan bisa Mas. Maksud saya PKK ada dananya dari APBD. Tidak besar tetapi rutin. Dan itu hanya dimiliki oleh PKK. Tidak ada organisasi lain yang mendapat jatah APBD rutin seperti PKK. Kan memang dari dulu PKK dibentuk sebagai mitra pemerintah, jadi memang khusus. Bisa kapan saja mengadakan kegiatan di balai kelurahan, kantor kecamatan dan sebagainya. Kan memang kantor PKK selalu di Kelurahan, Kecamatan dan Balai Kota? Nah pasti kalau ada kegiatan PKK di Kelurahan, sarana dan prasarannya, termasuk yang menyiapkan-nyiapkan ya bersama antara pengurus PKK Kelurahan dengan perangkat kelurahan. Lebih-lebih kalau Bu Wali datang. Itu bukan tugas PKK saja, tetapi juga seluruh perangkat kelurahan untuk menyiapkan dan menyambutnya. Orang yang mengantarkan surat ke pengurus dan anggota PKK saja pegawai kelurahan kok. Belum lagi yang menyiapkan tempat, meja kursi, pengeras dan snack atau minuman. Jadi kalau ada gawe PKK Kelurahan, ya sama saja itu gawenya Kelurahan (Sumber Data pada lampiran 6: 5.91).

Perihal kemelekatan kegiatan PKK Kelurahan dengan organisasi Pemerintah Kelurahan sebenarnya sudah sangat tampak dari senantiasa ditematkannya Kantor Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kelurahan dengan Kantor Pemerintah Kelurahan (Periksa Gambar 5.18), sehingga setiap kegiatan PKK Kelurahan senantiasa juga menjadi kegiatan, atau paling tidak senantiasa memanfaatkan prasana publik perkantoran dan Balai Kelurahan (Periksa Lampiran 1, Gambar 5.21).



Karakteristik kedua berkenaan dengan cakupan program kerja yang bisa bersentuhan atau disinergikan tugas pokok dan fungsi berbagai SKPD. Kendati, tidak memiliki sumberdaya sendiri, misalnya, melalui jejaring politik nepotisme daerah, PKK bisa ditampilkan kehadiran dan perannya secara sangat menonjol. Dengan hanya memperbanyak acara seremonial yang melibatkan SKPD dan PKK saja, secara empirik sudah menciptakan ruang kampanye bagi Wara Srikandi selaku Ketua TP PKK Kota Singapraja. Kesempatan demikian sangat jelas tidak dimiliki oleh para calon kepala daerah lain, terkecuali mereka menyelenggarakan sendiri yang tentu saja juga dengan mengandalkan sumberdaya milik pribadi.

Ya sebenarnya bukan hanya Dispenda. PKK itu memang bisa bekerjasama dengan semua Dinas. Pemeriksaan dan pengobatan gratis, misalnya, ya tinggal kontak Dinas Kesehatan. Pasti ada dokter dan biasanya juga Puskesmas setempat. Jadi ya sekalian obatnya. Biasanya sih ya obat yang tersedia di apotik Puskesmas. Kalau yang seperti ini sebenarnya sekolah juga bisa. Tapi kalau perorangan, seperti calon walikota yang lain, ya jelas tidak bisa! Selama menjelang kampanye sampai saat kampanye kan terus ada kegiatan beginian. Judulnya macam-macam, tetapi Bu Bagus Permadi pasti hadir. Ya kadang memberi sambutan kadang tidak, hanya menampakkan diri terus bicara-bicara dengan warga masyarakat yang datang (Sumber Data pada lampiran 6: 5.93).

Ketiga, jaringan dan struktur organisasi PKK. Tidak hanya dalam ranah (*domain*) kegiatan, PKK memiliki cakupan yang sangat luas hingga bersentuhan dengan semua tugas pokok dan fungsi SKPD, tetapi juga dalam wilayah (*region*), PKK juga memiliki jaringan dan struktur organisasi yang mencakup seluruh wilayah, mulai dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan, dusun, rukun warga, rukun tetangga, hingga persepuluhan keluarga. Karena itu, bagi calon kepala daerah *nepos*, PKK bisa

dimanfaatkan sebagai wahana dan mesin kampanye yang bersifat massif dan terstruktur. Disebut massif karena menjangkau sejumlah besar warga masyarakat, dan disebut terstruktur karena memiliki jaringan terorganisasi dari tingkat kota hingga tingkat desa wisma atau sepuluh keluarga. Jaringan demikian juga sangat jelas tidak dimiliki oleh calon kepala daerah lain, terkecuali yang bersangkutan secara khusus membentuknya.

Lebih rame itu bukan di Kelurahan, tapi justru di RW. Kalau kegiatan di kelurahan itu yang datang paling pengurus PKK RW, RT, dan dasawisma. Tapi kalau Bu Bagus Permadi datang di PKK RW, semua ibu-ibu se-RW pasti datang. Kesempatan itu yang digunakan oleh Ibu-ibu untuk minta apa-apa gitu ke Bu Bagus Permadi. Yang pengurus Jamaah Yasinan atau tahlilan, kadang minta seragam atau pengeras suara. Kalau yang pengurus PKK Kelurahan, tidak usah meminta pun pasti mendapat jatah, minimal seragam khusus. Saya juga dapat, malah belum saya jahitkan. Ada kain batik dengan gambar model baju, ada kaos gambar Bu Bagus Permadi, terus ada juga fulpen yang ada tanggalannya. Lucu fulpennya, soalnya ada kayak layar gulung yang bisa ditarik terus mengeluarkan kalender bergambar Bu Bagus Permadi. Tapi kadang-kadang ibu-ibu itu ya ada *ngelamaknya*. Sudah dikasih lengkap untuk dirinya, suaminya, dan anak-anak, eh.... biasanya masih minta ongkos jahit. Murah sih kalau ukuran di sini, sekitar dua puluh lima ribu rupiah. Gitu itu biasanya Bu Bagus Permadi ya pasti mengabdikan, terutama untuk pengurus PKK. "Kalau dikasih, mau bantu saya apa tidak?", begitu kata Bu Bagus Permadi. Ya namanya juga asal menjawab, semua kan kepingin *dapet*, jadi ya kompiang menjawab "mau mau mau... siap siap siap". Begitulah ibu-ibu PKK di sini (Sumber Data pada lampiran 6: 5.94).

Dari uraian tersebut tampak bahwa secara permukaan, para pengurus PKK bisa menjadi atau dijadikan mesin politik yang jauh lebih massif dan terstruktur dibanding dengan misalnya para pengurus partai tingkat anak ranting. Selain itu, ada perbedaan penilaian oleh masyarakat antara menerima sesuatu melalui pengurus partai dengan melalui PKK. Seakan-akan sama sekali tidak bermasalah kalau

menerima pemberian dari PKK, sedangkan kalau menerima dari pengurus partai, tidak jarang harus bersitegang dengan tetangga sekitar yang menjadi simpatisan, anggota, atau kader partai lain. Berikut adalah gambar paket dan model seragam batik PKK yang dibagikan oleh Wara Srikandi kepada para pengurus PKK tingkat Kelurahan (Periksa Lampiran 1, Gambar 5.22).

Berdasarkan wawancara penulis dengan berbagai narasumber data terkait PKK, serta kasus contoh pendistribusian paket seragam khusus dari Wara Srikandi tersebut, diperoleh temuan bahwa PKK juga bisa dimanfaatkan sebagai jaringan yang mapan dan mencakup seluruh wilayah untuk mendistribusikan atribut kampanye dan bahkan semacam uang lelah untuk para relawan dan simpatisan Wara Srikandi, terutama dari kaum perempuan yang sudah berkeluarga.

Dalam kampanye yang sebenarnya, sebagaimana dijadwalkan dan diatur oleh KPU Kota Singapraja, ternyata PKK juga digunakan oleh Wara Srikandi untuk sumber rekrutmen para relawan kampanye untuk menjadi semacam panitia pelaksana setempat kegiatan kampanye. Mereka ini tidak saja mempersiapkan dan menjalankan kegiatan yang ditetapkan oleh Tim Sukses Wara Srikandi - Wibisono, tetapi juga dengan leluasa tidak memisahkan antara kegiatan dan sumberdaya PKK dengan kegiatan dan sumberdaya kampanye pemilihan kepala daerah yang diikuti oleh Wara Srikandi dan Wibisono. Peluang demikian, sudah barang tentu tidak dimiliki oleh pasangan calon kepala daerah yang lain yang ikut dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Singapraja 2013.



## 2. Pemanfaatan Media Massa

Telah banyak kajian tentang pengaruh media massa terhadap cara berpikir, berpendapat dan bertingkah-laku masyarakat. Pengaruh ini tentu saja tidak terlepas dari tiga fungsi sosial komunikasi massa, yaitu: informasi, edukasi dan hiburan. Dalam praktik politik, ketiga fungsi sosial media tersebut memang masih ada, tetapi cenderung disubordinasikan di bawah label besar komunikasi persuasif. Artinya, dengan sengaja media massa digunakan oleh para politisi untuk mempersuasi khalayak pendengar, pembaca, dan pemirsa agar menyetujui apa yang dipesankan dalam media massa tersebut. Dengan ungkapan lain, media massa telah menjadi salah satu sarana kampanye berhasil mengambil alih sebagian besar fungsi kegiatan kampanye konvensional, seperti rapat umum, peraga di ruang publik, atribut kampanye, dan kampanye tatap muka antar pribadi.

Salah satu kekuatan media massa sebagai sarana kampanye adalah kemampuannya untuk membentuk citra positif calon kepala daerah tertentu, sekaligus pembentukan citra negatif calon kepala daerah lainnya. Selain itu, kampanye menggunakan media massa memiliki kelebihan sendiri karena sifatnya yang bisa mengakomodasi dan menguatkan berbagai bentuk kegiatan kampanye konvensional. Akomodasi dan penguatan itu, misalnya, dilakukan dengan memberitakan kembali berbagai kegiatan kampanye konvensional. Karena itu, selain bisa diatur gaya dan muatan pemberitaannya, juga sangat jelas bahwa pemuatan berita kegiatan kampanye konvensional akan memperluas daya jangkau kepada khalayak yang lebih luas.

Sebuah contoh yang sangat jelas mengenai pemanfaatan media massa sebagai penguat kegiatan kampanye konvensional adalah pemberitaan dan advertorial terkait kegiatan kampanye di Lapangan Amprong (08 Mei 2013). Kampanye itu sendiri, menghadirkan dua juru kampanye, yaitu Bagus Permadi dan Endang Agustini Syarwan Hamid. Sehari setelah kegiatan kampanye rapat umum tersebut, Singapraja Post (09 Mei 2013) menurunkan berita berjudul "Masyarakat Blimbing Siap Menangkan Dadi". Selain terbit dalam versi cetak, pemberitaan ini juga muncul dalam pemberitaan on line, berikut kutipan beritanya:

Antusiasme masyarakat terhadap program Calon Walikota dan Wakil Walikota Singapraja, Wara Srikandi-Wibisono sungguh luar biasa. Hal itu terbukti dengan kehadiran ribuan warga Kecamatan Blimbing di Lapangan Amprong, pagi kemarin. Mereka berbondong-bondong mengikuti Gerak Jalan „Blimbing Membara“ yang diadakan pasangan DaDi. Dalam kesempatan tersebut, tampak hadir juru kampanye DaDi, Bagus Permadi dan Endang Agustini Syarwan Hamid yang notabene anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Golkar. Keduanya datang langsung untuk membakar semangat ribuan kader dan simpatisan partai pendukung DaDi. “Ojok Lali, ayo kita menangkan DaDi,” pekik Bagus Permadi lantang. Doa menegaskan, Kota Singapraja akan semakin cerdas, sehat dan sejahtera jika DaDi memimpin Kota Singapraja. Hal senada juga dikatakan oleh Endang Agustini. Menurutnya, tidak ada nego lagi pemimpin yang pas untuk Kota Singapraja, kecuali hanya Bunda Wara Srikandi dan Bung Wibisono. “Ayo, pingin semua tuntas pilih yang pas. Bunda Wara Srikandi dan Bung Wibisono,” serunya dihadapan ribuan massa. Sementara itu calon walikota dambaan masyarakat Kota Singapraja, Bunda Wara Srikandi menegaskan kembali komitmennya untuk menggebrak program satu tahun Kota Singapraja berubah. “Kita akan berjuang semaksimal mungkin bersama masyarakat, untuk menjadikan Kota Singapraja berubah dalam satu tahun,” tuturnya (Sumber Data pada lampiran 6: 5.96).

Ternyata, sehari setelah pemberitaan betapa luar biasa kampanye di Lapangan Amprong Blimbing tersebut, terbit advertorial berjudul "Ribuan Masyarakat Blimbing Tamplek Blek Siap Menangkan Dadi" (Surya, 10 Mei 2013). Setelah

membandingkan antara isi berita Singapraja Post (09 Mei 2013) berjudul "Masyarakat Blimbing Siap Menangkan Dadi", dengan advertorial (Surya, 10 Mei 2013) berjudul "Ribuan Masyarakat Blimbing Tumpuk Blek Siap Menangkan Dadi", bisa disimpulkan bahwa kedua tulisan dengan judul dan status berbeda tersebut, pada dasarnya identik. Diduga kuat bahwa penulis, baik secara perseorangan maupun tim, antara kedua tulisan berita dan advertorial tersebut adalah sama. Artinya, tim penulis advertorial adalah seorang wartawan, yang mungkin saja senior dan berstatus sebagai redaktur Singapraja Post.

Perbedaan mendasar antara keduanya berkenaan dengan status tulisan tersebut. Singapraja Post menurunkan tulisan tersebut sebagai berita bermuatan kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Wara Srikandi dan Wibisono, sedangkan Surya menurunkan tulisan tersebut sebagai kampanye yang dikemas dalam bentuk mirip berita (*advertorial*). Dari kasus ini pula bisa diketahui media massa mana yang dalam bekerjasama cukup berani menurunkan standar objektivitasnya sebagai surat kabar berita, serta media massa mana yang dalam bekerjasama masih berusaha mempertahankan objektivitasnya dengan membedakan antara tulisan kategori berita dengan tulisan kategori iklan berbentuk mirip berita yang lazim disebut *advertorial*. Selain bisa dikenali dari penyajian visualnya, *advertorial* juga bisa dikenali dari identifikasi kode di akhir tulisan. Dalam tulisan kategori berita, senantiasa ditutup dengan kode wartawan peliput atau penulisnya, yang dalam kasus Singapraja Post misalnya (tom/mar/sir), sedangkan dalam tulisan kategori *advertorial* senantiasa ditutup dengan kode khusus, yang dalam kasus Surya



adalah *adv*, sebagaimana tampak dalam gambar berikut (Periksa Lampiran 1, Gambar 5.23).

Sebagai politisi berpengalaman, Bagus Permadi termasuk politisi yang tampak meyakini akan peran penting media massa dalam meningkatkan elektabilitas calon kepala daerah. Ini tampak dari kesediaannya untuk menjalin kerja sama, atau lebih tepat lagi kesediaannya memanfaatkan media massa untuk meningkatkan elektabilitas pasangan Wara Srikandi dan Wibisono.

Sebagaimana diakui oleh para wartawan yang meliput berbagai kejadian di Singapraja Raya, kerjasama antara media massa dengan Bagus Permadi untuk popularitas dan elektabilitas Wara Srikandi telah dilakukan jauh sebelum tahapan Pilkada Kota Singapraja 2013 resmi dimulai. Seorang wartawan mengemukakan bahwa surat kabar tempat dia bekerja sudah menjalin kerjasama dengan Bagus Permadi cukup lama. Walaupun dia mengemukakan bahwa nilai kontrak kerjasama tersebut cukup tinggi, secara pasti dia tidak bisa menyebutkan, karena yang terlibat langsung dalam kerjasama tersebut adalah *general manager* surat kabar yang bersangkutan bersama Bagus Permadi yang bertindak mewakili Pemerintah Kota Singapraja. Dalam praktiknya, pihak Bagus Permadi tidak menjalin kerjasama dengan satu media massa, tetapi sekaligus beberapa media massa. Selain itu, di luar kerjasama, pihak Bagus Permadi juga bisa memanfaatkan media massa yang tidak terikat kerjasama permanen.

Media centernya tim DADI itu kan katanya yang terbaik. Kan selalu memberi berita-berita, kemudian kan media masa sedikit banyak sesuai dengan

buktinya bukan untuk memenangkan, tetapi memberitakan apa adanya. Itu kan tidak berpengaruh sama sekali. Padahal biayanya sangat besar, bisa dibayangkan begini, taruhlah misalnya 100 juta untuk setiap media. Berarti 1 M kan habis itu, untuk media, itu media cetak elektronik, belum media iklan baliho dan sebagainya. Tapi persisnya berapa saya tidak mengetahui pasti karena yang berurusan langsung adalah pimpinan (Sumber Data pada lampiran 6: 5.98).

Kendati pernah diyakini bahwa media massa memiliki pengaruh kuat dalam pembentukan citra positif calon kepala daerah, tetapi juga jelas bahwa masyarakat juga semakin belajar dalam melihat media massa. Sebagaimana dikemukakan oleh seorang wartawan, bahwa sekarang ini masyarakat sudah semakin mengetahui bahwa apa yang terdapat atau dimuat media massa memiliki beberapa kategori tulisan, yaitu: (1) tulisan kategori berita, (2) tulisan kategori berita "pesanan", (3) tulisan kategori iklan mirip berita (*advertorial*), (4) tulisan dan gambar iklan layanan masyarakat, dan (5) tulisan dan atau gambar iklan komersial.

Dari kelima jenis muatan media massa tersebut, tentu yang memiliki kredibilitas tinggi adalah tulisan kategori berita yang objektif, yang benar-benar melaporkan kejadian sebagaimana adanya. Tulisan kategori berita objektif sebagaimana dikemukakan oleh Khusnun Djuraid, mantan Pimpinan Redaksi Singapraja Post, yang juga dikenal sebagai wartawan senior di Singapraja Raya, adalah semacam penulisan ulang terhadap peristiwa yang terjadi, baik berupa kejadian maupun yang belakangan juga semakin banyak berupa tuturan seseorang terkait suatu isu tertentu. Sebaliknya berita pesanan adalah berita yang memang sudah kehilangan objektivitasnya karena memang dibuat sesuai dengan kehendak orang yang membayar baik kepada wartawannya maupun kepada media massa yang

menerbitkan. Sebagaimana dikemukakan oleh wartawan senior tersebut, bahwa pembaca media cetak cenderung tidak memberikan simpati kepada berita pesanan, karena merupakan salah satu bentuk pembohongan.

Harus dikemukakan bahwa dalam penelitian ini, penulis tidak bisa meneliti secara lebih mendalam untuk jenis media elektronik radio dan televisi. Namun demikian, sebagaimana dituturkan oleh seorang wartawan media massa online, pada apa yang terjadi pada media cetak pada dasarnya sama dengan yang terjadi di radio dan televisi.

Sebenarnya sama saja kok kejadiannya. Apakah di TV atau di koran sama saja. Kadang memang ada berita yang dibuat untuk memberikan keuntungan tertentu kepada pihak tertentu. Terlihat dari pilihan kata dan kalimatnya, atau bahkan juga responden yang menjadi sumber berita. Kalau ada berita kampanye yang disebut dihadiri oleh segelintir orang, maka pasti tujuannya memberikan keuntungan kepada pihak yang menjadi pesaing dari yang kampanye tersebut. Lho, gitu itu juga saat misalnya wartawan mengambil gambar kegiatan kampanye. Ada yang dengan sengaja menampilkan sudut yang banyak orangnya, tetapi juga ada yang malah mem-foto atau memberitakan yang negatif (Sumber Data pada lampiran 6: 5.99).

Dalam kesempatan yang sama, wartawan lain menegaskan bahwa keberpihakan seorang wartawan dan redaktur media massa bisa muncul dari prakarsa orang lain, tetapi juga bisa muncul dari prakarsa wartawan itu sendiri. Lazimnya, pemberitaan positif atau negatif yang dibuat atas prakarsa wartawan justru dimaksudkan untuk mendekati atau merintangi calon kepala daerah tertentu.

Lucu juga kok kadang itu. Berita itu bisa dibuat sebagai alat pendekatan. Misalnya dengan berita-berita positif, harapannya kan kemudian terjali komunikasi untuk dipermanenkan, semacam tahu sama tahu. Lha... lucunya itu kalau ternyata cara begitu tidak berhasil, maka besoknya bisa terbit berita yang negatif. Kalau kemudian ada yang mempertanyakan, jawabannya justru



itu yang namanya objektif. Baik beritakan baik, buruk beritakan buruk. Padahal cari berita buruk dan cari berita baik itu sama-sama gampang. Berita bisa dipakau *mbujuk*, tapi juga bisa dipakai *nggepuk*. Tapi itu tidak semua wartawan lho. Sebuah media massa nasional yang punya anak perusahaan di Singapraja misalnya, sangat ketat soal itu. Kalau ketahuan langsung dipecat. Kalau yang lokal, apalagi yang terbitnya tidak tentu, ya wartawannya cari rejeki sendiri-sendiri (Sumber Data pada lampiran 6: 5.100).

Sebagai contoh adalah sebuah berita tentang penertiban berbagai reklame di ruang publik yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Singapraja. Berdasarkan pengamatan peneliti, sebelum para bakal calon walikota memperkenalkan diri melalui reklame di ruang publik, sudah ada begitu banyak reklame yang memperkenalkan Bunda Wara Srikandi sebagai calon Walikota Singapraja. Setelah berlangsung hampir lima bulan, diberitakan bahwa Dinas Pendapatan Kota Singapraja mendapat teguran dari BPK karena banyaknya iklan ternyata tidak berhubungan dengan jumlah pemasukan dari sektor pajak reklame.

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Singapraja ditegur Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Teguran tersebut terkait dengan pemasangan reklame bakal calon walikota (bacawali) yang selama ini bertebaran tidak dikenai pajak. "Padahal sesuai regulasi setiap reklame itu harus membayar pajak. Masalah reklame Bacawal itu tidak ditarik pajak, karena kehilafan kami. Sebab, menurut BPK yang namanya calon itu sudah ditetapkan KPUD. Sementara mereka masih belum, jadi wajib bayar pajak reklame," jelas Kepala Dispenda Kota Singapraja, Mardioko didampingi Kabag Humas Pemkot Singapraja, Sapto di ruang Humas, Rabu (4/12/2012). Dia menjelaskan, bahwa selama ini memang reklame Bacawal itu digratiskan. Mereka tidak ditarik pajak. Akibatnya, pendapatan asli daerah (PAD) Kota Singapraja dari pajak reklame kehilangan potensi pajak reklame itu sekitar Rp 4,19 miliar (Sumber Data pada lampiran 6: 5.101).

Tiga hari kemudian, memang Pemerintah Kota Singapraja menurunkan Satpol PP Kota Singapraja untuk menertibkan berbagai reklame calon Walikota Singapraja

yang sudah mulai bertambah dengan sejumlah bakal calon walikota lainnya. Gejala yang menurut peneliti menarik adalah bahwa sebenarnya yang paling banyak melakukan pelanggaran sejak awal melalui reklame-reklame pinggir jalan secara massif adalah Wara Srikandi, hingga menimbulkan sebutan Bunda Penunggu Pohon, tetapi yang diberitakan sebagai pihak yang paling tertib adalah justru Wara Srikandi.

Calon Wali Kota Singapraja, Bunda Wara Srikandi sudah jauh-jauh hari mengikuti aturan Pemkot Singapraja terkait reklame. Bahkan, dirinya sudah mencopot sendiri reklame bergambar dirinya yang banyak terpasang di pohon yang tidak berpajak, sebelum Satpol PP menertibkan reklame bergambar para calon wali kota.

Menurutnya, tidak semua reklame bergambar dirinya berasal darinya langsung. Ada yang langsung darinya, ada juga yang dipasang partainya dan juga para pendukungnya. Untuk semua reklame yang terpasang diusahakan untuk dapat membayar pajak reklame sesuai dengan ketentuannya, khususnya reklame yang dipasang darinya.

“Sebelum Satpol PP menertibkan reklame calon-calon wali kota yang terkait dengan pajak reklame, Bunda sudah lebih dulu menertibkan reklame bunda. Karena Bunda ingin taat aturan dan Kota Singapraja tetap indah,” kata Bunda Wara Srikandi kepada Singapraja Post (Sumber Data pada lampiran 6: 5.102).

Bila pembacaan terhadap berita tersebut dilakukan dengan pendekatan analisis wacana kritis, sangat tampak bahwa penulis berita memang sedang menampilkan Wara Srikandi sebagai sosok calon Walikota Singapraja yang bercitra sangat positif. Penyebutan secara lengkap namanya, pengaburan antara kenyataan dengan pernyataan seseorang. Kalimat pertama misalnya, ditampilkan bukan sebagai kutipan pernyataan, tetapi laporan kenyataan. Juga digambarkan bahwa dari sekian banyak reklame untuk dirinya, hanya sebagian yang dia sendiri memasangnya. Selebihnya merupakan partisipasi dari partainya, dimana ketika itu dirinya adalah Bendahara DPC PDIP Kota Singapraja, serta dari para pendukungnya.

Bila berita ini dikaitkan secara langsung dengan akhir dari perjuangannya mendapatkan rekomendasi DPP PDIP, jelas terdapat kejanggalan. Bagaimana mungkin partai yang mendanai bakal calon walikota dengan begitu banyak reklame, akhirnya tidak memberikan rekomendasi dan malah memecatnya dari kedudukannya sebagai Bendahara sekaligus sebagai anggota PDIP? Kesimpulannya sebenarnya sederhana, karena berita tersebut sebenarnya sekedar pemanfaatan setiap kejadian untuk tetap berkampanye melalui media massa. Tentu saja, semua itu dilandasi oleh saling pengertian dan kerjasama antara media massa dengan Wara Srikandi.

Demikian juga bila dikaitkan antara pernyataannya yang hendak menjadi panutan dalam membayar pajak melalui kerjasama TP PKK dengan Dispenda Kota Singapraja, keinginannya mematuhi aturan yang berlaku di Kota Singapraja, serta semangatnya untuk menjaga ketertiban dan keindahan Kota Singapraja.

“Bunda menggunakan reklame bando dan semuanya dilakukan kontrak dengan pemilik bandonya. Kontrak itu sudah termasuk pajak yang harus dibayarkan kepada Pemkot. Semua reklame bunda sudah bayar pajak kepada Pemkot,” ungkapnya.

Kedepannya, bunda juga akan memasang reklame-reklame lainnya, termasuk saat peringatan Hari Ibu nantinya. Banyak reklame yang akan dipasang dan tentunya akan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, termasuk pajak dan keindahan kota. “Keindahan kota tetap harus dijaga. Bunda tidak ingin wajah kota terganggu dengan reklame. Karena itu keindahan kota tetap harus terjaga, Kota Singapraja harus tetap indah dan bersih,” tambahnya (Sumber Data pada lampiran 6: 5.103).

Pernyataan tersebut tampak bertentangan dengan penilaian yang diberikan oleh banyak warga Kota Singapraja, bahwa reklame-reklame calon Walikota Singapraja jelas-jelas mengganggu keindahan Kota Singapraja. Sebagaimana



diberitakan Surya (13 Mei 2013), bahwa para "Calon Walikota Merusak Pohon". Dalam berita tersebut, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Singapraja menyebutkan bahwa sebanyak 59 alat peraga atau reklame pasangan calon Wara Srikandi dan Wibisono telah dicopot karena dipasang dengan dipaku di pohon-pohon pinggir jalan Kota Singapraja.

Dari perbedaan cara pemberitaan tersebut juga tampak, ada kecenderungan yang berbeda antara satu media massa dengan media massa lain, dalam arti media massa tertentu cenderung memberikan secara positif Wara Srikandi sedangkan media massa yang lain masih bisa menjaga objektivitasnya. Padahal, dari klip yang dikumpulkan oleh peneliti, media massa yang dalam beritanya tergolong objektif tersebut merupakan salah satu surat kabar yang menerima order iklan dalam bentuk advertorial, poster, dan komik bersambung sangat banyak. Berikut adalah beberapa contoh iklan, baik dalam bentuk *advertorial*, poster maupun komik bersambung di surat kabar yang dimaksud.

Sebuah komik iklan yang dimuat Surya (08 Mei 2013), ternyata dari segi isinya juga identik dengan pemberitaan Singapraja Post (09 Mei 2013) dan advertorial Surya (10 Mei 2013). Sekali lagi ini menunjukkan bahwa baik berita kategori "pesanan", tulisan kategori iklan mirip berita (*advertorial*), tulisan dan atau gambar iklan komersial yang di antaranya berbentuk komik, dibuat atau dikembangkan oleh tim yang sama, karena menunjukkan kata kunci, kalimat inti, dan pesan yang identik. Baik pada berita pesanan yang dimuat Singapraja Pos (09 Mei 2013), advertorial Surya (10 Mei 2013) maupun pada iklan berbentuk komik (Surya

08 Mei 2013), misalnya, terdapat pernyataan "Mau Tuntas Pilih yang Pas". Ketidacermatan tim media massa yang bekerja untuk Wara Srikandid dan Wibisono, bisa ditemukan pada perbedaan tokoh yang mengucapkan kalimat tersebut. Singapraja Post memberitakan kalimat tersebut diucapkan oleh Endang Agustini, *advertorial* Surya menyebutkan kalau kalimat tersebut diucapkan oleh Syarwan Hamid, sedangkan dalam komik iklan, kalimat tersebut diucapkan oleh Wibisono (Periksa Lampiran 1, Gambar 5.24).

Berdasarkan perbandingan lebih mendalam, kalau perbandingan berita dan *advertorial* dilakukan antara Singapraja Post dengan Surya, tampak sangat identik. Dengan ungkapan lain, berita Singapraja Post adalah *advertorial* Surya. Kalaupun terjadi perbedaan, pilihan kata yang digunakan dalam *advertorial* terkesan jauh lebih mengunggulkan dan meninggikan pasangan Wara Srikandi dan Wibisono bila dibandingkan dengan yang bisa dibaca pada berita Singapraja Post. Sebagai contoh, dalam pemberitaan Singapraja Post (11 April 2013) berjudul *Beasiswa untuk Kader NU*, sedangkan dalam *advertorial* berjudul *Kampus NU Merestui, Muhammadiyah Langsung Oke: Dukungan dan Apresiasi Positif ke Pasangan DADI* (12 April 2013).

Langkah pasangan Wara Srikandi-Wibisono menyongsong Pemilu, 23 Mei mendatang terus mendapatkan apresiasi positif dari publik. Kali ini, dukungan moril disuntikkan langsung oleh civitas Universitas Islam Singapraja (Unisma) yang notabene kampus Islam berbasis Nahdlatul Ulama (NU) di Kota Singapraja. *Meski netral dalam urusan politik, pihak Unisma sangat apresiatif terhadap pemimpin Kota Singapraja yang peduli dengan pendidikan Islam. Karena sudah saatnya Singapraja yang dikenal sebagai Kota Pendidikan menjadi barometer pengembangan pendidikan Islam tingkat nasional.*

Harapan tersebut dilontarkan perwakilan Unisma saat pasangan Bunda Wara Srikandi dan Bung Wibisono (DaDi) berkunjung ke sana, Kamis (11/4) siang kemarin. Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Walikota Singapraja 2013-2018 itu disambut oleh *Rektor Unissi, Prof Dr Surachmat M.Si beserta jajaran stafnya, mulai dari Pembantu Rektor, pengurus yayasan, dekan dan beberapa dosen.*

*Mewakili pihak kampus, Pembantu Rektor III Unissi, Dr H Masykuri Bakri MSi berharap banyak kepada pasangan DaDi. "Kami berharap ada pemimpin yang mau memikirkan pendidikan berbasis Islam. Dari pembicaraan kami dengan Bunda Wara Srikandi dan Bung Wibisono, keduanya ternyata sepaham dengan keinginan dan harapan kami,"* ungkapnya. Niatan itu direspon positif oleh pasangan DaDi. *"Kami memang mengusung visi akan membawa Kota Singapraja menjadi barometer pendidikan nasional. Termasuk di dalamnya pendidikan Islam. Karena itulah, saya dan Bung Wibisono sangat berharap kampus terkemuka seperti Unisma ini bisa ikut bersama kami membangun pendidikan di Kota Singapraja, khususnya pendidikan Islam,"* ujar Bunda Wara Srikandi bersemangat (Sumber Data pada lampiran 6: 5.105)

Perbandingan atas kalimat dan pesan utama pada berita yang dimuat Singapraja Post (11 April 2013) dan Advertorial yang dimuar harian Surya (12 April 2013) menunjukkan bagian-bagian utama yang identik, dengan penanda cetak miring dari penulis, yang kalimat dan pesannya identik dengan yang ada pada advertorial berikut ini (Periksa Lampiran 1, Gambar 5.25).

Namun demikian, ketika perbandingan dilakukan antara berita pada Memo Arema (08 April 2013) dengan advertorial yang dimuat Surya, ternyata ada perbedaan cukup mencolok. Dari judul yang digunakan dalam advertorial yang dimuat Surya saja, sudah tampak upaya sangat keras untuk mengunggulkan Wara Srikandi dan Wibisono terutama bagi khalayak pembaca Muhammadiyah. Judul yang digunakan dalam advertorial adalah *Kampus NU Merestui, Muhammadiyah Langsung Oke: Dukungan dan Apresiasi Positif ke Pasangan DADI*. Berkaitan



dengan hubungan Pasangan Dadi dengan Muhammadiyah, dalam berita Singapraja Post disebutkan *Beasiswa untuk Kader NU*, yang dalam Advertorial berjudul *Kampus NU Merestui*. Dalam berita disebutkan pasangan Dadi berkunjung ke Unissi, sedangkan dalam advertorial disebutkan Wara Srikandi dan Wibisono diundang oleh Unissi.

Selanjutnya, kalau dalam judul berita Memo Arema digunakan kalimat *Silaturahmi Muhammadiyah dan Cawali*, dalam advertorial yang dimuat Surya kalimat yang digunakan adalah *Muhammadiyah Langsung Oke*. Sebagaimana diberitakan Memo Arema, pertemuan yang memang mengundang seluruh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Singapraja itu diselenggarakan Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Singapraja agar semua pasangan calon bisa memaparkan visi dan misi serta rencana program kerja mereka.

Semua pasangan calon diberikan kesempatan memaparkan visi misi membangun Kota Singapraja. Selanjutnya, perwakilan masing-masing cabang memberikan tanggapan dan masukan setelah menyimak program para calon (Sumber Data pada lampiran 6: 5.107).

Sebagaimana tampak dalam gambar, pertemuan itu menempatkan secara bersama-sama delapan orang calon Walikota atau Wakil Walikota Singapraja. Dengan demikian, jelas bahwa pertemuan tersebut bukan secara khusus antara pasangan Wara Srikandi dan Wibisono dengan Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Singapraja (Periksa Lampiran 1, Gambar 5.26). Lebih-lebih bila dicermati isi advertorial yang menggunakan judul *Kampus NU Merestui, Muhammadiyah*

*Langsung Oke*, di dalamnya sama sekali tidak ada pernyataan bahwa kedua organisasi Islam tersebut secara khusus mendukung pasangan Wara Srikandi dan Wibisono.

Masih berkenaan dengan pemanfaatan media massa untuk meningkatkan elektabilitas pasangan calon walikota dan wakil walikota, Wara Srikandi dan Wibisono, sudah lazim diketahui tentang adanya prinsip bahwa berita yang baik tentang calon kepala daerah merupakan iklan terbaik bagi calon kepala daerah yang bersangkutan, karena berita lebih terpercaya daripada iklan. Karena itu, bila tidak memungkinkan menjadikan beriklan melalui berita, yang tentu saja melalui kerja sama antara pasangan calon kepala daerah dengan pihak wartawan, redaktur hingga pimpinan perusahaan media, maka cara yang sedikit berada di bawahnya adalah membuat iklan yang sangat menyerupai berita, yang belakangan dikenal dengan istilah advertorial.

Demikian juga suatu informasi akan lebih dipercaya apabila disampaikan oleh pihak lain yang netral daripada disampaikan oleh pihak calon kepala daerah. Prinsip terakhir itu pula tampaknya yang juga digunakan oleh tim kreatif media center pasangan Wara Srikandi dan Wibisono dalam mengelola iklan di media cetak.

Sebagai contoh, dua buah iklan berbeda, yang pertama iklan layanan masyarakat KPU Kabupaten Singapanji, dan kedua iklan politik pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Singapraja, Wara Srikandi dan Wibisono (Periksa Gambar 5.24) ditampilkan secara bergandengan. Dengan menempelkan dua jenis iklan yang berbeda ini, secara visual dan spasial, sepintas akan tampak bahwa persuasi agar mencoblos pasangan Wara Srikandi dan Wibisono menjadi bagian tak

terpisahkan dari iklan layanan masyarakat KPU dalam rangka Pemilu Legislatif (Periksa Lampiran 1, Gambar 5.27).

Bentuk iklan politik calon walikota yang lain adalah tulisan atas nama sendiri, dalam bentuk artikel atau kolom. Sebagai contoh adalah sebuah artikel yang ditulis oleh Wara Srikandi dalam rangka memperingati Hari Kartini. Artikel yang ditulis layaknya sebuah artikel surat kabar ini, selain menampilkan foto diri dan data pribadi, lengkap dengan gelar dan statusnya sebagai calon Walikota Singapraja, juga menampilkan foto penyerahan tumpeng dari Wara Srikandi yang didampingi Bagus Permadi, kepada Yustiadji, Ketua Koalisi Singapraja Bersatu, saat launching posko pemenangan pasangan Wara Srikandi dan Wibisono (Periksa Lamapiran 1, Gambar 5.28). Karena keberadaan foto selain foto diri penulis dalam kotak artikel, maka bisa dipastikan bahwa sebenarnya ini bukan merupakan artikel biasa, melainkan artikel advertorial sebagaimana iklan-iklan advertorial lainnya. Melalui artikel demikian, diharapkan akan semakin tampak kecendekiaan seorang calon walikota.

Bentuk lain dari iklan politik di media cetak adalah poster, baik poster dominan gambar maupun poster gambar dan tulisan. Poster dominan gambar, dengan sedikit sekali tulisan, lazimnya dimaksudkan sebagai pengingat bagi para calon pemilih. Bila memungkinkan, iklan bentuk poster dominan gambar pasangan calon kepala daerah ini dibuat semirip mungkin dengan gambar yang akan digunakan secara resmi dalam surat suara. Seperti prinsip yang berlaku dalam dunia iklan komersial, semakin sering iklan ini muncul, baik dalam media cetak maupun televisi,



maka semakin mungkin gambaran itu muncul dalam ingatan pemilih, terutama saat melihat surat suara (Periksa Lampiran 1, Gambar 5.29).

Meskipun ada beberapa variasi dari iklan poster dominan gambar yang digunakan oleh pasangan Wara Srikandi dan Wibisono, ternyata senantiasa ada yang menyamakan antara sejumlah variasi tersebut. Tentu saja, kesamaan utamanya adalah nomor urut pasangan calon, foto diri pasangan calon dan nama resmi yang digunakan dalam surat suara sebagaimana saat pendaftaran. Adanya kesamaan-kesamaan lain antar sejumlah variasi iklan poster dominan gambar tersebut menunjukkan bahwa perancangannya memiliki maksud dan tujuan tertentu.

Dalam tinjauan umum semiotika politik Indonesia, sudah lazim dikenal adanya konotasi tertentu sebagaimana tercermin dalam warna yang digunakan. Pada tingkatan yang sudah sangat mendalam, warna hijau selalu ditampilkan mewakili kekuatan dan orientasi politik Islam tradisional, khususnya jamaah nahdhiyin. Warna merah mewakili kekuatan dan orientasi politik nasionalis dan sosialis, khususnya kaum marhaen. Warna biru, mewakili kekuatan dan orientasi politik Islam modernis, khususnya jamaah Muhammadiyah. Belakangan, juga semakin dikenal bahwa warna kuning mewakili Golongan Karya, dan warna dominan putih mewakili PKS.

Selain konotasi warna dalam iklan politik berbentuk poster, penampilan dan aksesoris yang dipakai oleh calon kepala daerah dalam gambar juga mencerminkan kepada siapa iklan tersebut ditujukan, atau sekurang-kurangnya kepada kelompok mana seorang calon berusaha mengidentifikasi dirinya. Pertimbangan-pertimbangan

semiotika tersebut juga sangat tampak pada iklan-iklan politik yang digunakan oleh pasangan calon kepala daerah Wara Srikandi dan Wibisono.

Hampir semua iklan poster pasangan calon kepala daerah Wara Srikandi dan Wibisono didominasi oleh utamanya warna hijau, selanjutnya sedikit merah dan sedikit putih, dan lebih sedikit lagi warna lain. Ini menunjukkan bahwa iklan politik Wara Srikandi dan Wibisono ditujukan terutama kepada kaum nahdliyin, yang dalam konteks Kota Singapraja kepada para anggota dan simpatisan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa pasangan calon ini sedang mengidentifikasikan diri sebagai bagian dari kaum nahdliyin. Secara tersirat, pasangan calon kepala daerah ini ingin diakui oleh kaum nahdliyin sebagai bagian dari golongan kita (*minna*), Periksa Lampiran 1, Gambar 5.30.

Khusnun Djuraid, komisaris Singapraja Post yang juga dikenal sebagai wartawan senior dan mantan Pemimpin Redaksi Singapraja Post, menuturkan bahwa gaya iklan politik pasangan calon kepala daerah Wara Srikandi dan Wibisono tidak terlepas dari peran salah satu rekan seprofesinya dari Surabaya Pos. Menurut Khusnun Djuraid, pilihan bentuk, warna dan gaya penampilan calon kepala daerah dalam iklan poster bergambar memang senantiasa memperhatikan segmentasi sasarannya.

Ya sebagian besar kita kan sudah sudah tahu. Kalau hijau yang seperti itu, merupakan warna khas NU. Makanya PKB memilih warna itu. Dulu PPP juga dominan warna itu, walaupun elite partainya dari Muslimin Indonesia. Jadi memang niatnya untuk menarik simpati golongan nahdliyin. Pasti

perancangnya juga sangat paham soal itu. Dia kan mantan kepala biro Surabaya Pos Mojokerto. Lama jadi wartawan. Ya seangkatan dengan Mas Heruyogi almarhum, yang dulu di Surabaya Pos Biro Singapraja. Kalau masih ada sedikit merah-merahnya, ya karena sebelumnya Bu Bagus Permadi itu kan orang PDIP, walaupun lebih karena isteri Pak Bagus Permadi (Sumber Data pada lampiran 6: 5.112).

Berkenaan dengan foto yang digunakan oleh pasangan calon ini, yang menampakkan sosok Wara Srikandi sebagai seorang perempuan berbusana muslimah dan Wibisono yang mengenakan kemeja batik dengan berkopiayah, juga menunjukkan bahwa pasangan calon ini hendak merebut hati kaum nahdliyin, walaupun mereka sendiri tidak dikenal oleh kaum nahdliyin sebagai bagian dari jamaah mereka.

Sakban Rosidi, seorang mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang menjadi moderator dalam salah satu debat publik pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Singapraja 2013, berdasarkan pengamatannya mengemukakan bahwa baik Wara Srikandi dan Wibisono sebenarnya tidak terlalu terlibat dalam kegiatan bersama kaum nahdliyin. Kalaupun kemudian mereka banyak menghadiri dan tampil dalam sejumlah acara kaum nahdliyin, itu semua dilakukan setelah mereka mulai terlibat dalam bursa calon kepala daerah Kota Singapraja.

Bu Heri itu dosen satu kampus dengan saya. Kemudian ikut berpolitik ya lebih karena Pak Bagus Permadi. Pak Edi itu politisi Golkar jalur ABRI. Ya mereka itu memang politisi praktis. Kalau secara ideologi sebenarnya non-ideologis kok. Hijau bukan, merah juga tidak. Kalau tampak hijau, itu kan demi Pilkada ini. Buktinya maju dari partai apa saja mereka merasa tidak ada masalah. Soal mendekat kepada para kiai dan berjanji akan berbuat sebaik mungkin untuk kaum nahdliyin, ya pastilah diterima dengan baik. Tapi lihat saja nanti, apakah itu berhasil atau tidak? (Sumber Data pada lampiran 6: 5.113).



Tidak hanya secara tersirat, pasangan Wara Srikandi dan Wibisono ingin merebut hati kaum nahdliyin, tetapi juga secara tersurat melalui sebuah pertemuan yang kemudian juga dijadikan iklan poster yang memadukan gambar dengan tulisan. Namun demikian, agar tidak bersinggungan dengan NU dan PKB sebagai organisasi, istilah yang digunakan bukan Kiai NU atau kaum nahdliyin, tetapi kiai kultural, yang artinya semua yang terlibat tidak menggunakan NU sebagai organisasi, walaupun yang datang dan bergabung adalah Dahlan Thamrin dan Mutmainnah, isterinya yang pernah menjadi anggota KPU Kota Singapraja. Ini tampak dari, misalnya, iklan berwarna sehalaman penuh yang dimuat Harian Surya (Periksa Lampiran 1, Gambar 5.31).

Memang pasangan Wara Srikandi dan Wibisono tidak sama sekali meninggalkan pendukung sebelumnya yang berbasis PDIP dan Partai Golkar. Ini dilakukan terutama ketika dalam kampanye rapat umum, yang menjadi Juru kampanyenya berasal dari unsur partai. Sebagai contoh adalah pada iklan poster tulisan bergambar (Sumber Data pada lampiran 6: 5.115). Dalam foto tersebut tampak Wara Srikandi mengenakan baju merah, sedangkan Wibisono mengenakan baju kuning.

Penampilan berbeda ditunjukkan oleh Wara Srikandi dan Wibisono saat berada di lingkungan PAN (Periksa Lampiran 1, Gambar 5.32). Wara Srikandi tampak mengenakan seragam berwarna biru khas PAN, sedangkan Wibisono memilih pakaian bernuansa netral, bukan seragam partai Golkar, seragam PAN ataupun batik yang biasa digunakan untuk iklan baliho, ataupun iklan media massa.

Mereka dibawah komando Ketua DPD Kota Singapraja, Lokh Mahfuds berjanji akan melakukan secara serius dan bersama-sama untuk memenangkan pasangan DaDi. “Kita sanggup?,” tanya Lokh Mahfuds yang dijawab seluruh kader PAN di Gedung Kesenian Gajayana Singapraja itu dengan serentak, Sanggup.”

Mendapat jawaban semacam itu Lokh Mahfuds pun merasa lega. Sebab, menurut dia, target 45 itu sudah merupakan harga mati untuk diwujudkan.

Antusias kader PAN untuk mengantarkan pasangan Cawali DaDai ini tampaknya cukup beralasan. Sebab, selain merupakan salah satu partai pengusung Cawali ini, Wara Srikandi sudah memakai baju PAN.

Penyematan baju PAN itu dilakukan di depan kader yang mengikuti Rakorda DPD PAN Kota Singapraja. Praktis, penyematan itu mencerminkan sebagai pembaptisan Wara Srikandi sebagai kader PAN. Apalagi penyematan itu juga dilakukan di hadapan Ketua DPW PAN Jatim Ainur Rofiq dan Sekretaris PAN Jatim, Yusriaji.

Bunda adalah kader PAN. “Ketika Bunda sudah memakai baju PAN dan merasa nyaman dengan PAN. Dan kader memiliki peluang untuk beraktuaisasi di PAN,” jelasnya.

Karena itu tiap anggota Fraksi ditarget minimal 3000 suara untuk memenangkan Bunda Wara Srikandi. Selain itu, para kader juga sudah sepakat untuk ikut memberikan kontribusi suara dalam Pilwali Singapraja (Sumber Data pada lampiran 6: 5.116).

Dari seluruh uraian tersebut bisa disimpulkan bahwa dalam memanfaatkan media massa untuk meningkatkan elektabilitas, sasaran utama pasangan Wara Srikandi dan Wibisono adalah para pemilih yang berasal dari luar partai, baik PDIP yang secara praktis sudah dikuasai oleh Sri Sendari dan Priyatmoko Oetomo, PAN maupun Partai Golkar yang secara organisatoris dan institusional menjadi tugas partai masing-masing untuk mengamankannya. Calon pemilih yang menjadi sasaran utama pasangan calon kepala daerah ini adalah kaum nahdliyin, yang dilakukan melalui jalur non-organisasi NU maupun PKB. Dengan demikian, pasangan ini berebut suara dengan pasangan M. Anton dan Sutiaji, yang memang dicalonkan oleh PKB dan Partai Gerindra.

Strategi kampanye dalam bermain warna dan simbol-simbol non-verbal, ternyata sangat berbeda dari muatan kampanye mereka yang bersifat verbal. Calon walikota dan wakil walikota yang membuat kesepakatan dalam keterdesakan waktu ini tampak kurang memiliki visi dan misi yang mantap. Karena itu, tema-tema kampanye yang ditampilkan tampak sebagai reaksi terhadap visi, misi dan tema kampanye yang dipilih oleh pasangan Sri Sendari dan Priyatmoko Oetomo. Sebagai contoh, saat Sri Sendari dan Priyatmoko Oetomo tampil dengan tema mencetak sarjana rakyat (Periksa Gambar: Visi dan Misi SR-MK), dengan memberikan beasiswa kepada warga Kota Singapraja yang cerdas kurang mampu untuk mengakses pendidikan tinggi yang kredibel, serta-merta Wara Srikandi dan Wibisono menampilkan janji yang lebih tinggi lagi, dengan menyiapkan 10.000 beasiswa sarjana.

Tidak seperti pasangan Wara Srikandi dan Wibisono yang berita, advertorial, iklan poster, dan iklan komiknya senantiasa memenuhi halaman-halaman surat kabar yang terbit atau beredar di Kota Singapraja, pasangan Sri Sendari dan Priyatmoko Oetomo sangat jarang menampilkan iklan di media cetak. Beberapa di antaranya berupa advertorial, poster ukuran kecil, dan semacam pengumuman. Ciri utama iklan mereka adalah lebih menonjolkan tulisan dibanding gambar (Periksa Lampiran 1, Gambar 5.33).

Salah satu isi pesan kampanye pasangan Sri Sendari - Priatmoko Oetomo tersebut adalah mencetak sejumlah sarjana rakyat dengan memberikan beasiswa. Tema ini mulai mengemuka saat Dialog Publik Pendidikan Calon Walikota dan



Wakil Walikota Singapraja yang diselenggarakan oleh Kerjasama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan IBUraja (9 Maret 2013) dan sering dilontarkan sebagai salah satu program kerja mereka. Agak belakangan, pasangan Heri Puji Utami dan Wibisono justru menampilkan kampanye dengan program kerja menyiapkan 10.000 beasiswa sarjana melalui sebuah iklan besar yang juga dimuat di Harian Surya (Periksa Lampiran 1, Gambar 5.34).

Ketika Sri Sendari dan Priyatmoko Oetomo menampilkan tema penataan dan pemberdayaan PKL, sektor informal, dan UMKM guna percepatan penyediaan lapangan kerja, Wara Srikandi dan Wibisono juga akan membagikan 10.000 kartu kerja dan membantu akses dan permodalan.

Tidak hanya itu, pasangan Wara Srikandi dan Wibisono juga akan membangun gedung pameran dan menggalakkan *UMKM day* di Mall-Mall (Periksa Lampiran 1, Gambar 5.36).

Program ekonomi kerakyatan Sri Sendari - Priyatmoko Oetomo masih juga direaksi oleh pasangan Wara Srikandi dan Wibisono dengan program berkenaan dengan pengembangan PKL (Periksa Lampiran 1, Gambar 5.37).

Selanjutnya, sebagaimana bisa dibaca, program kerja unggulan pasangan Sri Sendari - Priyatmoko Oetomo lainnya adalah memberikan layanan kesehatan yang terjangkau, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan serta mengutamakan kaum perempuan dan anak-anak. Ini pun direaksi oleh Wara Srikandi dan Wibisono dengan advertorial besar, kalau mereka tidak ingin melihat lagi ada diskriminasi layanan,

sehingga tahun pertama kerja, RSUD tanpa kelas wajib diwujudkan (Periksa Lampiran 1, Gambar 5.38).

Pernyataan-pernyataan spesifik dengan menyebut jumlah dalam reklame politik yang dilakukan oleh Wara Srikandi dan Wibisono tersebut senantiasa muncul melebihi apa yang disampaikan oleh Sri Sendari dan Priyatmoko Oetomo. Berikut adalah visi dan misi serta program aksi SR-MK yang kemudian beberapa di antaranya direaksi melalui reklame yang lebih besar tim pemenangan DADI.

Secara ideal media massa harus mempertahankan objektivitasnya, sehingga bisa ikut mengontrol proses politik agar berlangsung secara demokratis. Karena itu, sering dikemukakan bahwa media massa merupakan salah satu pilar demokrasi. Namun demikian, sebagaimana tampak pada berbagai gejala yang sudah diuraikan, seringkali media massa tidak bisa mempertahankan objektivitasnya. Kondisi demikian, menurut Khusnus Djuraid, semakin tidak terkendali karena telah terjadi perubahan signifikan dalam dunia pers belakangan ini. Menurut mantan Pemimpin Redaksi Singapraja Post ini, jati diri media massa sekarang telah berubah bukan hanya dikenal sebagai industri pers, tetapi sudah menjadi pers sebagai industri.

Kalau industri pers itu, prinsip-prinsip pers masih bisa ditegakkan. Saya masih mengalami, bagaimana dulu seorang pemimpin redaksi selalu dinilai berdasarkan *pers value*. Sekarang, karena pers sudah menjadi industri, *pers value* tidak lagi digunakan sebagai ukuran evaluasi seorang Pimred. Ukurannya berubah menjadi omset, terutama iklan. Meskipun saya berhenti tidak berhenti karena soal pers sebagai industri, tetapi jelas sangat berbeda isi rapat redaksi jaman saya, dengan isi rapat redaksi sekarang. Pertanyaannya selalu sama. Berapa iklan yang masuk, dan berapa omsetnya. Tidak ada lagi pertanyaan tentang apa topik berita terpenting hari ini (Sumber Data pada lampiran 6: 5.124).

Wawancara dengan enam wartawan, lima di antaranya masih aktif menjadi peliput berbagai peristiwa, dan seorang wartawan senior di Kota Singaperbangsa, menunjukkan kesimpulan yang sama, bahwa memang ada hampir semua surat kabar sekarang menjalin "kerjasama" dengan berbagai pihak, terutama Pemerintah Daerah dan para politisi daerah. Kerjasama dengan Pemerintah Daerah, biasanya berkaitan dengan kesepakatan untuk memberitakan secara positif instansi atau pejabat instansi yang bersangkutan, serta sama sekali tidak menerbitkan berita negatif instansi atau pejabat instansi yang bersangkutan.

Kalau ada berita negatif terhadap instansi atau pejabat instansi tertentu, bisa dipastikan kalau media massa yang memuat itu tidak menjalin kerjasama dengan instansi tersebut. Pernah kok, terjadi seorang wartawan dan Pimred surat kabar dipecat karena memuat berita negatif seorang pejabat daerah. Jadi, dengan dasar sudah bekerjasama itu, pejabatnya protes kepada owner dan general manager media massa. Akibatnya, ya itu tadi, Pimred dan wartawannya diberhentikan (Sumber Data pada lampiran 6: 5.125).

Ada kejadian menarik sehubungan banyaknya iklan di surat kabar dengan persepsi pembaca terhadap pekerjaan wartawan. Ketika surat kabar dipenuhi oleh iklan, yang memang sangat marak ketika Pemilu, seorang pembaca bertanya atau tepatnya menilai bahwa wartawannya enak karena tidak harus sibuk-sibuk mencari dan menulis berita. Padahal, sebagaimana dikemukakan oleh M. Ariful Huda, wartawan Memo Arema, yang dibenarkan oleh semua wartawan termasuk Khusnun Djuraid, bahwa justru banyaknya iklan itu merupakan prestasi wartawan jaman sekarang.

Hahahaha... ya begitulah Mas. Kami-kami ini sebenarnya selalu merangkap. Pertama cari iklan, kedua cari berita. Terus sama-sama dibawa ke bagian



periklanan dan ke redaksi. Biasanya yang pasti dimuat itu ya iklannya dulu. Kalau semua iklan sudah masuk, barulah beritanya mendapatkan ruang. Lho... kan salah kalau dikatakan kami tidak ada kerjaan? Yang bener malah kerja rangkap kok (Sumber Data pada lampiran 6: 5.126).

Berkenaan dengan hubungan antara calon kepala daerah, khusus Wara Srikandi dan Wibisono, dengan media massa, Khusnun Djuraid menegaskan memang ada kontrak antara beberapa surat kabar yang terbit di Kota Singapraja dengan tim sukses Wara Srikandi dan Wibisono. Salah satu unsur tim sukses yang mengoperasionalkan kerjasama itu adalah seorang mantan wartawan Surabaya Post. Karena itu, ketika kepadanya ditunjukkan adanya kesamaan isi antara berita di Singapraja Post, advertorial di Surya, serta iklan komik juga di Surya, Khusnun Djuraid membenarkan bahwa semua itu dirancang oleh orang yang sama.

Jadi seringkali memang begitu. Pihak koran menerima tulisan dan gambar sudah matang. Tim media center kandidat tinggal bilang mau dimuat sebagai berita atau sebagai iklan, atau sebagai advertorial. Jadi yang gini ini sebenarnya sudah nggak melibatkan wartawan kami. Langsung ke redaksi, atau tata usaha yang akan melanjutkan ke redaksi. Hampir semua begitu. Bahkan grup Kompas saja juga begitu. Berbeda sekali dengan jaman Pak Jacob Oetama. Kalau mau pasang iklan di Surya atau Kompas, biasanya sudah mendapat bonus advertorial (Sumber Data pada lampiran 6: 5.127).

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa para pejabat daerah, politisi daerah, termasuk calon kepala daerah memang membayar media untuk instansinya, dirinya, maupun partainya. Bentuk kampanye sekarang bukan lagi berupa iklan yang memiliki perbedaan jelas dengan berita, tetapi sudah berupa berita yang memang dirancang sebagai iklan. Dengan demikian pula bisa disimpulkan bahwa media massa sekarang sudah bisa dibayar untuk kepentingan

politik karena telah semata-mata dilihat sebagai bisnis oleh pemiliknya. Bukan lagi industri pers, tetapi pers sebagai industri.

Pertanyaan penting yang kemudian harus diupayakan jawabannya adalah berkenaan dengan besar anggaran yang harus dikeluarkan oleh calon kepala daerah untuk berkampanye melalui media massa. Memang tidak ada jawaban yang pasti mengenai besar anggaran yang dikeluarkan, karena masing-masing pihak yang terlibat masih merasa tidak nyaman apabila secara langsung menyebutkan. Pertama, pertanyaan mengenai itu dianggap meragukan objektivitas media massa, dan merupakan bentuk penyimpangan dari kode etik pers. Kedua, dari pihak calon kepala daerah juga tidak mau terbuka atau masih sembunyi-sembunyi bila dipertanyakan mengenai anggaran yang dikeluarkan untuk media massa. Hanya sejumlah lembaga studi dan organisasi anti korupsi yang biasanya melakukan pengumpulan dan analisis data khusus untuk membuat taksiran mengenai besar anggaran yang dikeluarkan oleh calon kepala daerah.

Selama satu tahun, dana sosialisasi kampanye yang dikeluarkan Bakal Calon Walikota Singapraja telah mencapai Rp. 22.5 M. Estimasi ini merupakan hasil observasi Pusat Penelitian Otonomi Daerah (PP Otonoda) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH-UB) selama Januari 2012-Januari 2013. Ekspose hasil penelitian dilakukan Sabtu (16/2) dihadapan wartawan. Observasi dilakukan di lima kecamatan yakni Kedungkandang, Klojen, Sukun, Lowokwaru, dan Blimbing.

Dari jumlah tersebut, Bunda WS, nama tenar untuk Wara Srikandi, menduduki posisi tertinggi senilai Rp. 4.93 M. Jumlah ini disusul Sofyan Edi Rp. 3.82 M, yang tidak berbeda signifikan dengan tiga kandidat lain: Arif HS (Rp. 3.72 M), Sri Sendari (Rp. 3.57 M) dan Abah Anton (Rp. 3.13 M). Sementara Priatmoko membelanjakan uang untuk sosialisasi di kisaran Rp. 1.41 M. Separuh kandidat lain membelanjakan dana sosialisasi dibawah Rp. 1

M, meliputi Sutiaji, Bambang DH, Yaqud Ananda, Arif Darmawan, Mujais dan Dwi Cahyono (Sumber Data pada lampiran 6: 5.128).

Sebagaimana tampak dalam kutipan, bila digabungkan antara Wara Srikandi dan Wibisono, maka jumlah yang dikeluarkan untuk adalah Rp. 8.73 Milyar. Jumlah ini diperkirakan mengalami pelipatan 3 sampai 5 kali saat mengakhiri masa kampanye. Bila perkiraan ini benar, maka anggaran yang diperlukan untuk kampanye pasangan Wara Srikandi dan Wibisono, mendekati angka Rp. 43.65 Milyar. Bila benar, biaya yang harus dikeluarkan tersebut masih harus ditambah dengan berbagai keperluan di luar sosialisasi dan kampanye. Karena itu, bisa pula diperkirakan bahwa berhasil menang atau menderita kekalahan dalam Pemilukada secara langsung, tetap saja harus mengeluarkan dana sangat besar. Bila kemudian menang dan berhasil dilantik sebagai kepala daerah, maka sangat logis apabila kepala daerah tersebut berusaha mendapatkan kembali uang yang dia keluarkan untuk proses Pemilukada.

Memperhatikan betapa besar pengeluaran yang harus dibayar oleh calon kepala daerah, terutama untuk kegiatan sosialisasi dan kampanye melalui media massa, menjadi penting untuk mengetahui tingkat keefektifan media massa dalam mempengaruhi pilihan masyarakat terhadap para calon kepala daerah. Jawaban tidak langsung terhadap pertanyaan ini bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media massa. Tingkat kepercayaan masyarakat ini harus dibedakan dari tingkat keterpercayaan (*credibility*) media massa. Artinya, keterpercayaan media massa berhubungan dengan obektivitas dan kebenaran isi media massa, sedangkan



kepercayaan masyarakat berhubungan dengan sikap kritis dan kemelekan-media (*media-literate*) masyarakat.

Berdasarkan hasil diskusi kelompok terfokus (FGD) yang peneliti lakukan bersama lima orang wartawan dari berbagai media massa dengan liputan Kota Singapraja, diperoleh kesimpulan bahwa dengan semakin meningkatnya pendidikan masyarakat, khususnya Kota Singapraja, serta semakin banyaknya alternatif sumber pemberitaan, masyarakat menjadi kurang percaya kepada media massa. Bahkan sudah semakin berkembang sikap sinis terhadap media massa. Salah satu wartawan yang berbahasa Jawa sangat kental, mengemukakan sebagai berikut:

*Walah mas, wong masyarakat iku lho saiki wes pinter, wes paham ndi berita seng asli, ndi berita seng iso digawe. Lha pokok mbayar, pasti masuk. Apalagi di kolom advertorial. Saiki nek dirasak-rasakno, gak efektif mberitakno lewat media massa, wong masyarakat kadang malah enek (mual) nyimak berita kok. Tapi kita sih gak ono masalah, lha penghidupan e teko kunu e, pokok mbayar. Saiki malah keberadaan e media kabeh iki kalah karo facebook, twiter dan jaringan sosial liane. (Sumber Data pada lampiran 6: 5.129).*

Kesimpulan yang lebih jelas diberikan oleh Khusnun Djuraid, terutama terkait dengan semakin kuatnya kecenderungan media massa untuk memasukkan apa saja sepanjang bisa menghasilkan keuntungan bagi pemilik media massa tersebut. Menurut mantan wartawan Jawa Pos yang diberi kepercayaan merintis dan mengembangkan Singapraja Post ini, dia memang semakin sering mendapat keluhan dari para pembaca terutama berkenaan dengan proporsi ini surat kabar serta objektivitas berita surat kabarnya.

Kalau soal kredibilitas saya tidak tahu parameternya. Tetapi memang pernah LSI membuat survai, dan hasilnya memang cenderung menurun. Termasuk

Singapraja Post. Kalau saya pribadi, ini pribadi, saya memang lumayan sering mendapat keluhan tentang isi berita koran sekarang. Keadaan seperti ini mulai terasa setelah reformasi. Di satu sisi memang pers semakin bebas, tetapi di sisi lain juga menjadi bebas untuk memuat apa saja. Masalahnya juga kan wartawan itu bisa memperjuangkan buruh, tetapi nggak bisa memperjuangkan diri sendiri. Bisa memperjuangkan orang lain, tetapi hidupnya sendiri *keleleran*. Lebih *nemen* lagi setelah kran politik dibuka, baik musim pilihan legislatif, pilihan presiden maupun pilihan kepala daerah, media massa telah berubah menjadi semacam baliho di pinggir jalan. Isinya iklan politik melulu. Sekarang ini, satu-satunya pekerjaan tradisional yang tersisa bagi Pimred hanya menulis tajuk atau editorial. Selebihnya bagaimana meningkatkan keuntungan melalui iklan dan semacamnya (Sumber Data pada lampiran 6: 5.130).

Akhirnya, meskipun diungkapkan dengan cara yang berbeda, sebagaimana diakui oleh para awak media sendiri, bahwa sebenarnya tingkat keterpercayaan media massa di hadapan masyarakat memang menurun. Demikian pula, dengan semakin banyaknya sumber informasi, kepercayaan masyarakat kepada media massa pun semakin menurun. Anehnya, dalam keadaan keterpercayaan yang semakin menurun serta kepercayaan masyarakat yang juga menurun, ternyata justru semakin banyak politisi yang mempercayai media massa sebagai sarana berkampanye yang sangat penting, sehingga mau membelanjakan anggaran cukup besar untuk pemanfaatan media baik dalam rangka popularitas maupun elektabilitas. Tidak terkecuali apa yang dilakukan oleh pasangan Wara Srikandi dan Wibisono.

### 3. Pemanfaatan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan

Ada sejumlah strategi yang dilakukan oleh pasangan Wara Srikandi dan Wibisono yang didukung sepenuhnya oleh Bagus Permadi, yang ternyata diselenggarakan dengan mengandalkan prinsip teori pertukaran (*exchange theory*).

Termasuk dalam prinsip pertukaran adalah kebiasaan untuk menanam budi pada satu pihak, yaitu: pasangan Wara Srikandi dan Wibisono, dan membalas budi pada pihak lain, yaitu: sejumlah kelompok atau organisasi sosial.

Sebagaimana telah dibahas dalam uraian tentang Bazis, sejak sebelum masa kampanye, Bagus Permadi dan Wara Srikandi telah melakukan sejumlah upaya sebagai bagian dari kegiatan menanam budi. Ini dilakukan dengan antara lain menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah yang diperoleh melalui program Bazis kepada kelompok masyarakat atau organisasi tertentu, terutama berbagai jama'ah pengajian, madrasah dan pesantren yang ada di Kota Singapraja. Dengan demikian ada preferensi dan bahkan agenda tertentu dari Bagus Permadi dan Wara Srikandi dalam menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah dari Bazis.

Sebagai konsekuensi logis dari beroleh zakat, infaq, dan shadaqah, serta bantuan selain dari Bazis yang semuanya dikelola oleh Bagus Permadi dan Wara Srikandi, maka pada gilirannya sejumlah guru mengaji madrasah, kiai pesantren, dan para pemimpin jamaah pengajian di Kota Singapraja tampak sepakat memberikan dukungan kepada pasangan yang didukung oleh Bagus Permadi, yaitu Wara Srikandi dan Wibisono. Selanjutnya, demi meningkatkan dampak lebih luas dari dukungan tersebut, kegiatan deklarasi dukungan tersebut tidak hanya dilaksanakan dalam bentuk acara publik, tetapi juga dipublikasikan baik sebagai berita di media cetak, media online, maupun sebagai advertorial yang dimuat di media cetak.

Achmad Subakir, mantan Kepala Kantor Pendidikan dan Kebudayaan, yang terakhir menjabat sebagai koordinator pengawas sekolah Kota Singapraja,



menuturkan bahwa program ZIS merupakan salah satu program yang dengan mudah digunakan untuk kepentingan politik Bagus Permadi, dan belakangan juga untuk Wara Srikandi. Tanpa mengeluarkan dana sendiri, Bagus Permadi dan Wara Srikandi telah dengan sendirinya dicitrakan sebagai sosok yang penuh perhatian kepada kaum *fuqara wal masakin*, perhatian kepada para guru mengaji, serta orang-orang yang berjuang *fisabilillah*. Itu semua dilakukan dengan hanya menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqah yang memang dikumpulkan berdasarkan kebijakan Bagus Permadi selaku Walikota Singapraja.

Bagaimanapun Pak Bagus Permadi telah memanfaatkan semua hal yang bisa digunakan untuk mengangkat citra Bu Bagus Permadi, selain GNOTA dan yang lain, program ZIS ini sangat potensial sekali dimanfaatkan, banyak lho itu, setiap PNS ditarik antara Rp. 50.000 – Rp. 100.000 tinggal di kali saja, berapa jumlah PNS termasuk guru-guru. Uang itu kemudian disalurkan oleh Bu Bagus Permadi keliling-keliling ke sekolah, pondok pesantren, panti asuhan, untuk masjid, dan mushola. Dan karena tidak ada pakem penggunaannya untuk apa, maka bebas saja digunakan. Lagi pula status Bu Bagus Permadi waktu membagikan itu adalah sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Singapraja. Bu Bagus Permadi Bukan Pengurus ataupun pembina dari Bazis, tetapi hanya membagikan bantuan dengan menggunakan dana program ZIS (Sumber Data pada lampiran 6: 5.131).

Sebagaimana telah disinggung tentang keberlakuan prinsip pertukaran, maka sebagaimana diberitakan pada halaman Singapraja Life (Surya, 13 Mei 2013), ratusan Ibu Nyai pengasuh pondok pesantren se Kota Singapraja menyatakan dukungannya kepada pasangan DaDi. Demikian juga, puluhan Ibu Nyai, atau sebutan perempuan ahli agama dan guru mengaji di pesantren, se Kota Singapraja menyatakan dukungannya kepada pasangan Wara Srikandi dan Wibisono (30 April 2013). Ini dilakukan dalam sebuah acara publik, dengan antara lain ibadah khataman Al-Quran

dan istighosah, atau berdoa secara bersama-sama demi kemenangan pasangan Wara Srikandi dan Wibisono pada Pemilukada Kota Singapraja 23 Mei 2013. Ibu Nyai Mutmainah, isteri KH. Dahlan Thamrin yang mantan Ketua Tanfidiyah PC Nahdlatul Ulama Kota Singapraja, menjadi juru bicara forum ibu nyai se-Kota Singapraja. Atas nama para nyai, mantan anggota KPU Kota Singapraja itu menyampaikan dukungan dengan disaksikan oleh seluruh undangan yang menghadiri acara istighosah:

Kami para ibu nyai se-Kota Singapraja ini mendoakan dan mendukung calon walikota yakni Bunda Wara Srikandi dan Bung Wibisono, Kita sangat pas sekali dengan agenda dan program Bunda Wara Srikandi dan Bung Wibisono ini. Kita ini memang cari pemimpin yang mengayomi semua golongan dan adil untuk semua. Pemimpin yang berjiwa besar, bijak dan ke-ibuan itu yang akan bisa membawa Kota Singapraja tambah maju lagi (Sumber Data pada lampiran 6: 5.132).

Berkenaan dengan kegiatan tersebut, Memo Arema memang memuatnya sebagai berita apa adanya. Namun demikian, pada tanggal yang sama (1 Mei 2013), terbit sebuah advertorial sehalaman penuh dengan gambar *full color* tentang Kiai NU Kultural Kompak Menangkan Pasangan DaDi. Tanpak dalam gambar besar spanduk bertulisan "Istighosah & Doa untuk Kemenangan Pasangan DaDi oleh 100 Ibu Nyai Pengasuh Ponpes se Kota Singapraja" sebagai latar belakang dari foto ibu-ibu nyai yang terlibat. Dalam halaman yang sama, juga ditampilkan wawancara dengan Rendra Kresna yang menyatakan bahwa pasangan DaDi akan memang dalam satu putaran, serta pesan Nyai Mudrikah bahwa perempuan harus memilih perempuan salehah (Periksa Lampiran 1, Gambar 5.39).

Tidak lama berselang, dukungan untuk Wara Srikandi dan Wibisono juga disampaikan oleh 7.500 guru ngaji se-Kota Singapraja yang datang bersama wali santrinya (Periksa Lampiran 1, Gambar 5.40). Pernyataan dukungan yang disampaikan oleh ketua Forum Komunikasi dan Konsultasi Taman Pendidikan Al-Quran (Fokus), Ustadz Umar Hamzah diberikan dengan dua pertimbangan, yaitu: (1) karena "Fokkus" telah menilai pemerintahan Bagus Permadi selama sepuluh tahun memimpin Kota Singapraja yang ternyata sangat memperhatikan guru mengaji, dan (2) ke depan pasangan DaDi juga mempunyai program sertifikasi bagi guru mengaji, yang diharapkan juga berimplikasi tidak hanya terhadap kualitas sumberdaya dan program pendidikan, tetapi juga pengakuan serta kesejahteraan mereka.

Para guru ngaji itu tergabung dalam Fokkus (Forum Komunikasi dan Konsultasi taman pendidikan Al-Quran). Jumlah mereka se-Kota Singapraja lebih dari 7.500 orang. "Kita telah bersama-sama sepuluh tahun dengan Pak Bagus Permadi. Untuk perbaikan dan perhatian guru ngaji ke depan, kita ingin Bunda dan Bung Wibisono bisa meneruskan," ungkap ustad Umar Hamzah, Ketua Fokus.

Dalam pengajian dan doa bersama di kediaman Bunda Wara Srikandi Selasa malam (14/5), para guru ngaji mendoakan dan berupaya agar DaDi bisa memegang kepemimpinan Kota Singapraja ke depan.

"Guru ngaji dan pengasuh TPQ ini adalah pekerjaan sosial, sehingga butuh motivasi terus menerus agar keberadaannya tetap terjaga untuk membangun akhlak anak-anak" ungkap Umar.

Adanya program sertifikasi guru ngaji juga digantungkan di pundak pasangan DaDi. Sertifikasi itu nantinya akan memudahkan para guru ngaji meluaskan pendidikannya. Sehingga jumlah masyarakat yang bisa ditangani bertambah banyak.

Para guru mengaji memandang pasangan DaDi cocok untuk harapan membangun kesejahteraan dan juga masa depan guru ngaji. Untuk itulah, kalangan guru ngaji memilih mendukung DaDi. "Insya Allah menang", tutur Umar.

Dijelaskan Umar, pilihan guru ngaji merapat ke Bunda tentu dengan pertimbangan yang matang. "Kita sudah kumpulkan semua pengurus baik



tingkat kecamatan maupun kelurahan. Mereka sepakat menggantungkan masa depan ke pasangan DaDi," katanya (Sumber Data pada lampiran 6: 5.134).

Tampak jelas dalam kutipan tersebut tentang adanya kesinambungan antara dua kali masa jabatan Bagus Permadi sebagai Walikota Singapraja, dengan harapan agar apa yang telah dilakukan oleh Bagus Permadi dipertahankan, dilanjutkan dan dikembangkan oleh Wara Srikandi dan Wibisono. Ini menunjukkan bahwa seandainya Wara Srikandi dan Wibisono terpilih sebagai Walikota dan Wakil Walikota Singapraja, maka sebenarnya rejim pemerintah daerah mereka tidak berbeda sama sekali dengan rejim Bagus Permadi.

Kampanye politik sebagai kegiatan komunikasi persuasif agar sasaran komunikasi memilih seorang calon kepala daerah, Presiden maupun calon anggota badan legislatif, senantiasa dimaksudkan untuk mempengaruhi pilihan politik masyarakat. Dengan menampilkan semacam pemberitaan akan besarnya dukungan masyarakat kepada calon tertentu, selain menguatkan mereka yang memang sudah memiliki kecenderungan kepada calon tersebut, juga diharapkan bisa mempengaruhi para pemilih yang belum menentukan pilihan (*non-decisive voters*) untuk memilih calon yang sedang dikampanyekan.

Upaya mempengaruhi masyarakat, sebagaimana teori komunikasi mengajarkan, bisa dilakukan dengan menggunakan figur-figur masyarakat yang dinilai memiliki kredibilitas atau memiliki pengaruh terhadap masyarakat. Karena itu, dalam setiap kegiatan kampanye politik, senantiasa ada upaya dari para politisi untuk merekrut dan memanfaatkan figur terpercaya tersebut sebagai juru kampanye mereka,

baik secara formal maupun informal. Pola demikian juga diterapkan oleh pasangan Wara Srikandi dan Wibisono.

Sebagaimana diketahui, masyarakat Kota Singapraja memiliki segmentasi komunitas beragama yang cukup kuat dan besar dalam jumlah. Mereka yang tergabung dalam jama'ah-jama'ah tersebut memiliki pemimpin yang dinilai berpengaruh terhadap warga jama'ahnya. Karena itu, pendekatan paternalistik, dalam arti memanfaatkan para pemimpin jama'ah untuk mempengaruhi pilihan politik warga jama'ah, menjadi salah satu pilihan penting bagi pasangan Wara Srikandi dan Wibisono.

Ketika para tokoh kiai yang dipercaya oleh masyarakat menyampaikan fatwa ataupun hasil ikhtiar mereka secara spiritual, dalam bentuk istikharah, maka diharapkan benar-benar akan meningkatkan kemantapan bagi mereka yang sudah menentukan pilihan, dan akan mempengaruhi pilihan bagi mereka yang belum menentukan pilihan. Logika seperti ini yang digunakan oleh Wara Srikandi dan Wibisono ketika mempublikasikan hasil istikharah tujuh kiai yang meyakinkan bahwa pemenang pemilihan kepala daerah Kota Singapraja 2013 adalah pasangan Wara Srikandi dan Wibisono (Periksa Lampiran 1, Gambar 5.41).

Kalangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Kota Singapraja satu suara menjatuhkan pilihan kepada pasangan Bunda Wara Srikandi - Bung Wibisono (DaDi) dalam Pemilukada Kota Singapraja 23 Mei mendatang. Tujuh kali yang mewakili suara mayoritas NU merilis dukungannya setelah melakukan tujuh kali Riyadhoh Khusus. Ibadah khusus itu dilakoni para kiai hampir dua bulan lamanya. Ibadah khusus itu juga diikuti oleh ustad, santri dan para penghawal Al Qur'an di beberapa pesantren.

Menurut salah satu juru bicara para kiai, Dr. K. H. Imam Muslimin M.Ag., istiharah itu telah dilakukan tujuh kali. Dalam salat minta petunjuk itu, para kiai hanya melihat pasangan DaDi.

“Begitu diulangi, yang muncul tetap Bunda Wara Srikandi dan Bung Wibisono. Untuk itu, Bismillah, kami bertekad mendukung dan memenangkan pasangan DaDi,” (Sumber Data pada lampiran 6: 5.136).

Dalam kesempatan yang sama, Wibisono juga mendapatkan dukungan dari para Purnawirawan TNI/Polri. Pernyataan dukungan itu dilakukan dengan mengemukakan bahwa Wibisono adalah anak para Purnawirawan TNI/Polri.

"Edi itu anak kami. Anak sesama aparat negara", ungkap Soleh, salah seorang purnawirawan yang hadir dalam acara Silaturahmi Pasangan DaDi bersama Purnawirawan TNI/Polri, Kamis (16/5).

Menurut Soleh, para purnawirawan juga tetap punya keinginan untuk kemajuan Kota Singapraja. Mereka melihat Bunda Wara Srikandi dan Bung Wibisono punya kemampuan untuk menampung aspirasi para purnawirawan dan veteran itu. Untuk itu, sebagai pemilik suara, mereka menjatuhkan pilihan kepada pasangan DaDi (Sumber Data pada lampiran 6: 5.138).

Guna meningkatkan elektabilitasnya, Wara Srikandi juga menggunakan sejumlah program terkait pendidikan nonformal, baik yang bersifat suplementair sebagai pendukung belajar di sekolah, maupun yang bersifat komplementair, seperti pembelajaran keagamaan Islam. Dua di antaranya adalah Program Rumah Belajar Anak (RBA) dan Sanggar Singapraja Sinau (SMS). Program ini memang diprakarsai oleh Wara Srikandi dalam kapasitas sebagai Ketua TP PKK, dengan lokasi menyebar di setiap Kelurahan, Kota Singapraja. Melalui program ini, siswa dari kelas 1 SD hingga IX SMP bisa mendapatkan bimbingan pelajaran gratis, apalagi khusus untuk siswa kelas 6 dan IX SMP mendapatkan bimbingan intensif ujian nasional.



Program yang memang dibuat khusus menjelang Pemilu Kota Singapraja 2013 tersebut mengerahkan tidak hanya para pengurus PKK tingkat kelurahan, tetapi juga para Ketua RW dan Ketua RT di seluruh Kelurahan di Kota Singapraja, sehingga ketika diadakan pertemuan sesama walimurid yang anaknya belajar di Sanggar Singapraja Sinau dan atau Rumah Belajar Anak saja, maka sejumlah besar massa bisa dikumpulkan (Periksa Lampiran 1, Gambar 5.42).

Dalam pertemuan walimurid (Periksa Lampiran 1, Gambar 5.36) seperti itu, Wara Srikandi bisa melakukan upaya baik untuk peningkatan popularitas maupun untuk peningkatan elektabilitas. Sebagaimana pada kegiatan yang melibatkan organisasi PKK, RW dan RT, senantiasa Wara Srikandi lebih leluasa untuk melakukan dan memanfaatkannya dibanding dengan para pasangan calon walikota dan wakil walikota lainnya.

Keleluasaan Wara Srikandi dalam memanfaatkan lembaga dan organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan elektabilitasnya juga tampak dari kegiatan yang melibatkan tidak hanya warga masyarakat, tetapi juga para pejabat pemerintah. Sebagai contoh adalah kegiatan peresmian gedung satu atap yang meliputi Kejar Paket A, SMP/kejar paket B, dan SMA/kejar paket C yang terletak di RW 05 Kelurahan Wonokoyo, Kecamatan Kedungkandang, Kota Singapraja, 26 Februari 2013. Adapun pejabat pemerintah daerah yang turut menghadiri acara tersebut adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Camat Kedungkandang, Lurah Wonokoyo, dan beberapa tokoh masyarakat di Kelurahan Wonokoyo.

Selaku Ketua TP PKK Kota Singapraja, dengan percaya diri Wara Srikandi tampil layaknya seorang Bunda kepada anak-anaknya, bahwa dirinya tidak mau mendengar masih ada anak tidak mau sekolah karena alasan biaya yang mahal, atau lokasinya terlalu jauh dari rumah, karena semua telah dicukupi pemerintah (Periksa Lampiran 1, Gambar 5.43).

Dengan di bangunnya sekolah satu atap, saya tidak mau mendengar adanya kata tidak mau sekolah atau tidak sekolah di tempat ini, semua harus sekolah, tidak ada alasan karena biaya ataupun jauh untuk pergi ke sekolah, semua ada di sini dan ditanggung oleh pemerintah (Sumber Data pada lampiran 6: 5.140).

Sebagaimana dalam berbagai kesempatan lain, Wara Srikandi juga bertindak mewakili Walikota Singapraja Bagus Permadi untuk meresmikan sekolah sekaligus melakukan peletakan batu pertama pembangunan musholla di sekolah tersebut. Seusai acara tersebut, kegiatan dilanjutkan dengan peresmian Himpunan Pengelola dan Pemakai Air Minum (HIPAM) di RW 05 Kelurahan Wonokoyo, Kecamatan Kedungkandang, Kota Singapraja. Termasuk dalam rangkaian acara ini adalah memberikan bantuan berupa alat musik kepada Grup Terbang Jidor RW 05 kelurahan setempat.

Ada kejadian yang sebenarnya agak di luar kebiasaan. Berbagai organisasi sosial dan lembaga pemerintah, khususnya sekolah negeri, yang mengundang Wara Srikandi sekali Ketua TP PKK Kota Singapraja untuk berbagai acara, yang secara kebetulan juga tampak sangat banyak dibanding, misalnya, undangan untuk Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, maupun para Kepala Dinas terkait. Salah satunya

adalah undangan dari SMPN 17 Kota Singapraja kepada Wara Srikandi. Undangan ini diberikan kepada Wara Srikandi selaku Ketua TP PKK Kota Singapraja sebagai nara sumber dalam kegiatan Penyuluhan Usaha Kesejahteraan Sekolah (UKS) dan penilaian Adiwiyata untuk sekolah.

Kegiatan UKS mempunyai tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih, sehat, dengan cara menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Adiwiyata sendiri merupakan program Kementrian Negara Lingkungan Hidup yang bermaksud mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

Saat menyajikan paparannya, Wara Srikandi menekankan perlunya kebersihan dan perlunya menjaga pola makan sebagai suatu upaya untuk menjaga kesehatan. Juga dikemukakan kepada seluruh siswa yang hadir agar belajar mandiri, dan menghimbau kepada segenap guru yang hadir untuk mengajarkan fungsi dan manfaat dari pupuk kompos bagi lingkungan.

Saya harapkan kepada semua anak didik yang ada di sekolah ini mengerti akan kesehatan dan menjaga lingkungan bersih juga sehat. Agar jiwa raga sehat, pola makan juga harus dijaga, supaya anak-anak bisa menerima pelajaran dari bapak dan ibu guru dengan baik. Tidak hanya itu, belajarlah mandiri untuk diri sendiri dan jangan hanya mengandalkan orang lain. Saya melihat lingkungan sekolah yang rindang juga asri disini, dan alangkah baiknya jika bapak dan ibu guru mengajarkan siswa-siswanya untuk belajar mengenai manfaat serta fungsi kompos, yang nantinya kompos itu juga bermanfaat bagi pertumbuhan pohon-pohon yang ada di lingkungan sekolah ini (Sumber Data pada lampiran 6: 5.142).



Tampak pada berbagai kesempatan lain, Wara Srikandi juga selalu tampil sebagai Bunda yang murah hati dengan membagikan hadiah kepada tiga siswa SMPN 17 Kota Singapraja, atas keberhasilannya dalam memahami dan melaksanakan program UKS dan Adiwiyata. Adapun siswa yang mendapat hadiah adalah: Abdullah Ma'arif, siswa kelas 8G, Retno Ayu Lestari dan Putri Dwi Rahmawati, kelas 7D. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Singapraja yang ikut hadir bersama beberapa pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Singapraja, hanya berkesempatan memberikan kata pengantar sebelum sambutan dan pemberian hadiah oleh Wara Srikandi (Periksa Lampiran 1, Gambar 5.44).

Sejumlah kegiatan yang menempatkan Ketua TP PKK Kota Singapraja Wara Srikandi, sebagai pemeran utama dalam semacam panggung publik tersebut, sebenarnya hanya sebagian kecil dari contoh kegiatan sejenis yang berlangsung secara masif, terutama semenjak masa jabatan kedua Bagus Permadi sebagai Walikota Singapraja. Secara substantif, memang PKK memiliki sepuluh program kerja yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat. Namun demikian, secara administrasi pemerintah, sebenarnya sudah ada instansi-instansi pemerintah daerah yang memang dibentuk dan diberi anggaran publik untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Berkeanaan begitu seringnya Wara Srikandi mewakili Walikota Singapraja dalam berbagai acara di sekolah, Nur Rachmad, seorang guru sekolah menengah yang memiliki prestasi mengantarkan para peserta didik menang dalam berbagai lomba tingkat nasional, mengemukakan:

Ya gini ini tugas kami. Kadang kepala-kepala dijadikan kaki, kaki-kaki dijadikan kepala agar menang lomba dan olimpiade. Kalau lagi menang, masih mending kalau yang menyambut dan memberi penghargaan Kepala Dinas. Tapi kalau lagi menjelang pilkada, bolak-balik yang tampil ya mesti Bu Bagus Permadi. Padahal jujur nggak ada kaitan sama sekali antara yang kami lakukan dengan jabatan Bu Bagus Permadi. Ya kita nurut saja, kan semua juga instruksi kepala dinas (Sumber Data pada lampiran 6: 5.144).

Begitu jelas tetapi janggal mengamati kebiasaan yang berlangsung dalam hubungan antara berbagai SKPD Kota Singapraja dengan PKK Kota Singapraja, sehingga ada yang mengungkapkan bahwa para pejabat dan staf pemerintah daerah bertugas melaksanakan program sebaik-baiknya, sedangkan sambutan, peresmian, pemberian hadiah dan aneka bentuk pemberian peran dan kehormatan terkait program tersebut, merupakan wilayah kehormatan Wara Srikandi selaku Ketua TP PKK Kota Singapraja. Baik secara kebetulan maupun dengan sengaja, berbagai acara seremonial yang menempatkan Wara Srikandi sebagai tokoh sentral dalam acara tersebut, telah berhasil meningkatkan popularitas Wara Srikandi sebagai bakal calon walikota.

#### 4. Penggunaan Sumberdaya Pemerintah Daerah

Secara sederhana, sumberdaya publik daerah bisa dikategorikan menjadi tiga, yaitu: (1) sumberdaya finansial berupa APBD sebagaimana dipaparkan dalam uraian tentang PKK, (2) sumberdaya manusia berupa pegawai negeri sipil daerah, termasuk calon pegawai negeri sipil dan yang masih berstatus sebagai honorer di daerah, dan (3) sumberdaya prasarana dan sarana baik yang berupa aset tak bergerak maupun yang bergerak.

Di antara ketiga sumberdaya publik tersebut, yang pertama kali mendapat sorotan adalah sumberdaya anggaran daerah. Sebagaimana dibahas dalam uraian

tentang kegiatan TP PKK Kota Singapraja yang diketuai oleh Wara Srikandi, memang sulit sekali dibedakan antara kegiatan TP PKK dengan kegiatan SKPD Kota Singapraja. Sebagai contoh, hampir bisa dipastikan bahwa kegiatan TP PKK Kota Singapraja yang diselenggarakan di Kelurahan senantiasa menjadi kegiatan Pemerintah Kelurahan. Dalam kaitan ini, tidak hanya sumberdaya berupa prasarana milik Pemerintah Kelurahan yang dimanfaatkan oleh TP PKK untuk berkegiatan, melainkan sebagiannya juga anggaran atau dana milik Pemerintah Kelurahan. Pola yang sama juga berlaku apabila kegiatan dilaksanakan di tingkat TP PKK Kecamatan. Tidak bisa dipisahkan lagi antara kegiatan TP PKK dengan kegiatan Pemerintah Kecamatan.

Memperhatikan kegiatan PKK yang massif dan dengan frekuensi yang cukup tinggi yang senantiasa menghadirkan atau dihadiri oleh Wara Srikandi, maka jauh hari sebelum masa kampanye telah ada tuduhan terhadap Wara Srikandi bahwa dirinya berkampanye dengan menggunakan anggaran dan fasilitas milik pemerintah daerah. Secara eksplisit, tuduhan tersebut diberikan oleh Sri Sendari yang merupakan pesaing utama Wara Srikandi. Di bagian akhir dari berita tentang para bakal calon walikota dan wakil walikota Singapraja, disebutkan polemik antara Sri Sendari dan Wara Srikandi. Kendati demikian, dalam surat kabar yang sama, justru gambar Wara Srikandi dan sanggahannya yang diletakkan di halaman pertama halaman Singapraja Region (Periksa Lampiran 1, Gambar 5.45).



Sedang Bacawali Singapraja yang daftar lewat PDIP, Wara Srikandi atau akrab disapa Bunda Wara Srikandi membantah apabila kegiatan yang ia dan timnya lakukan menggunakan dana APBD Kota Singapraja.

Heri dengan tegas mengungkapkan, selama ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan menggunakan uang pribadi, seperti Hidup Sehat ala Bunda (SAB) dan pengobatan gratis. Beberapa kegiatan yang dikemas bersamaan dengan PKK dan Posyandu pun, Bunda kerap memberikan bantuan dari uang pribadi. (Sumber Data pada lampiran 6: 5.145).

Selain sumberdaya publik berupa tempat dan gedung dan anggaran publik daerah sebagaimana dibahas dalam uraian tentang PKK, ternyata juga masih ada sumberdaya sarana prasarana publik lain yang digunakan oleh pasangan Wara Srikandi dan Wibisono.

Berdasarkan telaah penulis terhadap pola kegiatan yang dilaksanakan oleh PKK, SKPD, dan Wara Srikandi selaku politisi daerah, memang sulit sekali untuk dipisah-pisahkan, dalam arti terjadi percampuran antara anggaran Kantor Kelurahan atau Kecamatan, anggaran SKPD, anggaran PKK dan anggaran pribadi Wara Srikandi. Jadi, meskipun tidak bisa dipastikan jumlah dan persentasenya, tetapi bisa dipastikan telah terjadi pemanfaatan sumberdaya anggaran publik untuk kepentingan kampanye Wara Srikandi.

Sumberdaya publik kedua berkenaan dengan pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil, dan honorer daerah serta guru wiyata bhakti. Semasa Orde Baru, sumberdaya manusia berupa para pegawai negeri sipil secara otomatis menjadi anggota Golkar. Beberapa kepala satuan kerja pemerintah, bisanya juga secara otomatis menjadi pengurus Golkar, sedangkan para pegawai negeri sipil yang aktif berkegiatan politik untuk Golkar, disebut kader fungsional. Setelah reformasi, secara

formal memang ada larangan bagi pegawai negeri sipil untuk berpolitik praktis, bahkan ada sanksinya bila terbukti menjadi anggota organisasi politik. Kendati demikian, tidak berarti pegawai negeri sipil di daerah bisa melepaskan diri sama sekali dari kegiatan politik praktis. Ini terjadi karena ada unsur kesengajaan dari para politisi, terutama calon kepala daerah, untuk melibatkan dan bahkan mengerahkan pegawai negeri sipil daerah dalam kegiatan kampanye terutama untuk calon petahana dan orang lain yang didukung oleh kepala daerah petahana, seperti misalnya calon kepala daerah yang memiliki hubungan keluarga dengan kepala daerah petahana.

Berkenaan dengan pengerahan pegawai negeri sipil daerah semasa kampanye pemilihan kepala daerah, data empirik yang menunjukkan adanya kegiatan kampanye Wara Srikandi yang mengerahkan pegawai negeri sipil daerah tidak hanya bisa diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara yang penulis lakukan, tetapi juga sudah menjadi pengetahuan publik Kota Singapraja, karena juga diberitakan dan menjadi salah satu masalah yang ditangani oleh Panwaslu Kota Singapraja, sebagaimana dimuat di beberapa media cetak dan online.

Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Kota Singapraja memanggil tim sukses pasangan calon Wara Srikandi – Wibisono (DaDi). Pemanggilan untuk meminta klarifikasi atas temuan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh paslon yang diusung Partai Golkar, PAN dan belasan parpol non parlemen tersebut.

Sejumlah temuan pelanggaran yang dilakukan paslon DaDi antara lain, memobilisasi guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dalam sebuah kegiatan kampanye. Juga ada salah seorang anggota tim sukses yang menggunakan fasilitas negara untuk kegiatan kampanye dan menggelar kampanye di luar zona kampanyenya.

Anggota Panwaslu divisi penindakan dan pelanggaran kampanye, Fajar Santoso, mengatakan, pihaknya memiliki sejumlah bukti yang bakal disampaikan ke tim sukses DaDi untuk dimintai klarifikasi Ada seorang guru yang melapor ke kami bahwa ia menerima pesan pendek dari atasannya. Isinya, meminta guru itu turut meramaikan kampanye DaDi" (Sumber Data pada lampiran 6: 5.147).

Perihal pengerahan para pegawai negeri sipil serta honorer daerah dalam kegiatan kampanye ini memang agak sulit dibuktikan, lebih-lebih bila pegawai negeri yang bersangkutan tidak memakai seragam saat mengikuti kampanye. Namun demikian, berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, menunjukkan bahwa perintah untuk ikut dalam kegiatan kampanye disampaikan secara personal. Modus yang paling sering adalah dengan memanfaatkan layanan pesan singkat (SMS), dari pimpinan SKPD kepada para stafnya, atau misalnya dari Kepala Dinas Pendidikan kepada Kepala Sekolah, untuk selanjutnya dari kepala sekolah kepada para guru, baik yang berstatus sebagai pegawai negeri sipili, calon pegawai negeri sipil, hingga guru honorer, sukwan, atau guru wiyada bhakti, yang cenderung jauh lebih penurut dibanding guru yang sudah menjadi pegawai negeri.

Kejadian pemberian perintah mengikuti kampanye melalui layanan pesan singkat tersebut ternyata tidak hanya berhasil penulis temukan, tetapi juga sudah dilaporkan kepada pihak terkait, khususnya kepolisian, hingga kemudian apa yang dilakukan oleh Wara Srikandi dan Wibisono juga diketahui oleh Panwaslu karena dilaporkan oleh Tim Sukses Sri Sendari - Priyatmoko Oetomo.



Terpisah, Sekretaris tim pemenangan paslon Sri Sendari – Priyatmoko Oetomo (SR-MK), Hadi Santoso, mengatakan, pihaknya sudah melapor ke Panwaslu terkait dugaan mobilisasi guru PNS oleh tim DaDi.

“Ada seorang guru yang melapor ke kami bahwa ia menerima pesan pendek dari atasannya. Isinya, meminta guru itu turut meramaikan kampanye DaDi,” ucap Hadi.

Ia berharap Panwaslu bekerja secara profesional dengan memeriksa temuan pelanggaran itu. “Penyelidikan atas temuan pelanggaran adalah wewenang Panwaslu. Kami akan mempertanyakan kinerja mereka jika tidak ada tindakan tegas,” kata Hadi (Sumber Data pada lampiran 6: 5.148).

Sebagaimana telah dibahas dalam uraian tentang kegiatan TP PKK, tampak jelas ada penggunaan sumberdaya publik berupa sarana dan prasarana pemerintah oleh Wara Srikandi. Ini dilakukan jauh sebelum masa kampanye dimulai, atau semasa yang bersangkutan masih belum mendapatkan legalitas sebagai calon Walikota Singapraja. Kegiatan demikian dalam kenyataannya tetap dilaksanakan ketika sudah memasuki masa kampanye, sehingga sebenarnya senantiasa terjadi pelanggaran terhadap dua aspek larangan bagi seorang calon kepala daerah, yaitu: berkampanye di luar waktu yang telah ditetapkan, dan menggunakan sarana atau prasarana milik pemerintah untuk kampanye.

Kendati jelas-jelas merupakan pelanggaran, ternyata apa yang dilakukan oleh Wara Srikandi justru tidak pernah dilaporkan kepada Panwaslu, atau sekurang-kurangnya menjadi wacana publik masyarakat Kota Singapraja. Kejadian yang justru tampil ke permukaan adalah yang menyangkut penggunaan mobil dinas untuk berkampanye oleh fungsionaris partai politik yang ikut mencalonkan pasangan Wara Srikandi dan Sofyan di Jarwoko.

Secara rinci Fajar menjelaskan, memobilisasi guru berstatus PNS terjadi di Kecamatan Lowokwaru dan Klojen. Di dua kecamatan tersebut guru-guru terlihat hadir langsung di lokasi kampanye pasangan DaDi.

Sementara penggunaan fasilitas negara dilakukan oleh seorang anggota DPRD Kota Singapraja yang menggunakan mobil dinas untuk kegiatan kampanye DaDi.

“Mobil dinas termasuk fasilitas negara. Sehingga penggunaannya saat kampanye merupakan pelanggaran aturan kampanye,” tegasnya.

Sedangkan pelanggaran zona kampanye dilakukan di Kecamatan Kedungkandang, padahal bukan jadwalnya (Sumber Data pada lampiran 6: 5.149)

Sumberdaya manusia Pemerintah Daerah yang juga dimanfaatkan oleh pasangan Wara Srikandi dan Wibisono melalui kewenangan Bagus Permadi sebagai Walikota Singapraja adalah para Camat, Lurah, Kepala Dusun, hingga Ketua RW dan Ketua RT yang bukan pegawai negeri sipil. Berbeda dari Kepala Desa yang merupakan pejabat hasil pemilihan, secara kepegawaian Lurah adalah pegawai negeri sipil daerah, sehingga bisa dipindah-tugaskan, dipromosikan ataupun dimutasi oleh walikota. Karena itu, para Camat beserta staf, para Lurah beserta perangkat kelurahan sepenuhnya berada di bawah kontrol walikota.

Posisi dalam hirarkhi kekuasaan antara Walikota dengan para Camat beserta staf, para Lurah beserta perangkat kelurahan tersebut memungkinkan Bagus Permadi untuk melakukan pengaturan, baik dalam penempatan maupun penugasan demi peningkatan popularitas dan elektabilitas Wara Srikandi. Demikian juga, karena memahami bahwa kedudukannya sangat ditentukan walikota, maka loyalitas para Camat beserta staf, para Lurah beserta perangkat kelurahan senantiasa diberikan

kepada Bagus Permadi selaku Walikota Singapraja, tidak hanya dalam hubungannya dengan tugas kedinasan, tetapi seringkali juga perintah di luar tugas kedinasan.

Nur Rohmah, seorang staf kelurahan menyampaikan bahwa dalam setiap surat keputusan pengangkatan dalam jabatan tertentu, selalu ada kalimat tambahan bahwa pejabat tersebut juga harus melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota Singapraja. Arti tugas-tugas lain tersebut selalu dipahami secara sangat luas, yang bahkan misalnya ketika pimpinan, yang dalam hal ini adalah Walikota Singapraja Bagus Permadi, punya hajat keluarga dan sebagainya.

Ya tidak Pak Wali dan Bu Wali saja. Sebenarnya semua pimpinan selalu begitu. Misalnya keluarga Pak Camat punya hajatan mantu, maka yang biasanya jadi panitianya ya para stafnya. Itu kalau hajatan kecil. Nah kalau Pak Wali dan Bu Wali yang punya hajat, nggak usah jauh-jauh, waktu putranya meninggal, ya semuanya jadi panitia sekaligus semacam undangan yang ikut berdoa dan selamat di rumah dinas. Yang seperti ini juga termasuk kalau Bu Wali kemana-mana atau punya kegiatan apa begitu. Semuanya bisa *tumplek blek* di tempat membantu apa yang diperlukan Bu Wali (Sumber Data pada lampiran 6: 5.150).

Ungkapan bermakna kurang lebih sama juga dikemukakan oleh Lurah Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang, Kota Singapraja. Saat melakukan wawancara ini memang terjadi setelah Pemilukada Kota Singapraja 2013 sudah menetapkan Moch. Anton dan Sutiaji sebagai pemenang. Ini harus dilakukan karena ketika masa kampanye, selalu saja ada halangan untuk bisa mewawancarai Lurah-lurah di Kota Singapraja.

Iya mas, maaf ya, waktu itu belum bisa ditemui. Mas tau sendiri waktu itu bagaimana saya ini bingung melihat warga saya sulit diarahkan ke Bunda. Saya sampai tidak tau harus melakukan apa lagi. Bingung saya, sampai tidak lagi bisa tenang memikirkan pekerjaan rutin saya. Ya bagaimanapun saya



seperti terhantui kalau bu Bagus Permadi kalah, kok *yo ndilalah* (ternyata), itu terjadi di sini, padahal saya sudah mati-matian mengusahakan kemenangan untuk beliau. *Abot mas, temen abot* (berat mas, benar-benar berat). Tapi ya nggak apa-apa, siapa pun walikotanya kan saya tetap harus menjalankan tugas sesuai perintah atasan (Sumber Data pada lampiran 6: 5.151).

Keterlibatan karena perintah atau permintaan dari atasan tidak hanya dilakukan oleh mereka yang menduduki jabatan sebagai birokrasi di Pemerintah Kota Singapraja, tetapi juga turun sampai jajaran Lurah. Secara umum, para Lurah terutama yang masih baru, mengakui dan sangat menghargai Bagus Permadi dan Wara Srikandi, sebab atas kebaikan dan kepercayaan keduanya, mereka bisa diangkat menjadi Lurah. Bentuk pengakuan dan penghargaan tersebut dilakukan antara lain dengan berusaha sungguh-sungguh memenangkan Wara Srikandi dalam Pilkada 2013. Tidak jarang misalnya, seorang Lurah harus menggunakan uang pribadi untuk membantu meningkatkan elektabilitas Wara Srikandi dan Wibisono.

Ya saya harus tau posisi mas, tanpa diberi perintah, saya juga yakin lurah-lurah di lain tempat juga berfikiran demikian. Tapi wilayah ini adalah *kandang banteng* (Basis PDIP) mas, susah untuk mengkondisikan, padahal saya sudah habis banyak. Saya melakukan itu hanya ingin menunjukkan loyalitas saya (Sumber Data pada lampiran 6: 5.152).

Jaringan lain, yang memiliki hubungan langsung dengan organisasi pemerintahan, tetapi sebenarnya bukan merupakan birokrasi pemerintahan adalah keberadaan RW dan RT. Para ketua RT dan Ketua RW adalah warga setempat yang dipilih melalui musyawarah oleh sesama warganya untuk menjadi Ketua RT atau Ketua RW. Mereka ini menjadi penghubung antara warga masyarakat dengan Pemerintah Kelurahan. Segala layanan Pemerintah Kelurahan, yang akan berlanjut

hingga Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi, dan bahkan Pemerintah Pusat, senantiasa diawali dari surat pengantar Ketua RT dan Ketua RW. Demikian juga, semua kebijakan Pemerintah Kota Singapraja yang harus diketahui oleh semua warga Kota Singapraja, senantiasa dikomunikasikan dan disampaikan melalui para Ketua RT dan Ketua RW. Karena itu, ada hubungan sangat erat antara Pemerintah Daerah dengan para Ketua RT dan Ketua RW.

Ada dua butir ketentuan tentang RT dan RW yang sangat mungkin dikelola sedemikian rupa oleh seorang walikota untuk kepentingan politiknya. Pertama, butir tentang hak-hak pengurus RT dan RW. Kedua, butir tentang sumber dana RT dan RW. Berkenaan dengan hak-hak pengurus RT dan RW, Pasal 14 Perda Kota Singapraja Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga, misalnya, menegaskan bahwa selain hak menyampaikan aspirasi dan saran kepada Lurah dan instansi pemerintah, pengurus RT dan RW juga berhak mendapatkan insentif dari Pemerintah Daerah. Selanjutnya, besaran insentif tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Penelusuran terhadap besaran insentif bagi pengurus RT dan RW bisa dilakukan berdasarkan informasi lebih belakangan yang disampaikan oleh Wakil Walikota Singapraja pasca Bagus Permadi, yaitu: Sutiaji. Dari pemberitaan terkait, diperoleh informasi bahwa meskipun belum memiliki Perda yang secara spesifik mengatur pemberian dan besaran insentif bagi pengurus RT dan RW, Bagus Permadi telah menganggarkan Rp. 85 milyar untuk insentif ketua RT/RW, modin dan guru mengaji di Kota Singapraja.

Singapraja-Pemerintah Kota Singapraja siap menggelontorkan dana sebesar Rp 100 miliar untuk ketua RT/RW, modin dan guru ngaji di wilayahnya. Dana yang akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2014 itu sebagai insentif dari pemerintah kepada mereka.

Wakil wali Kota Singapraja, Sutiaji, mengatakan tahun lalu, saat dipimpin Wali Kota Bagus Permadi, Kota Singapraja juga menggelontorkan dana sejenis sebesar Rp 85 miliar. Meski bukan pegawai pemerintah, peran RT/RW dan modin ikut mengefektifkan layanan publik. "Insentif untuk memperbaiki layanan publik," kata Sutiaji, Ahad 22 September 2013 (Sumber Data pada lampiran 6: 5.153).

Sumber pemberitaan lain menyebutkan bahwa semasa Walikota Bagus Permadi, insentif bagi Ketua RT dan RW sebesar Rp. 100 ribu per bulan. Jumlah ini memang tidak cukup besar. Namun demikian, karena pada periode-periode sebelumnya tidak diberikan secara rutin, pemberian itu telah diterima dengan sukacita oleh para Ketua RT dan RW.

Pemerintah Kota Singapraja, Jawa Timur, dalam waktu dekat ini akan menaikkan insentif ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) daerah itu, dari Rp100 ribu/bulan menjadi Rp150 ribu/bulan.

Wakil Wali Kota Singapraja Sutiaji di Singapraja, Senin, mengemukakan kenaikan insentif tersebut masih belum bisa direalisasikan tahun ini, namun tahun depan karena harus menyusun kebutuhan anggarannya.

"Insya Allah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun depan kita ajukan dan langsung bisa direalisasikan. Sekarang kita siapkan dulu perangkat dan susunan kebutuhan anggarannya," kata politisi dari PKB tersebut (Sumber Data pada lampiran 6: 5.154).

Dalam praktiknya, karena belum ada ketentuan yang mengatur, tidak hanya jumlahnya yang bisa ditambah oleh walikota, tetapi juga waktu penerimaannya. Sebagaimana yang terjadi pada saat menjelang Pemilu, insentif bagi Ketua RT/RW, modin dan guru mengaji, ternyata diberikan menjelang tahapan kampanye Pemilu. Namun, dalam kasus pengurus RT dan RW, pemberian tidak diberikan



secara massal sebagaimana yang terjadi pada guru mengaji. Pembagian insentif ketua RT dan RW diberikan oleh Lurah dalam sebuah rapat yang mengundang seluruh RT dan RW di satu kelurahan.

Semua diundang, RT dan RW di kelurahan. Ada Pak Camat, tapi hanya menyambut sebentar. *Lajeng* Pak Lurah menjelaskan. Pertamanya ucapan terimakasih. Terus bilang *njaluk tulung* jangan dilihat jumlahnya, karena sebenarnya jadi RT dan RW itu pengabdian masyarakat. *Biyen malah bayarane paido*. Makanya syukur alhamdulillah, terimakasih kepada Pak Wali dan Bu Wali. Setelah itu dijelaskan kalau Pak Wali dan Bu Wali mengharapkan agar semua mensukseskan Pilkada. Kalau jagonya menang, pasti ada tambahan khusus untuk Pak RT dan Pak RW. Kalau tidak salah setiap orang akan mendapat Rp. 5 juta. Tapi ternyata kan kalah. Di sini kan hampir semuanya maunya Abah Anton. Kalau sudah gitu, dikasih kaos saja tidak mau memakai. Ya, *nggih ngoten niku*, setiap orang *nggaduh* pilihan *piyambek-piyambek* (Sumber Data pada lampiran 6: 5.155).

Selain didasarkan pada prinsip pertukaran dengan kepentingan pribadi, sebagaimana pada kasus insentif tersebut, untuk para pengurus RT dan RW pertukaran juga bisa dilakukan terhadap kolektiva seluruh warga RT atau RW. Pertukaran jenis ini pada dasarnya dilakukan berdasar adanya aturan yang membolehkan Pemerintah Daerah mengalokasikan APBD untuk bantuan baik berupa anggaran maupun program pembangunan. Pasal 21 Perda Kota Singapraja Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga, misalnya, menyebutkan bahwa sumber dana RT dan RW diperoleh dari: (a) swadaya masyarakat berdasarkan hasil musyawarah mufakat; (b) anggaran yang dialokasikan dalam APBD; (c) bantuan dari Pemerintah dan pemerintah Provinsi; dan (d) bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Sebagaimana disinggung dalam uraian tentang kunjungan Wara Srikandi meresmikan Himpunan Pengelola dan Pemakai Air Minum (HIPPAM) di RW 05 Kelurahan Wonokoyo, Kecamatan Kedungkandang, Kota Singapraja, kegiatan yang sama juga dilakukan di Kelurahan Tlogowaru. Semasa jabatan Walikota Singapraja dijabat oleh Bagus Permadi, Kelurahan Tlogowaru merupakan salah satu kelurahan yang terletak di dataran tinggi, sehingga PDAM Kota Singapraja belum memberikan pelayanan sebagaimana di wilayah lain. Kebutuhan air bersih masyarakat dilayani oleh HIPPAM yang memiliki dua sumur pompa. Namun demikian karena tidak ada perimbangan antara kemampuan dengan kebutuhan, masih sangat dibutuhkan adanya sumur pompa baru sekaligus sarana dan prasarna instalasinya.

Masalah air bersih ini sebenarnya sudah mengemuka dan menjadi aspirasi masyarakat ketika Bagus Permadi dan Basukarno mencalonkan diri dalam Pilkada 2008 (Periksa Lampiran 1, Gambar 5.46). Namun demikian, hingga Bagus Permadi hendak mengakhiri masa jabatannya yang kedua, kebutuhan dan aspirasi tentang air bersih tersebut tidak mendapatkan ditanggapi oleh Walikota Singapraja. Menjelang masa kampanye, pengurus HIPPAM Kelurahan Tlogowaru bersama Lurah Tlogowaru dan Camat Kedungkandang, mengadakan pertemuan karena ternyata Ketua TP PKK Kota Singapraja, Wara Srikandi berkenan memberikan bantuan berupa mesin pompa baru dan sejumlah pipa untuk perluasan layanan, khususnya di dusun Genengan RW 5, Kelurahan Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang, Kota Singapraja. Dari kasus ini bisa disimpulkan bahwa dalam alokasi bantuan bagi

masyarakat, dalam bentuk prasarana dan sarana air bersih, tidak terlepas dari kepentingan politik Bagus Permadi dan Wara Srikandi.

Dari seluruh uraian tersebut, bisa disimpulkan bahwa pasangan calon Wara Srikandi dan Wibisono telah menggunakan sumberdaya publik berupa pegawai pemerintah daerah, anggaran pemerintah daerah, dan sarana prasarana milik pemerintah daerah untuk meningkatkan elektabilitas mereka. Pelanggaran-pelanggaran ini memang sempat dibahas di Panwaslu. Namun demikian, penanganan kasus-kasus yang terjadi tidak berlanjut hingga ke ranah hukum, lebih-lebih setelah hasil akhir dari pemilihan kepala daerah tersebut tidak dimenangkan oleh Wara Srikandi dan Wibisono.

#### 5. Pembentukan Tim Pemenangan dan Juru Kampanye

Dari sejumlah strategi peningkatan elektabilitas Wara Srikandi dan Wibisono dalam Pemilukada Kota Singapraja 2013, strategi pembentukan tim pemenangan dan juru kampanye ini yang berkaitan langsung dengan pengertian konvensional kampanye dalam Pemilu dan Pemilukada di Indonesia. Dalam ungkapan sehari-hari, tim pemenangan pasangan Wara Srikandi dan Wibisono ini sering disebut sebagai Tim Sukses DaDi.

Proses pembentukan tim sukses DaDi, yang terdiri dari para relawan berlatar belakang partai dan bukan, ternyata juga mencerminkan proses pemerolehan legalitas pasangan DaDi. Secara logika, seandainya Wara Srikandi mendapatkan rekomendasi dari DPP PDIP, tentu tim suksesnya juga berasal dari para fungsionaris dan anggota



PDIP Kota Singapraja. Demikian juga, seandainya Wara Srikandi mendapatkan rekomendasi dari Partai Demokrat, tentu unsur utama tim suksesnya juga berasal dari Partai Demokrat Kota Singapraja.

Kenyataannya, Wara Srikandi yang berpasangan dengan Wibisono harus menggunakan legalitas PAN dan Partai Golkar. Karena itu, meskipun mesin politik dari kedua partai utama yang mencalonkan Wara Srikandi dan Wibisono ini tetap terlibat dalam strategi pemenangan dan menjadi unsur formal dalam kampanye-kampanye konvensional, secara organisatoris tim pemenangan pasangan ini justru tidak berasal dari partai politik, baik PDIP, PAN maupun Partai Golkar.

Paling tidak ada dua figur yang menonjol dari luar PAN dan Partai Golkar dalam tim pemenangan DaDi. Mereka adalah Yustiaji, Ketua Tim Pemenangan DaDi, dan Johan Budhie Sava, Bendahara Tim Pemenangan DaDi. Dalam berbagai kesempatan, kedua figur ini yang senantiasa tampil ke publik dan menjadi juru bicara bila ada persoalan yang menyangkut pasangan Wara Srikandi dan Wibisono.

Sebagaimana diketahui, bersamaan dengan Pemilukada Kota Singapraja 2013, di tingkat nasional juga sedang terjadi konsolidasi yang dilakukan oleh para bakal calon presiden dan wakil presiden. Salah satu bakal calon presiden yang sedang gencar melakukan penggalangan dukungan adalah Prabowo Subiyanto. Karena itu, tidak hanya mereka yang berasal dari Partai Gerindra yang beramai-ramai menunjukkan dukungan kepada Prabowo Subiyanto. Salah satu bentuk dukungan kolektif yang bersifat lintas partai atau bahkan sama sekali bukan partai adalah dengan mendirikan atau bergabung dengan komunitas Gardu Prabowo.

Secara keorganisasian, Gardu Prabowo juga memiliki struktur sejak dari Pusat, Provinsi, hingga Kabupaten dan Kota. Yustiaji, yang kemudian menjadi Ketua Tim Pemenangan DaDi adalah Ketua Litbang DPD Gardu Prabowo Jawa Timur. Berbeda dari rekannya, Habib Tarmidzi selaku Ketua DPC Gardu Prabowo Kota Singapraja, Yustiaji yang berlatar belakang Partai Merdeka, bersama sejumlah rekannya menunjukkan dukungan penuh kepada Wara Srikandi dan Wibisono. Akan halnya Habib Tarmidzi, memberikan dukungan kepada pasangan calon bukan dari partai politik, Ahmad Mujais-Yunar Mulya.

Sebelum menjadi Ketua Tim Pemenangan DaDi, Yustiaji bersama rekan-rekannya membentuk Koalisi Singapraja Bersatu (KSB), yang kemudian memberikan dukungan kepada Wara Srikandi dan Wibisono. Sebagaimana diberitakan, dukungan KSB kepada DaDi tidak dilakukan secara tertutup, melainkan justru terbuka termasuk dengan menampilkan atribut Gardu Prabowo. Karena komitmen yang diberikan secara terbuka dan keberhasilannya mengorganisasi Koalisi Singapraja Bersatu itu pula, maka akhirnya Yustiaji dipilih menjadi Ketua Tim Pemenangan DaDi.

Bacawali Wara Srikandi ditunggu pendukungnya saat menjalani tes kesehatan pada hari terakhir di RSSA Kota Singapraja, Jumat (1/3/2013). Menariknya, beberapa orang pendukung Heri Pudji itu beratribut Gardu Prabowo dan juga membawa mobil Gardu Prabowo. Padahal, di Pilwali Kota Singapraja, Gardu Prabowo tampil sebagai pengusung pasangan non-Parpol (independen), Ahmad Mujais-Yunar Mulya.

Kepada wartawan, dua orang pendukung Bunda-panggilan Wara Srikandi mengaku dari DPD Gardu Prabowo Jatim. Tetapi, mereka juga termasuk dalam KSB (Koalisi Singapraja Bersatu yang merupakan gabungan 18 parpol non parlemen) yang mendukung Wara Srikandi. Yustiaji, Ketua KSB yang juga Ketua Litbang DPD Gardu Prabowo Jatim mengatakan, anggota KSB mayoritas berasal dari Gardu Prabowo. Dia juga menuding bahwa Habib

Tarmidzi selaku Ketua DPC Gardu Prabowo Kota Singapraja, selama ini jalan sendiri.

"Kita serta merta ingin mendukung Bunda. Saya dari Partai Merdeka dan juga ketua KSB. Nah, KSB ini isinya mayoritas Gardu Prabowo," tegas Yustiaji (Sumber Data pada lampiran 6: 5.157).

Figur lain yang menonjol dalam Tim Pemenangan DaDi adalah Johan Budhie Sava, seorang pengusaha yang bergerak dalam bidang penerbitan dan toko buku Toga Mas. Johan Budhie Sava sangat dikenal terutama oleh warga Kota Singapraja yang mencintai buku, baik penulis maupun pembaca, serta para seniman di Kota Singapraja. Sosok ini juga dikenal memiliki sikap rendah hati karena merintis usahanya dari nol.

Toga Mas, toko buku Johan Bedhie Sava, tidak hanya dikenal karena potongan harga yang berlaku setiap hari, tetapi juga dikenal sebagai toko buku yang mengizinkan para pengunjung untuk membaca-baca buku yang diminati. Bukan hanya itu, Johan Budhie Sava juga dikenal sebagai salah satu penyantun bagi para seniman di Kota Singapraja. Saat sejumlah seniman kesulitan mencari tempat untuk menggelar acara, Johan Budhie Sava malah mengizinkan mereka untuk menggelar karyanya di halaman Toko Buku Toga Mas.

Johan Budhi Sava meninggal ketika penulis masih terus mengumpulkan data pelengkap penelitian, yaitu: 4 April 2014. Berkenaan dengan sosok Johan Budhie Sava, rasa hormat warga Kota Singapraja, khususnya para seniman terhadap dirinya dapat dilihat dari inisiatif sejumlah seniman untuk menggelar acara "*Tribute to Johan Budhie Sava*" di sebuah warung apresiasi seni di Kota Singapraja, 10 April 2014. Sebagai ilustrasi undangan (Periksa Lampiran 1, Gambar 5.47).



"Johan amat berjasa bagi kita. Tidak hanya sekedar menjadi tempat curhat, Johan juga banyak mendorong saya khususnya, termasuk melahirkan para seniman-seniman baru agar karya kita bisa mewarnai rak-rak buku Toga Mas" (Aji Prasetyo, penulis buku "**Hidup itu Indah**", yang cukup terkenal dan sempat dicetak dua kali 2011 dan 2012).

"Suatu ketika saya diundang oleh Pak Johan. Dia lalu memberi kami amplop yang berisi uang. Nilainya saat itu lebih dari cukup untuk membuat satu album" (Abia Kana, vokalis dan musisi Swara Akustik, yang memulai rekaman perdana karena jasa Johan Budhi Sava)

"Dia itu orang baik. Satu pesannya yang saya ingat hingga sekarang adalah tetaplah berbuat baik pada siapapun, dan sekecil apapun bentuknya," (Herdi, seorang wirausahawan yang merasa kesal tetapi kemudian meneladani sikap hidup sederhana Johan Budhie Sava yang selalu mengenakan busana hitam putih kendati sudah menjadi pengusaha besar).

(Sumber Data pada lampiran 6: 5.159)

Dari uraian tersebut tampak jelas bahwa Johan Budhie Sava sebenarnya merupakan figur yang dapat diharapkan menarik simpati para pecinta buku, penulis dan seniman di Kota Singapraja. Segmen pemilih ini jelas tidak bisa dijangkau oleh mesin politik PAN maupun Partai Golkar. Lebih-lebih dengan menempatkan Johan Budhi Sava sebagai bendahara Tim Pemenangan DaDi, diharapkan akuntabilitas di mata masyarakat pasangan DaDi menjadi semakin baik (Periksa Lampiran 1, Gambar 5.48).

Ketua Tim Pemenangan DaDi, Yuestiaji, mengatakan rekening sumbangan dana itu dinamakan Rekening Gotong Royong (RGR) di BCA dengan no rekening 38050771111 atas nama Johan Budhie Sava. Sementara itu, Bendahara Tim Pemenangan DaDi, Johan Budhie Sava menambahkan warga Singapraja yang ingin menyumbang ke DaDi jumlahnya tidak boleh lebih dari Rp. 50 juta untuk perorangan dan Rp. 350 juta untuk instansi. Johan mengatakan hal itu sesuai dengan undang-undang dari KPU. Bahkan nomor rekening RGR pun, lanjut Johan sudah didaftarkan di KPU (Sumber Data pada lampiran 6: 5.160).

Berdasarkan hasil diskusi kelompok terfokus bersama para wartawan di Kota Singapraja, diperoleh kesimpulan bahwa penunjukkan Yustiaji dan Budhie Sava sebagai Ketua dan Bendahara Tim Pemenangan DaDi dimaksud agar ada pembagian tugas antara mesin partai dengan tim pemenangan. Tim Pemenangan lebih memusatkan perhatian pada potensi pemilih di luar anggota dan simpatisan PAN dan Partai Golkar, sedangkan para fungsionaris dan kader PAN serta Partai Golkar diharapkan tetap fokus berkampanye bagi simpatisan dan anggota partai masing-masing.

Selain membentuk Tim Pemenangan DaDi, yang Ketua dan Bendaharanya tidak berasal dari unsur PAN dan Partai Golkar, dengan maksud agar masing-masing memiliki fokus dalam meningkatkan elektabilitas Wara Srikandi dan Wibisono, juga ada dukungan sangat besar dari Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Singapanji yang menjabat sebagai Bupati Singapanji.

Dibanding para tokoh PAN, baik Singapraja Raya maupun Jawa Timur, Rendra Kresna jauh lebih sering muncul dalam advertorial Wara Srikandi dan Wibisono di berbagai media cetak. Melalui advertorial tersebut, diharapkan seluruh anggota dan simpatisan Partai Golkar dan simpatisan Rendra Kresna, yang berasal dari etnik Madura, secara bersama-sama menjatuhkan pilihan politiknya pada Wara Srikandi dan Wibisono.

Ada sekitar 30.000 simpatisan Partai Golkar Kabupaten Singapanji yang berasal dari Kota Singapraja, Warga Singapraja asal Pamekasan dan Madura serta kelompok-kelompok pensiunan PNS Kabupaten Singapanji yang jumlahnya mencapai puluhan ribu telah diklaim Kresna akan mengikutinya

pula. Simpatisan dan kader Partai Golkar Kota Singapraja juga berjumlah sekitar 24.000, PAN dalam kalkulasinya telah memiliki aset pemilih hingga 15.000 orang, Bagus Permadi sendiri memiliki loyalis sebanyak 30.000 orang, melalui organisasi binaan Bunda melalui organisasi PKK mencapai 60.000 Orang, Bagus Permadi juga menghitung jumlah orang tua yang berada di rumah belajar bentukan Bunda sejak tahun 2009 berjumlah 10.000 orang, Komunitas 20.000 orang, para pengusaha pribumi, tionghoa, dan komunitas non muslim 60.000-80.000 orang, dan lain sebagainya sehingga total DaDi memiliki 280.000 suara (Sumber Data pada lampiran 6: 5.162).

Tidak hanya Rendra Kresna yang turun ikut membantu secara *all out* kemenangan, melainkan juga salah satu putranya yang juga terjun dalam dunia politik, Kresna Dewanata Prosakh, yang membentuk Bolo Dewa. Tercermin dalam namanya, mereka ini adalah anak-anak muda yang menjadi teman Dewanata Prosakh, yang akan digerakkan untuk memenangkan pasangan Wara Srikandi dan Wibisono (Periksa Lampiran 1, Gambar 5.49).

Selain melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, baik dari kalangan partai politik maupun sosial dan keagamaan, pasangan Wara Srikandi dan Wibisono yang didukung oleh walikota petahana Bagus Permadi, juga melibatkan sejumlah politisi nasional dalam kegiatan kampanye mereka.

Dalam sebuah acara Rakorda DPD PAN Kota Singapraja yang dilaksanakan di Gedung Kesenian Gajayana Singapraja, Lesmono berjanji akan menyumbang suara sebanyak 45 ribu dengan melibatkan sejumlah 2000 kader inti yang tersebar mulai DPD hingga kelurahan, sehingga di masing-masing fraksi akan ditarget minimal 3000 suara. Dalam acara tersebut dilaksanakan pula sebuah acara inisiasi dalam bentuk penyematan baju PAN yang dilakukan oleh Ketua DPW PAN Jawa Timur Ainur Rofiq.



Sejak mendaftarkan diri sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota, Wara Srikandi dan Wibisono juga menghadirkan Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali, Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakrie, Dewan Pembina DPP Partai Golkar Akbar Tanjung, dan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa untuk mengkampanyekan Wara Srikandi dan Wibisono.

Suryadharma Ali hadir 24 Maret 2013 untuk menemui calon Walikota Singapraja dan Wakil Walikota Singapraja, Wara Srikandi dan Wibisono, di Hotel Tugu Singapraja (Periksa Lampiran 1, Gambar 5.50). Pertemuan ini juga dihadiri oleh 20 partai koalisi yang mendukung pasangan DaDi. Suryadharma Ali menyampaikan dukungannya kepada pasangan DaDi, sekaligus menjanjikan akan menunjuk Juru Kampanye khusus untuk pasangan tersebut.

“Secara tegas kita dari PPP sudah masuk dalam koalisi partai itu. Jadi kami sangat mendukung pasangan yang memiliki sebutan DaDi itu, Jika memang diperlukan dan dirasa efektif, saya akan menunjuk Jurkam khusus dari Jakarta” (Sumber Data pada lampiran 6: 5.164).

Aburizal Bakrie berada di Kota Singapraja 5 - 6 April 2013. Selain melakukan sosialisasi dalam rangka Pemilihan Presiden, Aburizal Bakri juga menghadiri acara Rakor FPG se-Jawa Timur juga menyerahkan rekomendasi untuk pasangan KarSa dan menemui Sofyan Edi, sekaligus peluncuran pasangan DaDi dalam acara jogging dari jalan Simpang Balapan hingga Jalan Bandung, serta mengisi ceramah motivasi di Universitas Muhammadiyah Singapraja.

Akbar Tanjung datang di Kota Singapraja tepat pada saat kampanye hari terakhir DaDi. Akbar Tanjung berkampanye mengajak segenap kader-kader

intelektual muda HMI Singapraja untuk berpartisipasi dalam Pilwali 23 Mei 2013. Setelah kegiatan kampanye tersebut, keesokan harinya, 24 Mei 2013, Akbar Tanjung menghadiri pertemuan KAHMI di Kota Singapraja di Jalan Basuki Rahmad, yang juga sempat menyisipkan pesan kampanye kepada kader-kader HMI yang hadir.

Waktu itu sempat ramai mas kondisinya, lha tiba-tiba bang Akbar menitipkan pesan untuk memenangkan DaDi, disamping teman-teman HMI tidak mau terlibat masalah Politik, teman-teman kan semua tidak ada yang mempunyai hak pilih untuk kota Singapraja, dan sebenarnya kami yakni kalau Bang Akbar mengetahui hal tersebut, sebagian dari teman-teman malah menganggap, bang akbar tidak terlalu serius dengan pesannya, jadi ya kami nyantai saja, gak ngurus (Sumber Data pada lampiran 6: 5.166).

Hatta Rajasa selaku Ketua Umum PAN hadir ke Singapraja, 5 Mei 2013. Bertempat di Gedung Kartini, Hatta Rajasa memotivasi para kader agar bekerja keras memenangkan pasangan DaDi. Kemenangan DaDi adalah langkah awal pencapaian target perolehan kursi legislatif, dari 4 kursi menjadi 8 kursi (Periksa Lampiran1, Gambar 5.51).

Dari seluruh uraian tentang pembentukan tim pemenang dan juru kampanye pasangan Wara Srikandi dan Wibisono, tampak jelas bagaimana segala strategi dan upaya telah dilakukan oleh Wara Srikandi dan Wibisono sebagaimana dikehendaki oleh Bagus Permadi. Kendati demikian, sebagai politisi berpengalaman, secara pribadi tampaknya Bagus Permadi merasa belum cukup yakin bahwa segala strategi tersebut dapat menjamin kemenangan Wara Srikandi dan Wibisono. Karena itu, masih ada satu lagi strategi yang ditempuh oleh Bagus Permadi, yaitu mengatur

birokrasi yang berada di bawah kewenangannya, serta berupaya mengendalikan sendiri strategi dan upaya pemenangan pasangan calon Wara Srikandi dan Wibisono.

#### 6. Mutasi Pejabat Daerah dan Pengendalian Strategi Pemenangan

Sebulan terakhir menjelang Pemilihan Kepada Daerah, pada hari Jum'at 3 Mei 2013, Bagus Permadi membuat kejutan lagi dengan melaksanakan mutasi besar-besaran. Mutasi yang menyertakan 217 pejabat struktural di jajaran Pemerintah Kota Singapraja, di mana mutasi tersebut hanya selisih 20 (dua puluh) hari dari pelaksanaan pemilihan Walikota Singapraja yang dilaksanakan pada 23 Mei 2013.

Kedekatan waktu pelaksanaan mutasi dengan pelaksanaan pemilihan Walikota Singapraja periode 2013-2018 tentu sempat membuat banyak pihak mempertanyakan alasan pelaksanaannya. Salah satu hal yang paling mendasari pemikiran para wartawan adalah adanya larangan dalam surat edaran Mendagri Nomor 800/5335 SJ tertanggal 27 Desember 2012, tentang pelaksanaan mutasi pejabat struktural menjelang pemilukada kepala daerah dan wakil kepala daerah. Setelah peneliti mengkonfirmasi dengan salah seorang penasehat hukum Bagus Permadi (yang keberatan namanya disebut), yang kemudian menjelaskan bahwa kejadian tersebut tidak tergolong melanggar, karena bagaimanapun peraturan itu sifatnya umum dan tidak spesifik, berikut kutipan wawancara:

Pak Bagus Permadi secara hukum tidak bersalah, karena tidak menyalahi peraturan. Surat edaran itu kan sifatnya tidak spesifik, hanya berisi larangan untuk melakukan kebijakan strategis, sedangkan ketika itu Pemerintah Kota Singapraja memang memerlukan pengisian jabatan yang kosong dikarenakan banyak hal (Sumber data 5.168)



Dari kutipan tersebut, dapat dipahami alasan pernyataan Bagus Permadi yang menyatakan bahwa larangan tersebut hanya berlaku bagi kepala daerah yang akan maju kembali dalam Pilkada. Sehingga tidak berlaku bagi dirinya. Selain itu, juga dikemukakan bahwa mutasi jabatan tersebut sudah menjadi kebutuhan karena ada tujuh jabatan yang kosong, sehingga harus segera dilakukan mutasi untuk menanggapi kekosongan yang tidak boleh terlalu berlarut, sebelum dirinya cuti dan berkonsentrasi membantu Wara Srikandi sebagai calon walikota.

Sehari setelah pemberitaan mutasi sejumlah pejabat tersebut, muncul komentar banyak pihak di media massa. Bagus Permadi dianggap telah melanggar surat edaran Mendagri. Bersamaan dengan komentar-komentar tersebut, juga diberitakan secara langsung tanggapan Bagus Permadi yang menyampaikan kepada media bahwa dirinya menjamin mutasi kali ini bebas dari motif politik. Sebab tidak ada satu pun pejabat yang dimutasi pernah diajak berbicara maupun diminta kontribusi tertentu.

Bagus Permadi menjamin bahwa PNS akan tetap berlaku netral selama masa Pilwali Kota Singapraja. Lebih jauh Bagus Permadi mengatakan, masih mungkin melakukan mutasi lagi sebelum dirinya memasuki masa pensiun, dalam arti berhenti sebagai Walikota Singapraja. Bagus Permadi yakin bahwa tindakannya tidak menyalahi surat edaran dari Mendagri. Berikut adalah petikan tanggapan Bagus Permadi atas tuduhan bahwa tindakan mutasi tersebut menyalahi Surat Edaran Mendagri.

"Kalau saya kan tidak mencalonkan lagi sebagai Walikota Singapraja. Jadi tidak ada masalah dengan mutasi ini, " ujarnya. Lanjut Bagus Permadi, "mutasi jabatan tersebut sudah menjadi kebutuhan karena ada tujuh posisi yang kosong. Jika tidak segera dilakukan mutasi maka akan terjadi kekosongan kekuasaan yang terlalu lama. " Mengingat Bagus Permadi akan cuti untuk menjadi juru kampanye isteri, Wara Srikandi mulai Senin. "Jangan sampai ada kesan terus-terusan melakukan mutasi. Makanya dikumpulkan hari ini semua. " (Sumber Data pada lampiran 6: 5.169).

Pendapat Bagus Permadi tersebut ditanggapi berbeda oleh Direktur Eksekutif Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PP Otoda) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Ngesti D Prasetyo. Dia mengatakan bahwa surat edaran Mendagri tersebut masih mengikat. Walikota yang tidak maju dalam Pilwali seperti Bagus Permadi tetap dilarang melakukan mutasi, kecuali pada jabatan-jabatan yang kosong. Ngesti D Prasetyo juga mengatakan, mutasi yang dilakukan oleh Walikota Singapraja itu sangat patut diduga bermotif politik. Menurutnya, akhir masa jabatan situasi politik tidak menentu. Kondisi tersebut bisa mempengaruhi independensi dan netralitas PNS serta menjadi pola untuk memutasi jabatan. Padahal di akhir masa jabatan yang dibutuhkan kestabilan dan kesinambungan program. Berikut adalah petikan tanggapan Ngesti D. Prasetyo atas mutasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Singapraja "Bisa jadi birokrasi yang tidak sepaham dengan beliau (walikota) itu yang dimutasi. Apalagi mutasi pada ruang strategis seperti kepala dinas, badan dan bagian," (Sumber Data pada lampiran 6: 5.170).

Reaksi keberatan dari para kritisi tersebut tidak begitu lama terjadi. Apa yang terjadi kemudian sekadar kasak-kusuk dari sebagian masyarakat yang mencela tindakan tersebut dan mengaitkannya dengan agenda politik Bagus Permadi dan Wara

Srikandi. Penelusuran yang peneliti lakukan, sebagaimana juga dibenarkan oleh beberapa wartawan, menunjukkan bahwa dalam mutasi tersebut ada beberapa kepala sekolah dan lurah yang dimutasi yang memang dimaksudkan memperlancar kegiatan sosialisasi dan kampanye demi kemenangan Wara Srikandi.

Contoh kasus yang bisa digunakan adalah mutasi Kepala SMK Negeri 2 Kota Singapraja yang diganti oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Kota Singapraja. Banyak pihak mengenal kepala sekolah yang bersangkutan memiliki loyalitas dan keberanian berpihak secara terang-terangan terhadap Bagus Permadi. Setelah menjabat sebagai Kepala SMK Negeri 2 Kota Singapraja, yang memiliki jumlah siswa perempuan sangat besar, menyelenggarakan program atau kegiatan motivasi bagi para siswi dengan mendatangkan Wara Srikandi sebagai motivator. Kegiatan itu sendiri dilaksanakan saat tahapan pemilihan kepala daerah sudah memasuki masa kampanye. Saat peneliti dengan sengaja berkunjung ke *Café Gaul* milik SMK Negeri 2 Kota Singapraja, seorang guru yang juga bertugas di kafe tersebut mengemukakan:

Memang waktu itu sekolah mengadakan kegiatan, tapi saya lupa judulnya apa, ya seputar motivasi untuk siswa. Pak Wadib ingin membuat gebrakan, karena hampir semua siswa di sini kan perempuan. Dulunya kan SMKK. Yang cocok, menurut Pak Wadib ya mengundang Bu Bagus Permadi yang terkenal dengan Tahes ala Bunda, juga terkenal dengan perhatiannya pada perawatan diri. Jadi ini memang soal motivasi bagi siswa perempuan. Jurusan tata busana, tata rias, tata boga dan sejenisnya. Masa mau mengundang Pak Joyodroto?

Rupanya gayung bersambut, permintaan langsung disetujui Bu Bagus Permadi. Persiapan sebentar langsung bisa dilaksanakan. Mungkin karena memang sedang masa kampanye, kemana-mana Bu Bagus Permadi juga diliput wartawan. Jadinya masuk koran. Tapi kalau isinya hanya menyinggung sedikit saja soal jangan golput, juga sudah waktunya perempuan



memimpin dimulai dengan memilih yang perempuan juga. Jadi bukan kampanye seperti di lapangan gitu (Sumber Data pada lampiran 6: 5.171).

Memang, sebagaimana sering dikemukakan oleh para informan, mereka cenderung beranggapan bahwa yang disebut kampanye adalah segala sesuatu yang secara eksplisit mengajak untuk mencoblos calon walikota tertentu, baik dalam bentuk ucapan maupun tulisan. Akan halnya berbagai kegiatan yang dilakukan yang di dalamnya tidak terdapat ajakan langsung, cenderung dianggap bukan merupakan kampanye politik.

Contoh kasus lain berkenaan dengan mutasi yang diduga mengandung motif politik adalah mutasi terhadap sejumlah lurah di Kota Singapraja tanggal 3 Mei 2013. Menurut Taufik, seorang wartawan Karya Dharma, mengemukakan bahwa ada unsur kesengajaan dari Bagus Permadi untuk menempatkan pejabat lurah yang loyal kepada dirinya, terutama di kelurahan-kelurahan tempat tinggal para pesaing Wara Srikandi.

Setahu saya, yang agak tampak itu lurah Bunulrejo. Kan di Bunulrejo itu tinggal keluarga Abimanyu dan Sri Sendari, jadi di sana ditempatkan orang dekatnya Pak Bagus Permadi. Memang tidak ada kejadian yang menonjol, tetapi di sela-sela saya melaksanakan tugas, ternyata apa pun yang terjadi di kelurahan yang melibatkan keluarga Abimanyu dan Sri Sendari, ternyata orang-orang dekat dan tim suksesnya DaDi selalu tahu lebih dulu. Ya intinya mereka nggak mau kecolongan, itu saja menurut saya (Sumber Data pada lampiran 6: 5.172).

Persaingan antara Wara Srikandi dengan Sri Sendari memang sangat tampak, terutama bagi masyarakat Kelurahan Bunulrejo. Sebagai contoh, saat tim sukses menjadwalkan Wara Srikandi berkegiatan di Kelurahan Bunulrejo, tiba-tiba saja Sri Sendari ikut hadir dengan mengatasnamakan sebagai warga Kelurahan Bunulrejo.

Saat itu, sebagaimana dituturkan oleh M. Ariful Huda, wartawan Memo Arema, tiba-tiba saja susunan acara mengalami perubahan, sehingga Wara Srikandi tidak jadi menyampaikan sambutan sebagaimana biasa.

Setelah mempersiapkan semuanya, terutama melakukan mutasi sebagai sarana untuk mengisi jabatan-jabatan strategis pada orang-orang kepercayaannya, Bagus Permadi mengambil langkah cuti dan mengambil alih tongkat komando dalam kemenangan pasangan DaDi. Cuti tersebut diambil selama dua minggu menjelang pilkada yakni tanggal 6 - 20 Mei 2013. Karena masa kampanye adalah tanggal 07 - 18 Mei 2013, maka praktis selama masa kampanye Bagus Permadi sepenuhnya memusatkan perhatian, tenaga dan pikirannya untuk mengendalikan sendiri strategi peningkatan elektabilitas pasangan Wara Srikandi dan Wibisono.

Menurut Bagus Permadi, dengan mengajukan cuti selama dua pekan tersebut akan dapat membuatnya *all out* dan fokus berperan sebagai juru kampanye pasangan nomor urut 3, DaDi. Selain itu, langkah cuti tersebut memang diatur dalam undang-undang dalam upayanya menghindari penggunaan fasilitas negara (yang juga bisa diartikan lebih pada pemanfaatan sumber daya negara) yang disebabkan oleh keterpihakan pejabat negara dalam sebuah pemilihan Kepala Daerah. Berikut adalah kutipan pernyataan Bagus Permadi tentang pengajuan cuti yang akan ia gunakan untuk membantu istrinya dalam memenangkan pemilihan walikota "Agar saya bisa fokus membantu isteri saya dalam memenangkan pemilihan kepala daerah, 23 Mei nanti, saya mengajukan cuti selama dua pekan kepada Menteri Dalam Negeri

Gamawan Fauzi melalui Gubernur Jatim Soekarwo," (Sumber Data pada lampiran 6: 5.173).

Menurut hasil wawancara peneliti kepada salah seorang wartawan yang pada waktu itu berada di kubu Pasangan DaDi, langkah cuti yang ditempuh Bagus Permadi adalah untuk memantapkan kinerja tim pemenangan DaDi yang pada waktu itu tidak bekerja sebagaimana yang diharapkan, dan memang terbukti sedikit mengalami perbaikan setelah diambil-alih langsung oleh Bagus Permadi, berikut kutipannya:

Pak Bagus Permadi itu tidak percaya mas sama tim suksesnya, itu makanya dia mengambil cuti selama dua minggu untuk mengambil alih komando dalam pemenangannya, lha coba bayangkan, mendekati hari HA, malah pada bertengkar, jadi ya macet, berhenti. Ada yang menghilang juga tanpa kabart pimpinan parpol lainnya, wong malah ditinggal umroh sama Lesmono, ketua DPD Kota Singapraja kok. Makanya kinerja tim pemenangan DaDi kacau, tidak produktif. Tapi sejak dipimpin Pak Bagus Permadi lumayan mas, meskipun DaDi pada akhirnya hanya berada di urutan ketiga (Sumber Data pada lampiran 6: 5.174).

Berdasarkan seluruh uraian tersebut bisa disimpulkan bahwa sejak tahap peningkatan popularitas, pemerolehan legalitas hingga peningkatan elektabilitas Wara Srikandi, yang akhirnya berpasangan dengan Wibisono, sebenarnya Bagus Permadi telah melakukan segala usaha, termasuk di dalamnya adalah melakukan mutasi sejumlah pejabat daerah serta mengambil cuti sebagai Walikota Singapraja, yang terhitung sehari menjelang masa kampanye hingga dua hari setelah masa kampanye.

## 7. Rangkuman Strategi Peningkatan Elektabilitas *Nepos*

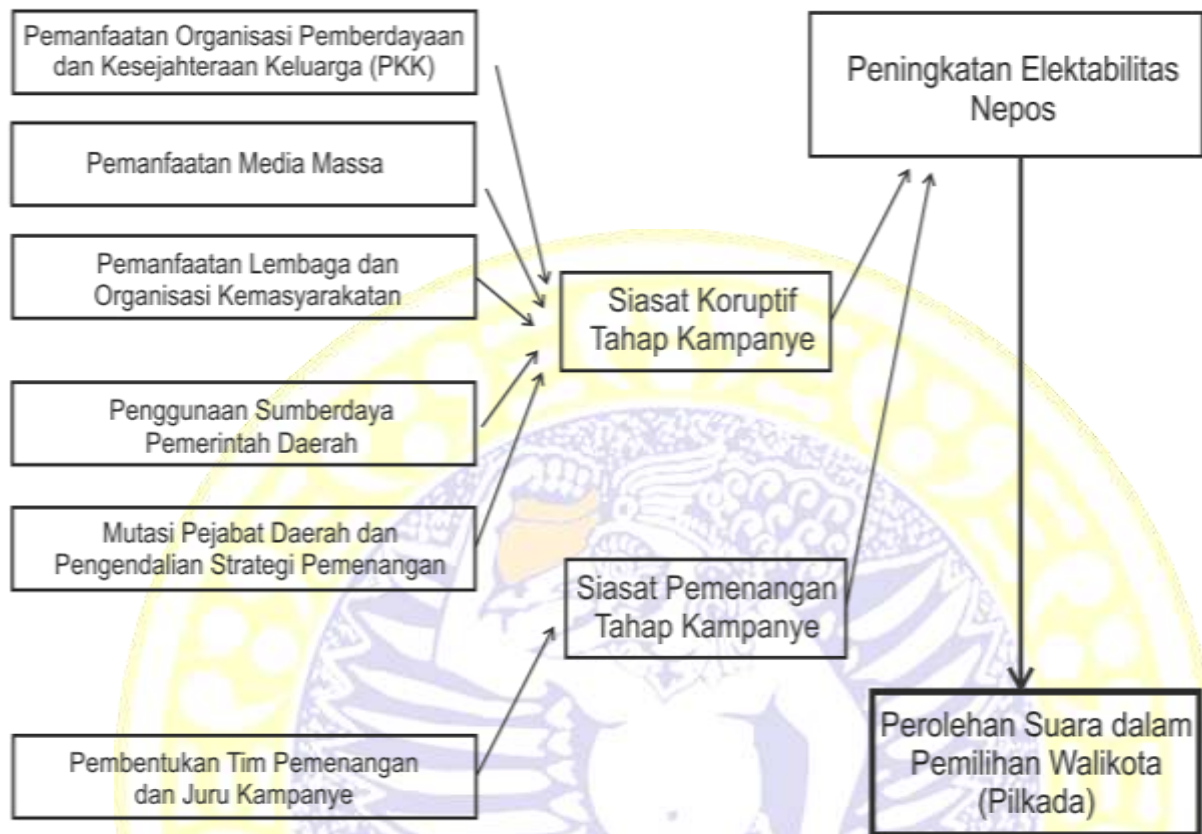
Bagus Permadi melakukan sejumlah siasat untuk meningkatkan elektabilitas isterinya dengan melakukan sejumlah siasat tindakan, antara lain: (1) Membayar



Media Massa Lokal, (2) Mengatur PKK agar Terkesan Hebat, (3) Mobilisasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat, (4) Mobilisasi Lurah, Kepala Dusun, Ketua RW dan Ketua RT, (5) Membentuk Tim Sukses dari Tokoh Berpengaruh, (6) Menyelenggarakan Mutasi Pejabat di Instansi-Instansi Strategis, (7) Mobilisasi Elit Politik Lokal dan Nasional, dan (8) Mengambil Cuti untuk Memimpin Tim Sukses.

Siasat membayar media massa lokal tidak hanya dalam bentuk iklan dengan ukuran sangat besar, hingga sehalaman penuh berwarna, dalam bentuk advertorial atau iklan yang ditayangkan menyerupai berita, tetapi juga dalam bentuk pemberitaan yang isinya sejalan dengan iklan dan advertorial (Periksa Lampiran). Siasat berikutnya adalah menggunakan PKK sebagai kendaraan politik dengan cara membuat seolah-olah PKK Kota Singapraja, yang senantiasa menampilkan Ketua TP PKK-nya, yaitu Wara Srikandi sebagai sosok yang bisa menjadi PKK begitu hebat, bukan hanya di tingkat nasional tetapi juga internasional.

Selain memobilisasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat, memobilisasi Lurah, Kepala Dusun, Ketua RW dan Ketua RT, membentuk Tim Sukses dari para Tokoh Berpengaruh, melakukan Mutasi Pejabat di Instansi-Instansi Strategis, memobilisasi Elit Politik Lokal dan Nasional, Bagus Permadi sendiri bahkan juga mengambil cuti agar bisa langsung memimpin tim sukses bagi pencalonan isterinya, Wara Srikandi. Semua siasat tersebut, pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan elektabilitas Wara Srikandi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singapraja.



**Gambar 5.52: Siasat Peningkatan Elektabilitas**

Sejumlah siasat memang tidak dapat digolongkan sebagai bentuk praktik politik nepotisme, tetapi tetap saja dapat digolongkan sebagai siasat untuk mensukseskan seorang calon walikota hasil dari praktik politik nepotisme. Karena itu, bila sebuah bisa tindakan dinilai berdasarkan tujuan dan cara, maka meskipun cara yang dilakukan tidak melanggar normadan etika, apabila dilakukan untuk mencapai tujuan yang melanggar norma dan etika, maka cara tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan etik.

Dari semua siasat tersebut, secara permukaan memang tidak senantiasa merupakan pelanggaran hukum, tetapi merupakan pelanggaran etika profesional. Sebagai contoh, siasat membayar media cetak dan elektronik untuk meningkatkan elektabilitas, dari satu sisi bisa dipandang sebagai hubungan semata-mata bisnis, dalam arti memasang iklan dan advertorial. Namun demikian, bila sudah menyangkut pemberitaan yang tidak objektif atas suatu kejadian atau pernyataan, sudah bisa dikategorikan sebagai pelanggaran etika profesi jurnalistik.

Sebuah catatan khusus perlu diberikan terhadap siasat memutasi pejabat instansi strategis. Sebagaimana data lapangan menunjukkan, sebagai kegiatan transaksional, ternyata beberapa pejabat instansi Pemerintah Daerah justru melakukan tindakan yang bisa dikategorikan melanggar peraturan perundang-undangan. Di antara tindakan yang bisa dikategorikan sebagai pelanggaran tersebut antara lain penggunaan lembaga pendidikan sebagai tempat dan sasaran berkampanye yang justru diprakarsai oleh Kepala Sekolah. Juga bisa ditemukan seorang Lurah yang atas biaya sendiri melakukan praktik politik uang dengan memberikan amplop berisi uang kepada warga masyarakat agar memilih pasangan calon yang dikehendaki oleh kepala daerah.